



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH EFEKTIFITAS DEWAN KOMISARIS DAN  
KOMITE AUDIT, KOMPLEKSITAS, KARAKTERISTIK ASET  
DAN *AGENCY PROBLEM* PERUSAHAAN TERHADAP  
TINGKAT PENGUNGKAPAN SUKARELA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi**

**ANGGI NURFADILLAH**

**1006810492**

**FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM EKSTENSI  
KEKHUSUSAN AKUNTANSI  
DEPOK  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Anggi Nurfadillah

NPM : 1006810492

Tanda Tangan : (

Tanggal : 22 Juni 2012




## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh


Nama : Anggi Nurfadillah  
NPM : 1006810492  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris, Komite Audit, Kompleksitas, Karakteristik Aset, dan *Agency Problem* Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan Diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Ekstensi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ancella A. Hermawan.,S.E., M.BA (  )

Penguji : Budi Frensidy, S.E, M.Comm (  )

Penguji : Dr. Fitriany S.E., Ak., M.Si (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 13 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi,

**SRI NURHAYATI, MM., S.A.S**

NIP: 196003171986022001

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang maha penyayang dan maha pemberi nikmat, hanya dengan ridhoNya-lah penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada universitas tercinta. Terima kasih yang tak terhingga penulis berikan kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang luar biasa saya ucapkan kepada:

1. Dr. Ancella Hermawan selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan saya dan membantu memberikan ide dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini
2. Teruntuk papah dan mamah, terima kasih atas segala curahan kasih sayang dan doa yang tak pernah putus diberikan kepada saya, sungguh doa dan dukungan kalian yang membuat segalanya dapat terselesaikan dengan baik. Semoga dengan gelar ini dapat memberikan sedikit kebanggaan dan dapat membahagiakan papah dan mamah serta dapat lebih berguna ke depannya.
3. Untuk kedua kakak saya, Tete dan Teh Pipit, terima kasih atas segala bentuk dukungan dan doanya, hingga saya bisa menyelesaikan studi ini.
4. Husnil Barry, yang telah banyak sekali membantu, memberikan dukungan moril, doa, hingga segalanya dapat terselesaikan dengan baik. Sungguh barry telah membuat segalanya menjadi lebih mudah
5. CCIT FTUI yang telah memberikan ijin selama pelaksanaan skripsi
6. Teman-teman FEUI, Sita, Fitri, Feby, Ina, Apit sungguh kalian membuat segalanya lebih menyenangkan.
7. Teman-teman satu bimbingan, Nanda, Lucky, Imey, Dinda, Dara, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata. Semoga skripsi ini berguna khususnya bagi diri penulis dan umumnya bagi pembaca.

Jakarta, 22 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Nurfadillah  
NPM : 1006810492  
Program Studi : Akuntansi  
Program : Ekstensi  
Fakultas : Ekonomi  
Jenis karya : Laporan Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGARUH EFEKTIFITAS DEWAN KOMISARIS DAN  
KOMITE AUDIT, KOMPLEKSITAS, KARAKTERISTIK ASET  
DAN AGENCY PROBLEM PERUSAHAAN TERHADAP  
TINGKAT PENGUNGKAPAN SUKARELA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Anggi Nurfadillah)

## ABSTRAK

Nama : Anggi Nurfadillah  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit,  
Kompleksitas Perusahaan dan Karakteristik Aset  
Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dua atribut utama *corporate governance* yaitu efektifitas dewan komisaris dan komite audit, serta kompleksitas perusahaan, karakteristik aset dan *agency problem* terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan di Indonesia. Dalam penelitian ini, Untuk menilai pengungkapan sukarela digunakan *score* berdasarkan penelitian *Chau and Gray* (2010) dengan penyesuaian peraturan BAPEPAM-LK, sementara untuk menilai efektifitas dewan komisaris dan komite audit dinilai menggunakan *score* berdasarkan *checklist* yang digunakan oleh Hermawan (2009). Terdapat empat karakteristik dalam perhitungan *score*, yaitu dengan melihat independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi dari dewan komisaris dan komite audit. Pengujian hipotesis dengan model regresi linier berganda yang menggunakan 408 observasi (*firmyear*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 dan 2011. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel efektifitas dewan komisaris dan komite audit serta kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela pada nilai  $\alpha$  1%, yang berarti semakin baik efektifitas dewan komisaris dan komite audit, maka pengungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan akan semakin tinggi, dan semakin kompleks perusahaan maka tingkat pengungkapan sukarela perusahaan juga akan semakin tinggi. Sementara variabel lainnya yaitu karakteristik aset perusahaan dan *agency problem* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

Kata kunci:

Pengungkapan sukarela, efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, kompleksitas perusahaan, karakteristik aset perusahaan, *agency problem*.

## ABSTRACT

Name : Anggi Nurfadillah  
Study Program : Accounting  
Title : The Effect of Board of Commissioner and Audit Committee Effectiveness, Firm Complexity, Agency Problem and Characteristics of Corporate Assets on the Voluntary Disclosure Level

This study aims to examine empirically the association between board of commissioner and audit committee effectiveness, firm complexity, characteristic of assets and agency problem on voluntary disclosure level in Indonesia. A disclosure checklist consisting of 60 voluntary items of information which is developed by Chau and Gray (2010) but adjusted to the BAPEPAM-LK regulations. The effectiveness of board of commissioner and audit committee score are based on the checklist used by Hermawan (2009). Hypothesis testing is carry out by way multiple linear regression model, using 408 observations (firm year) of listed in the Bursa Efek Indonesia during 2010 and 2011. The findings indicate that the effectiveness of the board of commissioner and audit committee, also firm complexity has positive and significant effect on voluntary disclosure, in contrast, characteristics of firm assets and agency problem has no significant effect on the voluntary disclosure level.

**Key Word:**

*Voluntary Disclosure, the Board of Commissioner Effectiveness, Audit Committee Effectiveness, Firm Complexity, Assets in Place, Agency Problem*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
1. 2 Perumusan Masalah .....	5
1. 3 Tujuan Penelitian.....	6
1. 4 Manfaat Penelitian.....	6
1. 7 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI</b> .....	9
2. 1 <i>Corporate Governance</i> .....	9
2. 2 Prinsip Transaparansi dan Pengungkapan ( <i>Disclosure</i> ).....	11
2. 3 <i>Agency Problem</i> dan <i>Disclosure Level</i> .....	15
2. 4 Struktur <i>Corporate Governance</i> dan <i>Disclosure Level</i> .....	17
2.4.1 Dewan Komisaris.....	18
2.4.1.1 Independensi Dewan Komisaris.....	18
2.4.1.2 Aktifitas Dewan Komisaris.....	20
2.4.1.3 Jumlah Anggota ( <i>size</i> ) Dewan Komisaris.....	22
2.4.1.4 Kompetensi Dewan Komisaris.....	23
2.4.2 Komite Audit .....	24
2.4.2.1 Independensi Komite Audit.....	25
2.4.2.2 Aktifitas Komite Audit.....	27
2.4.2.3 Jumlah Anggota ( <i>size</i> ) Komite Audit.....	28



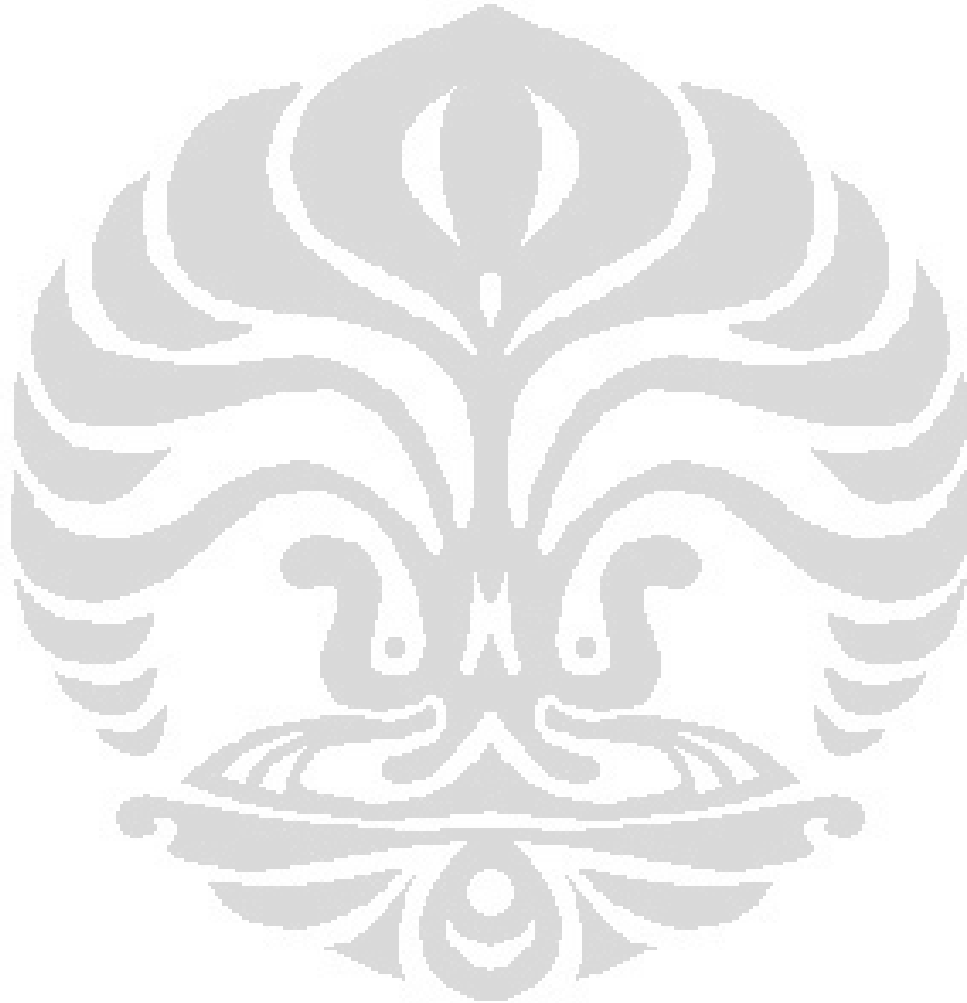
2.4.1.4 Kompetensi Komite Audit.....	29
2.5 Kompleksitas Perusahaan ( <i>Complexity</i> ) dan <i>Disclosure Level</i> .....	30
2.6 <i>Assets in Place</i> dan <i>Disclosure Level</i> .....	32
2.7 Faktor-faktor Lain yang Berpengaruh Terhadap Pengungkapan	
Sukarela.....	33
2.7.1 Profitabilitas Perusahaan ( <i>Profitability</i> ).....	33
2.7.2 Ukuran Perusahaan ( <i>Size</i> ).....	34
2.7.3 Umur Perusahaan ( <i>Age</i> ).....	35
2.7.4 Kualitas Audit.....	36
2.8 Kerangka Konseptual.....	38
2.9 Pengembangan Hipotesis.....	40
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	47
3.1 Metode Penelitian.....	47
3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	48
3.2.1 Variabel Dependen.....	49
3.2.2 Variabel Independen .....	49
3.2.2.1 Skor efektifitas Dewan Komisari.....	49
3.2.2.2 Skor efektifitas Komite Audit.....	49
3.2.2.3 Kompleksitas Perusahaan.....	50
3.2.2.4 <i>Assets in Place</i> .....	50
3.2.2.5 <i>Agency Problem</i> .....	51
3.2.3 Variabel Kontrol.....	51
3.2.3.1. Profitabilitas.....	51
3.2.3.2 Ukuran Perusahaan.....	52
3.2.3.3 Umur Perusahaan.....	52
3.2.3.4 Kualitas Audit Eksternal .....	52
3.3 Populasi dan Sampel.....	53
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.5 Metode Analisis Data.....	54
3. 5.1 Uji Validitas Skor Dewan Komisaris dan Komite	
Audit.....	54
3.5.2 Statistik Deskriptif.....	54

3.5.3 Analisis Autokorelasi.....	55
3.5.4 Analisis Regresi Berganda.....	55
3.5.5 Uji Asumsi Klasik.....	56
3.5.5.1 Uji Normalitas.....	56
3.5.5.2 Uji Multikolinearitas.....	57
3.5.5.3 Uji Heteroskedastisitas.....	57
3.5.5.4 Uji Statistik F .....	58
3.5.5.5 Uji Statistik t.....	58
3.5.5.6 <i>Goodnes of Fit (R<sup>2</sup>)</i> .....	58
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
4. 1 Deskripsi Pemilihan Sampel Penelitian.....	60
4. 2 Analisis Statistik Deskriptif.....	61
4.2.1 Uji Validitas Skor Dewan Komisaris dan Komite Audit.....	61
4.2.2 Analisis Skor Efektifitas Dewan Komisaris.....	62
4.2.3 Analisis Skor Efektifitas Komite Audit.....	66
4.2.4 Analisis Skor Pengungkapan Sukarela .....	69
4.2.5 Analisis Statistik Deskriptif Model Penelitian Lainnya.....	71
4. 3 Analisis Korelasi <i>Pearson</i> dalam Model 1 dan Model 2.....	77
4. 4 Uji Asumsi Klasik .....	78
4.4.1 Uji Normalitas .....	78
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	79
4.4.3 Uji Heterokedastisitas.....	80
4.4.4 Uji Autokorelasi.....	80
4.4.5 Uji Analisis Statistik F.....	81
4.4.6 Uji Analisis <i>Goodness of Fit</i> .....	82
4. 5 Analisis Hasil Pengujian Hipotesis.....	82
4.5.1 Pengaruh Skor Efektifitas Dewan Komisaris Terhadap Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela Perusahaan.....	82
4.5.2 Pengaruh Skor Efektifitas Komite Audit Terhadap Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela Perusahaan.....	86
4.5.3 Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela Perusahaan.....	87

4.5.4 Pengaruh Karakteristik Aset Perusahaan Terhadap Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela Perusahaan.....	89
4.5.5 Pengaruh <i>Agency Problem</i> Terhadap Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela Perusahaan.....	91
4.5.6 Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris Terhadap <i>Agency Problem</i> Dalam Mempengaruhi Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela.....	92
4.5.7 Pengaruh Efektifitas Komite Audit Terhadap <i>Agency Problem</i> Dalam Mempengaruhi Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela.....	93
4. 6 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Variabel Dependen.....	94
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	98
5. 1 Kesimpulan .....	98
5. 2 Batasan Penelitian.....	100
5. 3 Saran .....	100
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	103

## DARTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran 1.....	38
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Pemikiran 2.....	39
<b>Gambar 4.1</b> Grafik Normal P-P Plot DSCORE.....	74

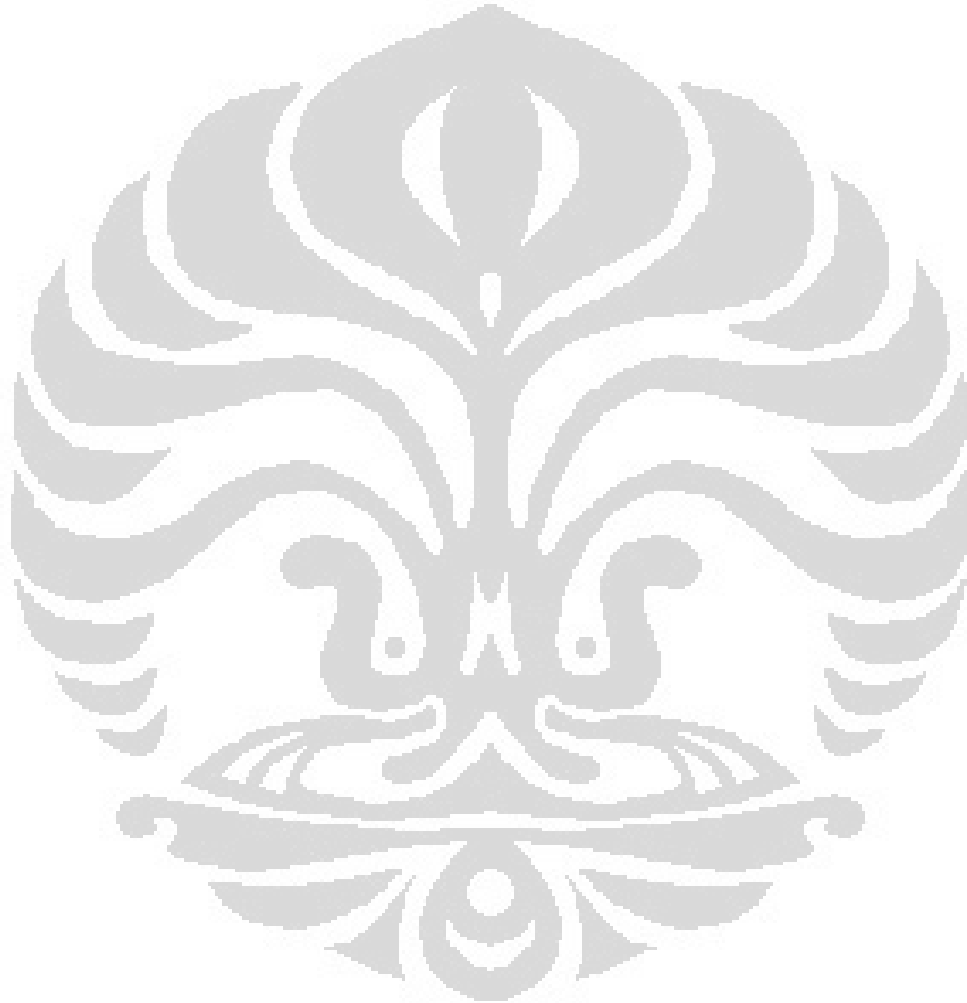


## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4. 1</b> Populasi dan Pengambilan Sampel Penelitian.....	60
<b>Tabel 4. 2</b> Pengelompokan Sampel Perusahaan Berdasarkan Sektor Industri	61
<b>Tabel 4. 3</b> <i>Reliability Test</i> .....	61
<b>Tabel 4. 4</b> Statistik Deskriptif Efektifitas Dewan Komisaris .....	63
<b>Tabel 4. 5</b> Interval Skor Dewan Komisaris.....	64
<b>Tabel 4. 6</b> Pembagian Skor Efektifitas Dewan Komisaris per Industri.....	65
<b>Tabel 4. 7</b> Statistik Deskriptif Efektifitas Komite Audit.....	66
<b>Tabel 4. 8</b> Interval Skor Komite Audit.....	68
<b>Tabel 4. 9</b> Pembagian Skor Efektifitas Komite Audit Berdasarkan Sektor Industri.....	68
<b>Tabel 4. 10</b> Pembagian Pengungkapan Sukarela Per Industri .....	70
<b>Tabel 4. 11</b> Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Lainnya.....	72
<b>Tabel 4. 12</b> Analisis Korelasi Pearson Model 1, 2 dan 3.....	77
<b>Tabel 4. 13</b> One Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	78
<b>Tabel 4. 14</b> Pengujian Multikolinearitas Dengan Tolerance dan VIF pada Ketiga Model.....	79
<b>Tabel 4. 15</b> Pengujian Heterokedastisitas pada ketiga model Model.....	80
<b>Tabel 4. 16</b> Pengujian Autokolerasi Pada Ketiga Model.....	81
<b>Tabel 4. 17</b> Pengujian Analisis Statistik F Pada Ketiga Model.....	82
<b>Tabel 4. 18</b> Hasil Regresi Model 1.....	84
<b>Tabel 4. 19</b> Hasil Regresi Model 2.....	90
<b>Tabel 4. 20</b> Hasil Regresi Model 3.....	94

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Daftar <i>Checklist Voluntary Disclosure</i> .....	106
<b>Lampiran 2.</b> Daftar Pertanyaan Skoring Efektifitas Dewan Komisaris.....	109
<b>Lampiran 3.</b> Daftar Pertanyaan Skoring Efektifitas Komite Audit.....	113
<b>Lampiran 4.</b> Daftar Nama Sampel Perusahaan .....	115



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1. 1 Latar Belakang Masalah

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1 Tahun 2004 mengenai penyajian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Pada perusahaan publik di Indonesia, penyajian laporan keuangan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Menurut peraturan BAPEPAM-LK nomor VIII.G.7 tahun 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, manajemen emiten atau perusahaan publik bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. BAPEPAM-LK mensyaratkan bahwa laporan keuangan perusahaan harus disusun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PSAK yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di pasar modal.

Pengungkapan dalam laporan keuangan merupakan salah satu bentuk ketaatan manajemen dalam penerapan *corporate governance* yang baik. *Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan yaitu dewan komisaris<sup>1</sup>, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku (KNKG, 2006).

---

<sup>1</sup> Indonesia menganut struktur dewan *two board system* dimana terdapat pemisahan tugas antara dewan komisaris dan dewan direksi. Istilah dewan komisaris di Indonesia dapat disamakan dengan *board of director* dalam *one tier system* berdasarkan karakteristik dan fungsinya.

Pengungkapan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan wajib menurut BAPEPAM-LK adalah sesuai dengan pengertian laporan keuangan yang termuat dalam PSAK yang diterbitkan oleh IAI, yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas bagi manajemen untuk memberikan dan mengungkapkan informasi yang ingin disampaikan dari kondisi perusahaannya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan pengungkapan wajib di Indonesia, harus sesuai dengan aturan BAPEPAM-LK nomor VIII.G.7 tahun 2000 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik. Penelitian tentang pengungkapan wajib dilakukan oleh Archambault dan Archambault (2003) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam menetapkan peraturan tentang pengungkapan wajib. Penelitian tersebut mengembangkan sebuah model yang memperkirakan kebijakan pengungkapan wajib di Amerika sebagai respon dari berbagai faktor makro, seperti budaya, sistem nasional, dan sistem perusahaan. Hasilnya adalah faktor budaya berperan penting dalam mempengaruhi bagaimana sistem nasional dan sistem perusahaan di Amerika berinteraksi satu sama lain, dan pada akhirnya menjadi landasan kebijakan wajib perusahaan. Sistem nasional seperti hukum, politik, ekonomi dan inflasi, juga mempengaruhi pemerintah dalam membuat pedoman pengungkapan wajib seperti *General Accepted Accounting Principles* (GAAP). Dan yang terakhir, sistem perusahaan seperti jenis industri, *stock option*, *leverage*, struktur kepemilikan saham, *size*, diversifikasi perusahaan, dan struktur *corporate governance* mempengaruhi kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyusun regulasi pengungkapan wajib di Amerika.

Pengungkapan sukarela menarik untuk diteliti karena pengungkapan ini dapat mengurangi kesenjangan asimetri informasi antara perusahaan dan pasar



yang memfasilitasi perdagangan sahamnya (Godfrey, 2009: 438). Faktor-faktor yang menentukan tingkat pengungkapan sukarela dapat dilihat dari banyak faktor, di antaranya dari struktur *corporate governance* yang dimiliki. Berdasarkan KNKG (2006) kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu dewan komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Dewan komisaris sebagai wakil dari pemegang saham di perusahaan memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada manajemen demi mencapai tujuan perusahaan. Namun demikian, keberadaan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan tidaklah cukup untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan adanya efektifitas dari dewan komisaris. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2009) menyatakan bahwa skor dari efektifitas dewan komisaris yang diukur berdasarkan karakteristik independensi, aktifitas, *size*, dan kompetensi mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kandungan informasi laba perusahaan. Pengukuran efektifitas dewan komisaris berdasarkan karakteristik yang mempengaruhinya yang diukur secara keseluruhan dengan menggunakan *scoring* dianggap akan dapat mengukur dengan lebih baik tingkat efektifitas peran dan kekuatan (*strenght*) dewan komisaris dibandingkan pengukuran masing-masing karakteristik secara individual (Hermawan, 2009). Menurut Arcay dan Vazquez (2005), yang meneliti hubungan antara karakteristik perusahaan, struktur *corporate governance* perusahaan dengan kebijakan pengungkapan perusahaan, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara proporsi *board* yang independen dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

Struktur *corporate governance* lainnya adalah komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan dan salah seorang anggotanya memiliki

latar belakang dan kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan (KNKG, 2006). Seperti halnya dewan komisaris, keberadaan komite audit tidaklah cukup tanpa didukung oleh efektifitas kinerjanya. Pengukuran tingkat keefektifan komite audit dengan menggunakan *scoring* dianggap lebih baik dalam mengukur tingkat keefektifan komite audit dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ho dan Wong (2001) menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela secara positif dan signifikan berkaitan dengan fungsi komite audit dimana komite audit dinilai sebagai sebuah mekanisme pemantauan untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada pihak eksternal. Hasil tersebut didukung oleh Arcay dan Vazquez (2005) yang membuktikan bahwa pembentukan komite audit dalam perusahaan dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.

Perusahaan publik yang terdaftar di BEI memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, dalam pelaporan keuangannya, dibandingkan dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik. Kompleksitas ini dapat terlihat dari jumlah anak perusahaan yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2002) menyarankan bahwa struktur kompleksitas perusahaan penting dalam menjelaskan variabilitas dalam tingkat pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Hossain dan Hammami (2009) menemukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kompleksitas perusahaan dengan jumlah anak perusahaan yang dimiliki sebagai *proxynya*, dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

Karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) merupakan pengalokasian jumlah aset tetap dari total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. *Assets in place* secara sistematis mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela di Amerika Serikat, oleh karena itu *assets in place* menjadi penting dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela (Hossain dan Hammami, 2009). Perusahaan dengan persentase aset tetap yang lebih tinggi akan memiliki *agency cost* yang lebih rendah, karena akan lebih sulit bagi manajemen perusahaan untuk melakukan penyalahgunaan dalam pelaporan keuangannya (*opportunis*) terkait aset tetap, karena adanya definisi yang jelas bagi aset tetap (Butler *et al*, 2002). Penelitian

yang dilakukan Hossain dan Hammanmi (2009) mendapatkan bukti empiris bahwa penempatan aset (*assets in place*) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

Masalah dalam *corporate governance* berasal dari asimetri informasi dan *agency problem* di antara pemilik perusahaan (*shareholders*) dan manajemen perusahaan. Masalah ini mempengaruhi nilai (*firm value*) dan kinerja perusahaan (Chi dan Lin, 2008). *Agency problem* juga mempengaruhi pengungkapan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Salah satu yang berpengaruh adalah kualitas laba yang dilaporkan. Dalam penelitiannya, Ali *et al*, (2007) menilai kualitas laba yang dilaporkan dengan memeriksa kemampuan perusahaan untuk memprediksi arus kas masa depan (*free cash flow from operation*). Arus kas ini penting karena menunjukkan seberapa banyak kas dari operasi yang tersedia untuk menutupi pembayaran bunga perusahaan.

## 1. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini menguji beberapa hal berikut:

1. Apakah efektifitas dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan?
2. Apakah efektifitas komite audit mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan?
3. Apakah tingkat kompleksitas perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan?
4. Apakah karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan?
5. Apakah *agency problem* yang dimiliki perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan?
6. Apakah dewan komisaris yang efektif, akan memperkecil pengaruh *agency problem* yang dimiliki perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan?

7. Apakah komite audit yang efektif, akan memperkecil pengaruh *agency problem* yang dimiliki perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh efektifitas dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh efektifitas komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tingkat kompleksitas perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.
5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *agency problem* yang dimiliki perusahaan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.
6. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komite audit yang efektif terhadap *agency problem* yang dimiliki perusahaan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.
7. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komite audit yang efektif terhadap *agency problem* yang dimiliki perusahaan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kontribusi dari penelitian ini antara lain:

- Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menentukan pengungkapan sukarela perusahaan di Indonesia dari berbagai industri secara keseluruhan.

- **Bagi Investor**  
Sebagai acuan keputusan dan bahan pertimbangan dalam berinvestasi. Kedepannya informasi dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.
- **Bagi Regulator (Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan)**  
Memberikan saran dan masukan bagi regulator dalam menyusun peraturan mengenai pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan agar informasi yang disampaikan manajemen perusahaan dapat membantu para investor dalam membuat berbagai keputusan terkait investasinya dalam perusahaan.
- **Bagi Perusahaan**  
Memberikan masukan dan tambahan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela pada perusahaan di Indonesia pada umumnya, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya yang dibutuhkan oleh investor dan para pengguna laporan keuangan lainnya.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian mengapa pengungkapan sukarela penting dilakukan, faktor-faktor yang terkait dengan pengungkapan sukarela, perumusan masalah mengenai faktor yang menentukan pengungkapan sukarela yang ingin diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian ini bagi akademisi, regulator, investor dan perusahaan itu sendiri, dan sistematika penulisan.

### BAB 2 TINJAUAN LITERATUR

Bab ini membahas teori dan definisi mengenai pengungkapan dan transparansi, tujuan pengungkapan dan transparansi, pengertian dan teori mengenai pengungkapan sukarela, *agency problem*, *corporate governanc*,

prinsip-prinsip *corporate governance*, manfaat penerapan *corporate governance*, peran dewan komisaris dan komite audit, serta menjelaskan hubungan antara dewan komisaris, komite audit, kompleksitas perusahaan, karakteristik aset perusahaan, dan *agency problem* dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

### BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai kerangka pemikiran, operasionalisasi variabel-variabel penelitian yaitu pengungkapan sukarela, dewan komisaris, komite audit, kompleksitas perusahaan, karakteristik aset perusahaan, dan *agency problem*, metode pengumpulan data penelitian dan metode pengujian data sampel yang digunakan yaitu dari populasi perusahaan yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2010 dan 2011.

### BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai analisis atas hasil pengujian sampel yang sudah dilakukan, hasil pengujian tersebut berupa statistik deskriptif, analisis korelasi, dan hasil regresi penelitian.

### BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Secara umum bab ini berisikan penutup atas penelitian tentang faktor-faktor determinan tingkat pengungkapan sukarela, yaitu kesimpulan penelitian yang didapat setelah proses pengolahan data dan sampel, keterbatasan dalam penelitian ini, saran dan masukan yang membangun atas penelitian ini untuk masa yang akan datang dan untuk pihak-pihak yang berkepentingan atas penelitian ini.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN LITERATUR**

#### **2.1 Corporate Governance**

Pengertian *corporate governance* menurut *Organizational for Economic Cooperation and Development (OECD)* adalah suatu struktur yang terdiri dari pemegang saham, *board of director*, dan manajemen, yang berhubungan antara satu sama lain dan saling bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Pengertian lain menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* (2008), *corporate governance* adalah struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah sebuah mekanisme dan seperangkat peraturan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan tingkah laku manajemen yang mengatur pola hubungan yang harmonis antar organ-organ perusahaan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Dalam prakteknya, penerapan *corporate governance* berbeda di setiap negara, di Indonesia, pedoman mengenai pelaksanaan *corporate governance* bagi perusahaan telah dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang mengeluarkan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktek *Good Corporate Governance (GCG)* kepada pemangku kepentingan. GCG merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep GCG diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring

dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan menguntungkan banyak pihak di kemudian hari.

KNKG (2006) merumuskan prinsip-prinsip *Corporate Governance* sebagai berikut:

a. *Fairness* (keadilan)

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham melalui peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.

b. *Transparency* (transparansi)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan. Sehingga para investor dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

c. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

d. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

e. *Independency* (independensi)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tidak ada pihak yang mendominasi yang kemudian akan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip CGC oleh perusahaan, maka akan mendatangkan suatu nilai tambah dan manfaat yang besar bagi perusahaan dan para



*stakeholdernya*. Adapun manfaat penerapan GCG menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* (2008), yaitu sebagai berikut:

- a. Menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan.
- b. Mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh.
- c. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen.
- d. Menurunkan *cost of capital* sebagai dampak dikelolanya perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab.
- e. Menciptakan dukungan *stakeholders* terhadap perusahaan (*licence to operate*).

Manfaat *corporate governance* ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang yang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global.

## **2.2 Prinsip Transparansi dan Pengungkapan (*Disclosure*)**

Salah satu prinsip *corporate governance* adalah transparansi. Penerapan transparansi perusahaan dan pengungkapan informasi secara penuh (*full disclosure information*) merupakan atribut inti dari mekanisme *corporate governance* dan dianggap sebagai faktor yang sangat penting dalam kualitas *corporate governance* perusahaan (OECD, 2004). Transparansi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan perusahaan agar dapat meminimalisir timbulnya *agency problem* dan asimetri informasi dalam perusahaan. Bentuk kepatuhan perusahaan terhadap prinsip transparansi salah satunya adalah penyajian laporan keuangan yang baik dan berkualitas yang dapat mengungkapkan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* perusahaan. Menurut Chui dan Chi (2009), dengan adanya praktek pengungkapan dan transparansi melalui laporan keuangan dapat memungkinkan pemegang saham dan investor untuk secara efektif memantau keputusan manajemen dan kinerja perusahaan.

Adapun Pedoman Pokok Pelaksanaan Transparansi menurut KNKG (2006) adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Seperti yang telah dijelaskan, pemenuhan prinsip transparansi oleh perusahaan salah satunya adalah dengan pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengungkapan dalam laporan keuangan (*disclosure of financial statement*) berarti perusahaan harus memberikan penjelasan dan informasi yang cukup dan memadai atas posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasi tersebut haruslah jelas dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian keuangan dan non keuangan yang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan para *stakeholder* perusahaan. Menurut prinsip OECD (2004) mengenai pengungkapan dan transparansi, kerangka *corporate governance* harus menjamin bahwa pengungkapan yang tepat dan akurat dibuat atas semua hal

yang material atas perusahaan, termasuk kinerja, situasi keuangan, kepemilikan, dan *corporate governance* perusahaan.

OECD (2004) mensyaratkan bahwa pengungkapan harus mencakup informasi yang material (tetapi tidak terbatas) mengenai hal-hal berikut:

1. Keuangan dan hasil operasi perusahaan.
2. Tujuan perusahaan.
3. Kepemilikan saham terbesar dan *voting right*.
4. Kebijakan remunerasi bagi anggota dewan dan eksekutif kunci, dan informasi tentang anggota dewan, termasuk kualifikasi mereka, pemilihara proses, jabatan direktur perusahaan lain dan apakah mereka dianggap sebagai independen oleh pengurus.
5. Transaksi pihak terkait.
6. Faktor risiko yang dapat diramalkan (*foreseeable risk factors*).
7. Isu mengenai karyawan dan *stakeholder* lainnya.
8. Struktur dan kebijakan *governance*, khususnya isi dari kebijakan atau *corporate governance code* dan proses dimana hal ini diterapkan.

Di Indonesia, peraturan mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK. Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009), laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini :

- 1) laporan posisi keuangan pada akhir periode
- 2) laporan laba rugi komprehensif selama periode
- 3) laporan perubahan ekuitas selama periode
- 4) laporan arus kas selama periode
- 5) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
- 6) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Praktek pengungkapan dan transparansi yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangannya dapat menjelaskan performa perusahaan dengan lebih baik. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chui dan Chi (2009) yang menunjukkan bahwa praktek transparansi dan pengungkapan yang lebih baik adalah seperangkat mekanisme *corporate governance* yang kuat yang pada akhirnya menyebabkan kinerja perusahaan yang baik. Barton *et al.* (2004) menyatakan bahwa tanpa tingkat transparansi yang lebih luas, hukum dan *governance codes* yang baru tidak akan berperan signifikan dalam membangun kepercayaan investor. Peningkatan pelaporan keuangan dan pengungkapan yang lebih luas akan membantu investor untuk lebih terlibat dalam manajemen perusahaan

Dalam pengungkapan (*disclosure*), dikenal istilah *voluntary disclosure* atau pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan yang melebihi ketentuan pengungkapan yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela menurut surat keputusan BAPEPAM-LK No. Kep-06/PM/2000, merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan, dimana perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan ini dapat mengurangi kesenjangan asimetri informasi antara perusahaan dan pasar yang memfasilitasi perdagangan sahamnya. Respon dari pasar akan kurangnya pengungkapan secara penuh juga menjadi penyebab pentingnya pengungkapan sukarela dilakukan, karena ketika investor kehilangan kepercayaan dari laporan keuangan perusahaan, maka dampak yang dialami perusahaan akan sangat buruk. Contohnya adalah kejatuhan perusahaan Enron di Amerika Serikat yang melakukan

manipulasi laporan keuangan dan tidak memberikan informasi secara lengkap di laporan keuangannya khususnya mengenai hutang yang tidak diungkapkan seluruhnya sehingga menyebabkan penurunan nilai *rating* investasi perusahaan (Godfrey, 2009: p.438).

Menurut Ho dan Wong (2001) aturan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) telah menjamin akses yang sama terhadap informasi dasar (*basic information*) perusahaan, tetapi pengungkapan informasi tersebut harus ditambah dengan pengungkapan sukarela perusahaan (*corporate voluntary disclosure*). Ada dorongan dari pasar utama (*major market*) untuk mengungkapkan informasi secara sukarela dan kebijakan manajer untuk mengubah pengungkapan sukarela sesuai dengan hubungan yang dirasakan atas biaya dan manfaat yang terlibat dengan pengungkapan tersebut. Pengungkapan sukarela dan faktor penentunya (*determinant*) telah diidentifikasi sebagai area penelitian yang penting dalam pelaporan keuangan sejak 1970-an. Eng dan Mak (2003) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela diberikan oleh manajer untuk mengurangi biaya pemantauan (*monitoring cost*) oleh pemegang saham luar (*outside shareholders*).

### **2.3 Agency Problem dan Disclosure Level**

Teori agensi (*agency theory*) menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agency*). Pada teori ini yang disebut sebagai *principal* adalah investor dan yang disebut sebagai *agency* adalah manajer. Teori agensi fokus pada hubungan dari pemilik perusahaan yang mempercayakan kepemilikan kekayaannya untuk dikelola oleh pihak lain dalam hal ini oleh *agency* atau perusahaan.

Masalah *corporate governance* timbul dari asimetri informasi dan *agency problem* antara *shareholders* dan manajemen perusahaan. *Agency Problem* merupakan sebuah konflik kepentingan yang terjadi antara manajemen perusahaan, *shareholders*, maupun kreditor yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dalam tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut dapat terjadi ketika

manajer memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, tanpa memperhatikan kekayaan investor. Pelaporan keuangan adalah salah satu cara mengurangi *agency problem*.

Jensen dan Meckling (1976) yang memperkenalkan konsep ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajer dari perusahaan menyatakan bahwa *agency problem* disebabkan antara lain oleh pembuatan keputusan aktifitas pencarian dana (*financing decision*) dan pembuatan keputusan bagaimana dana tersebut diinvestasikan. Pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan juga sangat rentan dengan *agency conflict* (konflik kepentingan). *Agency conflict* terjadi manakala manajer cenderung membuat keputusan yang menguntungkan dirinya daripada kepentingan pemegang saham. *Agency conflict* dapat menimbulkan *agency cost* (biaya agensi), yaitu berupa pemberian insentif yang layak kepada manajer serta biaya pengawasan untuk mencegah adanya *hazard*. *Agency cost* juga berarti penggunaan aliran kas untuk bonus atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu yang dilakukan manajer atas *free cash flow* (aliran kas bebas). *Agency conflict* dapat terjadi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, antara pemegang saham dengan kreditur, antara pemegang saham pengendali dan *stakeholder* lainnya, termasuk pemasok dan karyawan. Baroko (2007) menyatakan bahwa masalah utama yang terjadi dalam perusahaan adalah ketika adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham, dimana manajer memiliki keuntungan informasi sementara pemilik perusahaan menghadapi dilema moral karena mereka tidak dapat mengevaluasi dan menentukan nilai dari suatu keputusan manajemen dengan akurat. Adanya celah tersebut menguntungkan manajer untuk mengawinkan keputusan mereka dengan tujuan atau keuntungan pribadi mereka, sehingga terjadilah *agency conflict* dalam perusahaan.

Penelitian mengenai hubungan antara *agency problem* dan *disclosure level* dilakukan oleh Healy dan Palepu (2001) yang menyimpulkan pentingnya *agency problem* dan *agency cost* yang dihasilkan sebagai pembenaran pentingnya pengungkapan sukarela untuk meminimalkan biaya monitoring (*agency monitoring*

*cost*). Hal ini karena *monitoring cost* dapat mengurangi remunerasi manajer seperti gaji dan bonus, oleh karena itu manajer lebih memilih untuk meningkatkan *disclosure level* yang lebih detail untuk meminimalkan *monitoring cost* dan menjaga remunerasi mereka, intinya, manajer dievaluasi dan dikompensasi dengan informasi tambahan yang mereka sebar. Hasil yang sama ditemukan oleh Eng dan Mak (2003) yang menyatakan bahwa pengungkapan sukarela diberikan oleh manajer untuk mengurangi biaya pemantauan (*monitoring cost*) oleh pemegang saham luar (*outside shareholders*). Baroko (2007) menyatakan adanya pengungkapan lebih dari perusahaan (*voluntary disclosure*) memberikan kesempatan yang sangat baik bagi manajer, yang memiliki akses informasi yang sangat luas, untuk mengungkapkan informasi perusahaan dan membuat komunikasi yang kredibel dan reliabel kepada pasar dan pemegang saham agar optimis terhadap nilai perusahaan.

#### **2.4 Struktur Corporate Governance dan Disclosure Level**

Berkenaan dengan bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Anglo Saxon dan Kontinental Eropa. Sistem Hukum Anglo Saxon mempunyai sistem satu tingkat atau *one tier system*, negara-negara yang menganut sistem ini adalah negara Amerika Serikat dan Inggris. Semetara itu, sistem Kontinental Eropa mempunyai sistem dua tingkat atau biasa disebut *two tiers system*, dan negara-negara yang menganut sistem tersebut adalah Denmark, Jerman, Belanda dan Jepang (FCGI, 2006).

Di Indonesia, sistem dewan menganut *two tiers system* karena sistem hukum kita menganut sistem hukum Belanda, dimana terdapat pemisahan tugas antara dewan direksi (*board of director*) yang menjalankan perusahaan dan dewan komisaris (*board of commisioners*) yang mengawasi tindakan manajemen. Negara yang menganut *one tier system* menganut sistem hukum *civil law* dimana hak-hak individu sangat dihargai sehingga struktur *governance* mereka memperbolehkan jabatan CEO juga boleh merangkap sebagai ketua dewan komisaris (*CEO-Chair duality*), sehingga

istilah dewan komisaris dapat disejajarkan dengan *board of director* pada *one tier system*. Seperti yang dijelaskan dalam KNKG (2006), kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu dewan komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*).

#### **2.4.1 Dewan Komisaris**

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

##### **2.4.1.1 Independensi Dewan Komisaris**

Menurut KNKG (2006) dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang



mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Independensi dewan komisaris menjadi satu hal yang penting dalam menentukan keefektifan dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Penelitian mengenai pentingnya independensi dewan komisaris dalam hubungannya dengan performa dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan telah banyak diteliti sebelumnya. Penelitian awal yang dilakukan Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa proporsi keberadaan *independent board* yang lebih besar dibanding *outside director* dalam sebuah perusahaan akan meningkatkan efektifitas peran *board monitoring* dan akan membatasi perilaku oportunistik manajemen (*managerial opportunism*). Hal tersebut didukung oleh Chen dan Beggi (2000), dimana dengan adanya pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan oleh *independent board* terhadap *corporate boards* secara keseluruhan akan membuat *corporate boards* lebih responsif terhadap investor, dan dimasukkannya *independent board* dalam susunan *corporate boards* akan meningkatkan kepatuhan perusahaan yang kemudian akan meningkatkan kelengkapan dan kualitas pengungkapan (*disclosure quality*).

Chau dan Gray (2010) menyatakan seorang *independent board* dianggap kurang dipengaruhi oleh manajemen sehingga lebih kecil kemungkinannya bagi mereka untuk menahan penyampaian informasi perusahaan yang kurang menyenangkan (*unfavorable information*) ke pihak luar, dan dampaknya akan meningkatkan efektifitas *monitoring* terhadap perusahaan dan kualitas pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

Penelitian mengenai pengaruh independensi dewan komisaris (*board*) terhadap pengungkapan sukarela telah banyak dilakukan sebelumnya. Seperti yang

dilakukan oleh Arcay dan Vazquez (2005); Cheng dan Courtenay (2006); Hossain dan Reaz (2007).

Arcay dan Vazquez (2005) mengambil sampel 117 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Madrid, Spanyol. Kesimpulan yang didapat adalah penunjukan *independent directors on the board* dalam perusahaan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan, dan seperti yang diharapkan, *independent directors on the board* memperkuat pemantauan fungsi dari manajemen, sehingga perusahaan menjadi lebih responsif terhadap tuntutan *stakeholder* dalam penyampaian informasi.

Hasil yang sama dikemukakan oleh Cheng dan Courtenay (2006) dengan sampel penelitian perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek singapura (SGX) pada akhir tahun 2000. Hasil penelitian tersebut adalah perusahaan dengan komposisi *independent directors on the board* yang lebih besar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela dibandingkan dengan perusahaan dengan komposisi *independent directors on the board* yang seimbang atau bahkan lebih kecil. Namun demikian, hasil yang berbeda dikemukakan oleh Hossain dan Reaz (2007), dengan mengambil sampel 38 perusahaan dan bank di India. Penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa komposisi *independent board* tidak signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela. Samaha *et al.* (2011), yang mengambil sampel 100 perusahaan publik yang listing di Egyptian Stock Exchange (EGX) pada tahun 2009 mendapatkan bukti empiris bahwa tingkat pengungkapan sukarela perusahaan meningkat seiring dengan proporsi *independent board* dalam perusahaan.

#### **2.4.1.2 Aktivitas Dewan Komisaris**

Karakteristik lain yang penting untuk menentukan efektifitas dewan komisaris adalah aktivitas dari dewan komisaris berupa rapat rutin. Menurut KNKG (2006) dalam laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan, salah satu unsurnya meliputi jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, serta jumlah

kehadiran setiap anggota dewan komisaris dalam rapat. Dewan komisaris mengadakan rapat minimal 1 (satu) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan dan bisnis perusahaan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan.

*Board of director* sebagai poros utama penerapan *corporate governance* yang baik harus melakukan rapat secara rutin dan sebagai jaminan atas keadaan tertentu. Perusahaan juga harus menyediakan media komunikasi seperti telepon dan *videoconference* untuk melaksanakan rapat untuk memungkinkan Direktur lintas negara dan yang dalam perjalanan dinas ke luar perusahaan dapat menghadiri rapat. Kuesioner dapat digunakan untuk menilai apakah rapat *board of director* sudah cukup sering dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya, dan menilai apakah rapat tersebut memungkinkan cukup waktu dan kesempatan bagi *board of director* untuk berpartisipasi dalam rangka membangun resolusi atas masalah-masalah yang dihadapi perusahaan (Wallace dan Zinkin, 2005: p.294).

Menurut Zhou dan Chen (2004) aktivitas *board* yang digambarkan dengan aktivitas rapat, memiliki peran yang penting dalam *corporate governance*. Pengaruh aktivitas rapat *board of director* dalam performa perusahaan juga dilakukan oleh Coleman (2007) yang menyatakan rapat yang dilakukan *board* sangat penting untuk meningkatkan efektifitas *corporate board*. Coleman juga menyatakan bahwa ketika *board* sering bertemu, mereka akan meningkatkan kinerja perusahaan dan dengan demikian akan melakukan tugasnya sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dan, seperti pendapat para ahli sebelumnya, Adelopo (2011) menyatakan bahwa frekuensi dan durasi rapat yang dilakukan *board of director* berpengaruh positif dan signifikan dalam tingkat pengungkapan (*disclosure level*) dalam laporan keuangan perusahaan, dan kehadiran anggota mereka dalam rapat tahunan, harus dilaporkan kepada pemegang saham dalam rapat umum tahunan pemegang saham sebagai salah satu evaluasi keefektifan dewan komisaris.

### 2.4.1.3 Jumlah anggota (*Size*) Dewan Komisaris

Salah satu prinsip agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif salah satunya adalah komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). *Board of director* harus memeriksa ukuran (*size*) untuk menentukan dampak dari jumlah *board* pada efektivitasnya serta memutuskan bahwa pertimbangan mengenai *size* tersebut adalah sesuai dengan jumlah direktur perusahaan yang bersangkutan untuk memudahkan pengambilan keputusan yang efektif. Dewan komisaris (*board*) harus mempertimbangkan ruang lingkup dan sifat operasi perusahaan ketika mempertimbangkan masalah *size* tersebut (Wallace dan Zinkin, 2005: p.293).

Klein (2002) menyatakan bahwa ukuran *board of director* yang lebih besar lebih efektif dalam memonitoring manajemen karena kemampuan mereka yang lebih besar untuk melaksanakan tugasnya daripada *board of director* dengan ukuran yang lebih kecil. Oleh karena itu, perusahaan dengan ukuran *board of director* yang lebih besar harus memiliki peningkatan yang lebih kecil dalam *information asymmetry* seputar pengumuman laba perusahaan. Kanagaretnam *et al.* (2007), berpendapat bahwa ukuran *board of director* yang lebih besar memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan para ahli (*expertise*) dan *manpower* yang lebih besar untuk mengelola dan meningkatkan efektifitas perusahaan. Pendapat tersebut didukung oleh Samaha *et al.* (2012), yang menyatakan bahwa teori agensi menyarankan ukuran *board* yang besar karena dapat memainkan peranan penting dalam mengawasi *board* dan membuat keputusan yang strategis dalam perusahaan.

Penelitian mengenai *board size* dan *voluntary disclosure* dilakukan oleh Barako (2007) yang meneliti *board size* dan pengaruhnya terhadap pengungkapan sukarela. Dengan mengambil 52 perusahaan yang listing di Nairobi Stock Exchange (NSE), Barako menyimpulkan bahwa *board size* berpengaruh terhadap tingkat

pengungkapan sukarela perusahaan. *Board* yang lebih besar dianggap sebagai salah satu komponen *corporate governance* yang mempengaruhi *disclosure* dalam laporan keuangan.

#### 2.4.1.4 Kompetensi Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang memiliki peran dalam mengawasi kinerja manajemen dalam perusahaan memiliki latar belakang atau kompetensi yang beragam. Menurut KNKG (2006), anggota dewan komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Komposisi dari *board of director* harus memastikan bahwa *board of director* terdiri atas kelompok yang memiliki kompetensi inti seperti akuntansi atau keuangan, pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen atau bisnis, pengetahuan industri, pengalaman bidang perencanaan strategis, serta pengalaman pengetahuan mengenai basis pelanggan (Wallace dan Zinkin, 2005: p.293).

Penelitian mengenai kompetensi dewan komisaris dalam hubungannya dengan tingkat pengungkapan (*disclosure level*) perusahaan dilakukan oleh Guner *et al.* (2008), yang menyatakan bahwa dengan adanya kompetensi *board of director* di bidang keuangan yang mengerti standar akuntansi yang berlaku seperti GAAP, akan menyebabkan pengawasan *board of director* yang lebih baik dan karenanya akan lebih baik dalam melayani kepentingan para pemegang saham. Guner *et al.* juga menyatakan bahwa *financial experts* bagaimanapun mempengaruhi kebijakan perusahaan dibalik lebih akuratnya tingkat pengungkapan (*disclosure level*) dan lebih baiknya performa komite audit perusahaan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Jeanjean dan Stolowy (2009) yang meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan proporsi ahli keuangan (*financial experts*) dalam *board*. Jeanjean dan Stolowy menyatakan dalam perspektif efisiensi ekonomi, kebutuhan yang lebih besar bagi perusahaan adalah kualitas pelaporan keuangan yang

lebih tinggi, dan akan lebih mungkin bagi perusahaan untuk meminta *board* agar memiliki pengetahuan yang lebih tentang akuntansi dan keuangan agar dapat membuat pengungkapan (*disclosure*) dengan lebih baik.

#### **2.4.2 Komite Audit**

Seperti dewan komisaris, komite audit merupakan bagian dari pembagian tugas Dewan dalam *two board system*. Komite audit bertugas membantu tugas dewan komisaris dalam mengawasi atau memonitoring kinerja dan kebijakan dari manajemen. Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas manajemen perusahaan.

Di Indonesia, kewajiban mengenai pembentukan komite audit baru dikeluarkan pada tahun 2004 melalui Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa :

- a. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk ketua komite audit.
- b. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.

#### **2.4.2.1 Independensi Komite Audit**

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* (2003), komite audit harus independen, dimulai dengan dipersyaratkannya komisaris independen sebagai ketua komite audit. Seorang Komisaris Independen sebagai wakil dari pemegang saham minoritas dapat diharapkan untuk bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas. Anggota komite audit lainnya harus benar-benar independen terhadap perusahaan, berarti mereka tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan, dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan apapun dengan direksi dan komisaris perusahaan.

Dalam Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. SE-008/BEJ/12-2001, Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang:

- Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau pemegang saham Utama Emiten atau perusahaan public, dan
- Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau perusahaan publik.

Penelitian mengenai pentingnya independensi komite audit telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian awal oleh Beasley (1996) yang menemukan bahwa komite audit yang independen akan mengurangi potensi adanya kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan. Rupley *et al.* (2011), menyatakan syarat keefektifan komite audit yang terdapat dalam Sarbanes Oxley Act (SOX) tahun 2002 salah satunya adalah keberadaan komite audit yang independen, dimana banyak anggota komite audit yang menyatakan bebas dari area abu-abu, dimana tidak ada hubungan dengan kepentingan manajemen, auditor, ataupun dengan sesama *board*, juga tidak melaporkan keterlibatan dalam konflik kepentingan dengan *board*.

Chen dan Jaggi (2000) yang meneliti pengaruh keberadaan komite audit yang independen dengan kebijakan pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan perusahaan menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara independensi komite audit dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian tersebut menggunakan sampel 87 perusahaan besar yang listing di Hongkong dengan tahun penelitian 1993-1994. Chen dan Jaggi menyatakan independensi komite audit dapat meningkatkan aktivitas monitoring *board* yang akan berguna untuk meningkatkan transparansi perusahaan dalam laporan keuangan. Ho dan Wong (2001) menggunakan empat variabel utama dalam *corporate governance* untuk melihat hubungannya dengan pengungkapan sukarela. Salah satu atribut *corporate governance* yang digunakan adalah keberadaan komite audit. Dengan menggunakan *index disclosure* untuk menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, hasilnya adalah keberadaan komite audit secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.



Penelitian selanjutnya dilakukan Rainsbury *et al.* (2009), yang menggunakan sampel 87 perusahaan yang listing di New Zealand. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan laporan keuangan, dan efektifitas komite audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan dan berdampak pada pengungkapan sukarela perusahaan tersebut mengenai keuangan. Selanjutnya, A marra *et al.* (2011) menyatakan bahwa peningkatan keefektifan dewan komisaris (*board*) akan lebih mudah bagi komite audit yang independen untuk memonitor kebijakan akuntansi dan pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan yang diterapkan manajemen, sehubungan dengan tingkat transparansi yang di syaratkan oleh standar yang berlaku.

#### **2.4.2.2 Aktivitas Komite Audit**

Seperti halnya dewan komisaris, aktivitas komite audit yang di *proxy* kan dengan banyaknya rapat yang dilakukan, memiliki peranan yang penting dalam menentukan efektifitas komite audit sebagai salah satu perangkat *corporate governance* dalam perusahaan. Dalam Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. SE-008/BEJ/12-2001 dikatakan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, dan setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir. Melalui rapat rutin yang dilakukan komite audit, diharapkan dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab komite audit dalam mengamati proses pelaporan keuangan dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.

Karamanou dan Vafeas (2005) berpendapat bahwa komite audit yang frekuensi rapatnya tinggi, akan memiliki banyak waktu yang untuk melakukan peran *monitoring* dari laporan perusahaan dengan lebih efisien dan efektif. Agrawal dan Chadha (2005) menyatakan ada kesulitan yang mungkin dialami oleh sebagian kecil pihak luar (*outsiders*) untuk dapat mendeteksi adanya penyimpangan dalam peraturan

akuntansi dan pelaporan keuangan pada perusahaan yang besar dan kompleks, dalam hal ini, frekuensi rapat rutin yang cukup oleh komite audit dapat mencurahkan dan mempertimbangkan isu tersebut. Kesimpulan yang sama juga dikemukakan oleh Rupley *et al.* (2011) yang menemukan bahwa keefektifan komite audit dipengaruhi oleh ketekunan dari anggotanya, dan motif serta tanggung jawab mereka terhadap perusahaan. Penelitian Rupley *et al.* menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat ketekunan dan laporan yang disampaikan anggota komite audit, salah satunya frekuensi rapat tahunan yang dilakukan komite audit, dapat secara efektif *me-review* laporan keuangan perusahaan, fungsi eksternal dan internal audit.

Dengan demikian, adanya frekuensi rapat rutin tahunan yang dilakukan oleh komite audit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas manajemen perusahaan, dapat meningkatkan efektifitas komite audit dalam penerapan *corporate governance* yang baik dalam suatu perusahaan.

#### **2.4.2.3 Jumlah anggota (*Size*) Komite Audit**

Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan (KNKG 2006). Penelitian mengenai ukuran komite audit telah banyak diteliti, Kanagaretnam (2007) mengatakan bahwa perusahaan dengan jumlah komite audit yang lebih besar seharusnya lebih efektif dalam memantau manajemen dan memiliki peningkatan yang lebih kecil dalam asimetri informasi mengenai pengumuman laba perusahaan. Selanjutnya Coleman (2007) menyatakan ukuran (*size*) komite audit memiliki pengaruh yang positif dalam performa perusahaan yang berbasis pasar (*market based performance*) dan kepemilikan saham perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Hermawan (2009) yang berpendapat jumlah komite audit yang terlalu sedikit dapat mengurangi efektifitas fungsi komite audit karena tidak dilakukan pembagian tugas yang cukup baik dan beban kerja yang terlalu berat bagi masing-masing anggota komite audit. Hermawan juga mengatakan jumlah yang terlalu banyak juga dapat mengurangi efektifitas

komite audit karena proses kerja yang tidak optimal karena terlalu banyak pendapat, adanya *free rider*, dan sebagainya.

Meskipun hasil penelitian mendapatkan kesimpulan yang berbeda, bagaimanapun, ukuran atau jumlah anggota komite audit dalam perusahaan memiliki peran yang penting dalam menentukan efektifitas komite audit dalam rangka pemenuhan tugasnya yang berkaitan dengan sistem pelaporan akuntansi dan kebijakan pengungkapan (*disclosure*) yang dilakukan perusahaan.

#### **2.4.2.4 Kompetensi Komite Audit**

Unsur lain yang dapat mempengaruhi keefektifan komite audit adalah kompetensi atau latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki komite audit. Di Indonesia, BEI dan Bapepam-LK telah menetapkan peraturan bahwa minimal ada satu orang anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari adanya komite audit, yaitu sebagai berikut (Wallace dan Zinkin, 2005: 209):

1. untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan.
2. untuk meyakinkan bahwa *board* telah membuat keputusan yang tepat mengenai kebijakan akuntansi, praktik, dan pengungkapan.
3. untuk meninjau lingkup dan hasil dari internal dan eksternal audit.
4. untuk mengamati proses pelaporan keuangan.

Penelitian mengenai kompetensi yang dimiliki komite audit telah banyak dilakukan sebelumnya, di antaranya oleh Guner *et al.* (2008) yang menyatakan keberadaan *financial expert* dalam komite audit dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dibalik lebih akurat dan transparansinya pengungkapan (*disclosure level*) dalam laporan keuangan, dan tentu saja mempengaruhi keefektifan kinerja komite audit. Selanjutnya dikatakan oleh Jeanjean dan Stolowy (2009) bahwa salah satu tugas dan fungsi dari komite audit adalah *me-review* kualitas dari informasi keuangan perusahaan yang akan dirilis perusahaan, dimana untuk itu, dibutuhkan *financial expert* dalam bagian komite audit. Jeanjean dan Stolowy kemudian menggunakan

faktor latar belakang pendidikan manajemen dan pengalaman di bidang keuangan untuk menentukan *financial expertise* dalam perusahaan. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah faktanya perusahaan membutuhkan komite audit dengan latar belakang pendidikan manajemen dan pengalaman di bidang keuangan, karena adanya kebutuhan yang mendesak dari akuntansi dan sistem pelaporannya yang akan berdampak pada kepercayaan investor, namun keahlian dalam keuangan bukan merupakan satu-satunya keahlian yang dibutuhkan dalam komite audit, keahlian dalam bidang teknik, *marketing*, *interpersonal*, strategi, dan keahlian lainnya juga dibutuhkan dalam suatu komite audit. Tidak sampai disitu, penelitian terbaru mengenai kompetensi komite audit dilakukan oleh Li *et al.* (2012) yang menyatakan anggota komite audit setidaknya ada satu orang anggotanya yang memiliki kemampuan di bidang keuangan akan membantu komite audit untuk mengerti *auditor judgment* dan membedakan substansi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal.

Berdasarkan paparan di atas, dengan melihat tugas komite audit yang sebagian besar tugasnya berkaitan dengan laporan keuangan maka sangat penting untuk memiliki anggota yang memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan, dan dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh komite audit berhubungan erat dengan tingkat efektifitas komite audit dalam meningkatkan *corporate governance* dan *disclosure level* perusahaan.

## **2.5 Kompleksitas Perusahaan (*Complexity*) dan *Disclosure Level***

Semakin besar perusahaan, maka kecenderungan untuk memperluas usaha dan kegiatan operasinya akan semakin besar. Kompleksitas perusahaan dapat diartikan dengan banyak faktor, seperti jumlah anak perusahaan yang dimiliki, jumlah *department* atau divisi yang dimiliki, jenis usaha yang dikelola, maupun variasi dari jenis barang dan jasa yang diproduksi. Bagi perusahaan publik yang sahamnya terdaftar di BEI, kompleksitas perusahaannya akan jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik.

Knechel *et al.* (2005) menggunakan beberapa pengukuran dalam menentukan kompleksitas perusahaan yang terdiri dari tingkat gaji, rasio persediaan dan piutang terhadap total aset, ukuran perusahaan serta variabel *dummy* dengan memberi nilai 1 untuk kategori induk perusahaan, anak perusahaan maupun *jointly controlled company* dan nilai 0 untuk kategori lainnya. Menurut Cunha dan Rego (2010) kompleksitas organisasi telah didefinisikan dalam banyak cara yang berbeda, yaitu dari jumlah tingkat hirarkis (*hierarchical levels*), jumlah departemen atau jumlah karyawan dengan akibat sistemik yang timbul dari sifat struktural tersebut. Dengan kata lain, kompleksitas menunjukkan atribut sistemik, dan karena itu sangat penting untuk memahami organisasi secara keseluruhan, dimana setiap bagian dari organisasi saling berhubungan satu sama lain. Pertumbuhan dalam ukuran dan kompleksitas membutuhkan koordinasi lebih lanjut. Cunha dan Rego juga menyatakan bahwa perusahaan yang menghadapi kompleksitas lingkungan yang tinggi biasanya akan melakukan *outsourcing* dalam kegiatan non-inti dan lebih berkonsentrasi kepada sumber daya (material, keuangan dan perhatian) mereka atau pada kegiatan yang paling penting.

Penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Reaz (2007) melaporkan bukti empiris mengenai tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh 38 perusahaan dan bank di India. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), dimana bank di India mengungkapkan cukup banyak informasi sukarela. Hasil penelitian ini adalah kompleksitas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela.

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Hossain dan Hammami (2009) yang menguji secara empiris faktor-faktor yang menentukan (*determinant*) pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan dengan sampel 25 perusahaan yang listing di Doha Securities Market (DSM) di tahun 2007. Salah satu variabel yang digunakan adalah jumlah anak perusahaan yang dimiliki (*complexity*).

Kompleksitas perusahaan juga dianggap mendorong perusahaan untuk dapat memiliki sistem informasi manajemen yang efektif untuk tujuan pengawasan. Hasil penelitian ini adalah jumlah anak perusahaan yang dimiliki yang menjadi *proxy* dalam menggambarkan kompleksitas perusahaan (*complexity*) signifikan dan positif dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela.

## **2.6 *Assets in Place dan Disclosure Level***

Karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) merupakan pengalokasian jumlah aset tetap dari total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan. Jeanjean dan Stolowy (2009) menyatakan *assets in place* dinyatakan secara independen sebagai kesempatan investasi masa depan perusahaan dan pilihan pertumbuhan yang dinyatakan dengan keputusan investasi masa depan perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Omar dan Simon (2011) dikatakan bahwa karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan nilai perusahaan (*firm value*). Omar dan Simon juga menyatakan bahwa berdasarkan teori agensi (*agency theory*), perusahaan dengan proporsi kepemilikan *assets in place* yang besar memiliki peluang yang lebih kecil untuk mentransfer kekayaan dari kreditur (*debtholders*) kepada pemegang saham (*shareholders*). Karakteristik aset perusahaan dapat mengakibatkan hubungan yang berbanding terbalik antara tingkat pengungkapan (*dislosure level*) dengan proporsi *assets in places* perusahaan. Hubungan terbalik tersebut disebabkan karena adanya perjanjian yang dibuat oleh kreditur (*debtholders*) yang menyatakan bahwa aset perusahaan yang berada di bawah perjanjian hutang tersebut dibatasi penggunaannya untuk digunakan oleh perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik aset perusahaan (*assetss in place*) terhadap pengungkapan sukarela dilakukan oleh Hossain dan Reaz (2007) yang melaporkan bukti empiris mengenai tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh 38 perusahaan dan bank di India. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris menunjukkan bahwa karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) berpengaruh

positif dan signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hossain dan Hammami (2009) yang menguji secara empiris faktor-faktor yang menentukan (*determinant*) pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan dengan sampel 25 perusahaan yang listing di Doha Securities Market (DSM) di tahun 2007. Hasil penelitian tersebut adalah karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) berpengaruh positif dan signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini karena perusahaan dengan persentase yang lebih tinggi dari aset berwujud memiliki biaya agensi yang lebih rendah karena lebih sulit bagi manajer untuk menyalahgunakan definisi yang baik dari *assets in place* daripada untuk mengambil nilai dari peluang pertumbuhan yang tidak pasti.

## **2.7 Faktor-faktor Lain yang Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Sukarela**

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan dalam mengungkapkan laporan keuangannya secara sukarela. Selain dari tingkat efektifitas dewan komisaris, tingkat efektifitas komite audit, kompleksitas perusahaan, karakteristik aset perusahaan (*assets in place*), dan *agency problem*, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan sukarela laporan keuangan perusahaan.

### **2.7.1 Profitabilitas Perusahaan (*Profitability*)**

Banyak penelitian yang menggunakan variabel profitabilitas sebagai salah satu karakteristik perusahaan dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela. Profitabilitas dinilai sebagai unsur penting yang sangat berpengaruh dalam keputusan manajemen dalam pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2002); Nasir dan Abdullah (2005); Clemente dan Labat (2009); Rouf dan Al Harun (2011).

Haniffa dan Cooke (2000) menggunakan profitabilitas sebagai variabel kontrol dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Dengan

*Return on Equity* (ROE) sebagai *proxy* dari profitabilitas, dengan mengambil sampel 167 perusahaan pada tahun 1994 yang listing di Malaysia, hasil yang didapat adalah membuktikan bahwa profitabilitas mempengaruhi pengungkapan sukarela secara signifikan. Hal tersebut didukung oleh Nasir dan Abdullah (2005) yang menggunakan profitabilitas sebagai variabel control dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, dengan sampel 84 perusahaan yang listing di Malaysia, menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu profitabilitas mempengaruhi pengungkapan sukarela secara positif dan signifikan.

Selanjutnya Clemente dan Labat (2009) juga menggunakan profitabilitas sebagai variabel kontrol untuk menjelaskan pengungkapan sukarela perusahaan, sampel yang diambil adalah 62 perusahaan yang listing di Madrid Stock Exchange pada tahun 2005. Hasil yang serupa juga ditemukan dalam penelitian tersebut, dimana profitabilitas mempengaruhi pengungkapan sukarela perusahaan secara positif dan signifikan dan memiliki peranan penting dalam kebijakan manajemen terkait transparansi dan pengungkapan.

Senada dengan Haniffa dan Cooke (2002); Nasir dan Abdullah (2005); Clemente dan Labat (2009), penelitian yang dilakukan Rouf dan Al Harun (2011) menggunakan profitabilitas sebagai variabel kontrol dalam menentukan pengungkapan sukarela, dengan sampel 94 perusahaan publik yang ada di Bangladesh, hasilnya juga konsisten dengan penelitian sebelumnya bahwa profitabilitas mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan.

### **2.7.2 Ukuran Perusahaan (*Size*)**

Ukuran perusahaan diidentifikasi sebagai variabel penjelas yang signifikan dalam menjelaskan variasi dalam tingkat pengungkapan sukarela dalam penelitian sebelumnya. Beberapa penjelasan teoritis yang mengaharapkan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dan tingkat sukarela pengungkapan telah banyak tersedia. Teori Agensi (Jensen & Meckling, 1976) menunjukkan bahwa biaya agensi



berhubungan dengan pemisahan manajemen dari kepemilikan, yang kemungkinan lebih besar terdapat pada perusahaan yang lebih besar.

Luo *et al.* (2006) menggunakan ukuran perusahaan (*size*) sebagai variabel kontrol dalam menjelaskan faktor determinan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Sampel yang diambil adalah perusahaan yang listing di Singapore (SGX) dari tahun 1994-2000. Kesimpulan yang didapat adalah perusahaan dengan ukuran yang lebih besar mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Selanjutnya Baroko (2007), menggunakan *size* sebagai salah satu variabel independen dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela. Sampel yang diambil 54 perusahaan pada Nairobi Stock Exchange (NSE), menyimpulkan *size* sebagai salah satu karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan dalam menjelaskan peningkatan pengungkapan sukarela perusahaan.

### **2.7.3 Umur Perusahaan (*Age*)**

Tingkat pengungkapan perusahaan dapat dipengaruhi oleh umurnya, dengan umur perusahaan sebagai *proxy*-nya. Matoussi dan Chakroun (2007) menggunakan umur perusahaan dengan *proxy* umur perusahaan sejak listing di Bursa sebagai variabel kontrol dalam menjelaskan pengungkapan sukarela perusahaan. Dengan sampel perusahaan yang listing di Tunisia pada tahun 2003-2005. Hasil yang didapat adalah umur perusahaan mempengaruhi secara positif dan signifikan dalam tingkat keluasan pengungkapan sukarela perusahaan.

Selanjutnya, Hossain dan Hammami (2009) menyimpulkan tiga alasan mengapa umur perusahaan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela. Pertama, perusahaan yang lebih muda mungkin menderita kerugian kompetitif jika mereka mengungkapkan item tertentu seperti informasi penelitian pengeluaran, belanja modal, dan pengembangan produk. Faktor kedua adalah biaya dan kemudahan pengumpulan, pengolahan, dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan. Biaya ini kemungkinan akan lebih berat bagi perusahaan yang lebih muda daripada mereka yang lebih tua. Faktor ketiga dan terakhir adalah

situasi perusahaan yang lebih muda mungkin tidak memiliki '*track record*' untuk mengandalkan pengungkapan publik dan karena itu mungkin memiliki informasi lebih sedikit untuk mengungkapkan atau kurang kaya pengungkapan. Hossain dan Hammami menemukan bukti empiris bahwa umur perusahaan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

#### **2.7.4 Kualitas Audit**

Ekspektasi teoritis mengenai hubungan antara tipe auditor dan pengungkapan datang dari fakta bahwa auditor memberikan sertifikasi untuk kebenaran dan keadilan dari beberapa informasi dalam laporan keuangan tahunan. Juga dari latar belakang *agency theory* bahwa sertifikasi oleh auditor mengurangi biaya agensi karena meningkatkan persepsi dari kredibilitas informasi dalam laporan tahunan. Kreditur dan *stakeholder* lainnya membuat keputusan ekonomi yang signifikan dari kekuatan sertifikasi tersebut. Umumnya, ada persepsi bahwa KAP *Big 4* menandakan pelaporan yang lebih berkualitas dan lebih menaruh perhatian tentang reputasi mereka dan bahwa mereka memilih sendiri klien mereka. Ini memberi mereka posisi tawar untuk menuntut meningkatkan keterbukaan dari klien mereka (Adelopo, 2011).

Adelopo (2011) memasukkan kualitas KAP yang mengaudit sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. Hasilnya adalah KAP yang mengaudit (*Big 4* atau tidak) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. yaitu sebesar 10%.

#### **2.8 Kerangka Konseptual**

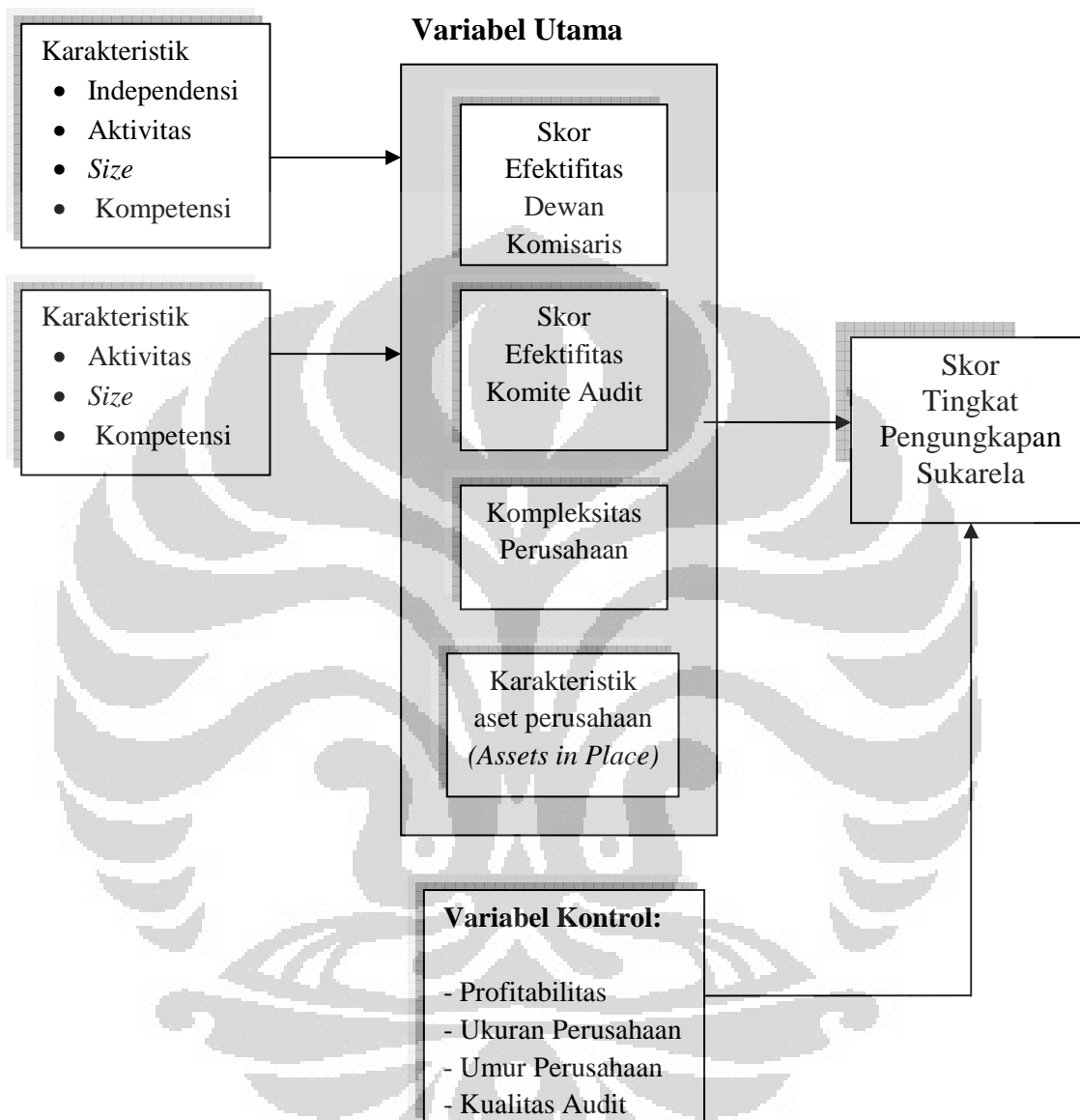
Pengungkapan sukarela, selain dari pengungkapan wajib yang telah diwajibkan oleh regulator, merupakan kebijakan perusahaan yang penting terutama bagi perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat (*go public*). Manajemen sebagai agen yang mengelola kekayaan para investor diwajibkan melaporkan hasil pengelolaan kekayaan tersebut dalam laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi investor.

Meskipun tidak terdapat peraturan dan ketentuan yang baku, pengungkapan ini dapat mengurangi kesenjangan asimetri informasi antara perusahaan dan pasar yang memfasilitasi perdagangan sahamnya, serta memiliki peranan yang sangat penting dalam hubungannya investor, regulator, dan pengguna laporan keuangan pada umumnya. Kebijakan tersebut mencerminkan kepatuhan pada prinsip transparansi manajemen tentang kondisi keseluruhan perusahaan dalam laporan keuangan.

*Corporate governance* saat ini menjadi hal yang sangat penting dan diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh perusahaan. Keberadaan unsur-unsur penting dari *corporate governance* di Indonesia seperti dewan komisaris dan komite audit seakan menjadi pemanjangan tangan para investor dalam memantau kinerja manajemen dan melindungi berbagai kepentingan mereka. Fungsi dari keduanya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen dalam mengelola perusahaan dan melindungi berbagai kepentingan dari para *stakeholder* perusahaan. Untuk itulah, keberadaan dari keduanya tidaklah cukup untuk menjamin proses penerapan *corporate governance* yang baik, diperlukan adanya penilaian dari efektifitas peran keduanya yang dapat dinilai dari independensi, aktivitas, akukuran (*size*), dan kompetensi.

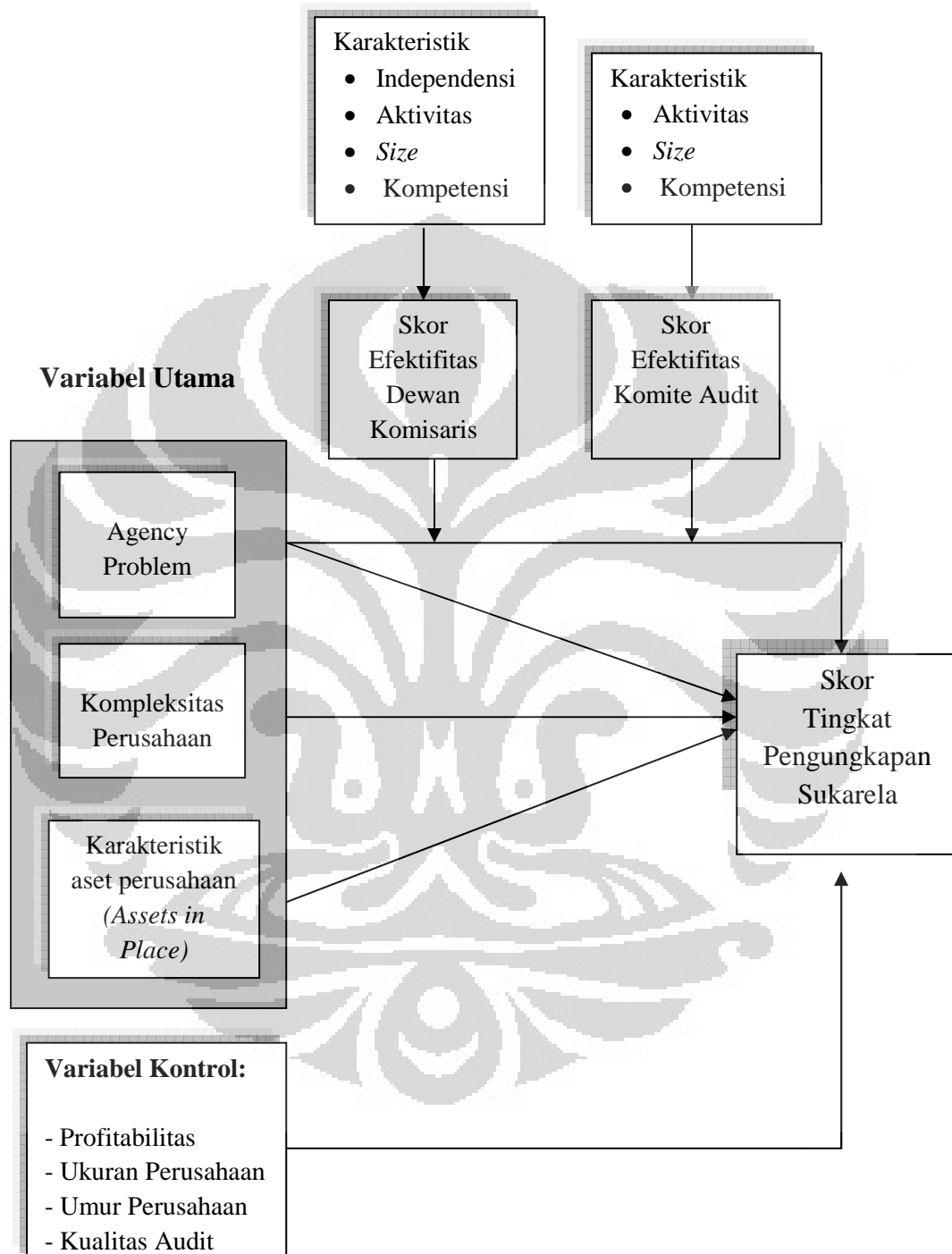
Selain dari unsur *corporate governance* di atas, kompleksitas perusahaan, karakteristik aset perusahaan (*assets in places*) juga dapat mempengaruhi kebijakan manajemen dalam transparansi dan kebijakan pengungkapan sukarela yang akan dirilis. Semakin kompleks perusahaan maka kemungkinan perluasan pengungkapannya akan semakin besar, begitu pula dengan *assets in place* yang merupakan gambaran investasi perusahaan di masa yang akan datang.

Kerangka konseptual dapat di gambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 1**

Kerangka konseptual selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 2**

Selanjutnya, selain karakteristik perusahaan seperti kompleksitas perusahaan dan karakteristik aset perusahaan (*assets in place*), terdapat dugaan adanya pengaruh *Agency problem* terhadap tingkat pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure level*) dalam laporan keuangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, *agency problem* dan *agency cost* yang dihasilkan sebagai pembenaran pentingnya pengungkapan sukarela untuk meminimalkan biaya monitoring (*agency monitoring cost*), dan bahwa manajer cenderung meningkatkan kebijakan *voluntary disclosure* perusahaan agar dapat meminimalkan *monitoring cost*, dengan tujuan remunerasi mereka terjaga dan tidak berkurang. Dengan kata lain, hubungan antara *agency problem* dan *voluntary disclosure* adalah negatif atau berbanding terbalik, dimana jika dalam suatu perusahaan, *agency problem* yang terjadi adalah tinggi, maka kebijakan manajemen akan pengungkapan sukarela adalah rendah, dan sebaliknya.

Ketika membicarakan *agency problem* dalam perusahaan, terdapat unsur *corporate governance* yang tidak dapat dipisahkan yang dapat mempengaruhi *agency problem* tersebut. Penerapan *corporate governance* yang baik diharapkan dapat meminimalisir adanya *agency problem* dalam perusahaan. Penerapan *corporate governance* tersebut diharapkan dapat tercipta dari efektifnya fungsi dari pengawasan dewan komisaris dan komite audit. Oleh karena itu, dalam model ini, akan dilihat hubungan antara *agency problem* dalam *voluntary disclosure* yang telah dipengaruhi unsur *corporate governance* yaitu efektifitas dewan komisaris dan komite audit

## 2.9 Pengembangan Hipotesis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor determinan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, yang dilihat dari karakteristik *corporate governance* yaitu efektifitas dewan komisaris dan komite audit, serta karakteristik perusahaan seperti kompleksitas perusahaan (*complexity*), penempatan aset perusahaan (*assets in place*), dan *agency problem* yang terdapat dalam perusahaan.

Literatur dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mengambil dewan komisaris sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela, menggunakan keberadaan dewan komisaris yang independen (*existence of independent board*) sebagai variabel bebasnya. Arcay dan Vazquez (2005) menemukan bukti empiris penunjukan dewan komisaris yang independen memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Selanjutnya Cheng dan Courtenay (2006) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela dibandingkan dengan perusahaan dengan komposisi dewan komisaris yang seimbang. Kemudian Hossain dan Reaz (2007) mendapatkan bukti empiris bahwa komposisi dewan komisaris yang independen tidak signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Hermawan (2009) yang menggunakan skor efektifitas dewan komisaris untuk melihat pengaruhnya terhadap kandungan informasi laba perusahaan. Pengukuran efektifitas dewan komisaris dengan menggunakan *scoring* dianggap dapat mengukur tingkat efektifitas peran dan kekuatan dewan komisaris lebih baik dibandingkan dengan pengukuran masing-masing karakteristik secara individual.

Meskipun belum banyak penelitian yang menggunakan tingkat efektifitas dewan komisaris dalam suatu perusahaan, penelitian ini mengambil hipotesis bahwa tingkat efektifitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

**H1a: Skor efektifitas dewan komisaris berpengaruh positif terhadap skor pengungkapan sukarela perusahaan**

Chen dan Jaggi (2000) yang meneliti pengaruh keberadaan komite audit yang independen dengan kebijakan pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan perusahaan menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara

independensi komite audit dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Chen dan Jaggi menyatakan independensi komite audit dapat meningkatkan aktivitas monitoring *board* yang akan berguna untuk meningkatkan transparansi perusahaan dalam laporan keuangan. Ho dan Wong (2001) menggunakan keberadaan komite audit untuk melihat hubungannya dengan pengungkapan sukarela perusahaan. Dengan menggunakan *index disclosure* untuk menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, hasilnya adalah keberadaan komite audit secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

Penelitian selanjutnya dilakukan Rainsbury *et al.* (2009) menyimpulkan tingkat efektifitas komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan laporan keuangan, dan efektifitas komite audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan dan berdampak pada pengungkapan sukarela perusahaan tersebut mengenai keuangan. Penelitian serupa dilakukan pula oleh Hermawan (2009) yang menggunakan skor efektifitas komite audit dalam menilai pengaruhnya terhadap kualitas laba perusahaan, dan seperti halnya dewan komisaris, Hermawan berpendapat bahwa pengukuran efektifitas komite audit dengan menggunakan *scoring* dianggap dapat mengukur tingkat efektifitas peran dan kekuatan dewan komisaris lebih baik dibandingkan dengan pengukuran masing-masing karakteristik secara individual.

Seperti halnya dewan komisaris, meskipun belum banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh efektifitas komite audit terhadap tingkat pengungkapan sukarela, penelitian ini mengambil hipotesis bahwa tingkat efektifitas komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

**H2a: Skor efektifitas komite audit berpengaruh positif terhadap skor pengungkapan sukarela perusahaan**



Penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Reaz (2007) melaporkan bukti empiris bahwa kompleksitas perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Hossain dan Hammami (2009) yang menggunakan penelitian Hannifa dan Cooke (2002) sebagai dasar pengambilan variabel ini karena struktur dan kompleksitas perusahaan mungkin signifikan dalam menjelaskan variabilitas luas pengungkapan sukarela perusahaan. Kompleksitas perusahaan juga dianggap mendorong perusahaan untuk dapat memiliki sistem informasi manajemen yang efektif untuk tujuan pengawasan. Hasil penelitian ini adalah jumlah anak perusahaan yang dimiliki yang menjadi *proxy* dalam menggambarkan kompleksitas perusahaan (*complexity*) signifikan dan positif dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela.

Meskipun bukti yang ditemukan berbeda, penelitian ini mengambil variabel kompleksitas perusahaan dengan jumlah anak perusahaan yang dimiliki sebagai *proxynya*. Hipotesis yang dikembangkan adalah kompleksitas perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela.

**H3a: Jumlah anak perusahaan (*complexity*) berpengaruh positif terhadap skor pengungkapan sukarela perusahaan**

Penelitian yang dilakukan oleh Hossain dan Reaz (2007) melaporkan bukti empiris bahwa karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hossain dan Hammami (2009) yang menghasilkan karakteristik aset (*aset in place*) signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela. Ho dan Wong (2001) memasukkan variabel karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) sebagai variabel kontrol dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela.

Dengan menggunakan perhitungan *fixed assets/total assets* sebagai *proxynya*, penelitian ini mengambil hipotesis bahwa karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

**H4a: Karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) berpengaruh positif terhadap skor pengungkapan sukarela perusahaan.**

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Eng dan Mak (2003) yang menyatakan bahwa pengungkapan sukarela diberikan oleh manajer untuk mengurangi biaya pemantauan (*monitoring cost*) oleh pemegang saham luar (*outside shareholders*). Jensen (1986) mengusulkan *agency cost* dalam *agency problem* tinggi ketika *free cash flow* dikombinasikan dengan peluang pertumbuhan yang rendah. Jensen berpendapat pentingnya penggunaan *free cash flow* untuk mengukur *agency problem* adalah karena dengan menyimpan *free cash flow* akan mengurangi kemampuan pasar modal untuk memantau keputusan manajemen. Oleh karena itu, tingginya *free cash flow* dalam perusahaan menunjukkan peran kebijakan manajer yang lebih besar dan *agency cost* yang lebih tinggi daripada peran pemegang saham. McKnight dan Weir (2009) menggunakan *free cash flow* untuk mengukur *agency problem* karena beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi memiliki potensi yang besar untuk dikelola dengan baik, mereka juga cenderung memiliki *free cash flow*, karena kelebihan kas yang tersedia dalam perusahaan akan digunakan untuk proyek yang memiliki *net present value* yang positif daripada untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham.

Meskipun *proxy* dari *agency problem* yang digunakan berbeda-beda, penelitian ini mengambil *free cashflow from operation* dalam laporan arus kas perusahaan sebagai *proxynya*. Penelitian ini mengambil hipotesis bahwa terdapat hubungan yang negatif antara *free cashflow from operation* yang dimiliki perusahaan terhadap skor tingkat pengungkapan sukarela.

**H5a: Besarnya *free cashflow from operation* berpengaruh negatif terhadap skor pengungkapan sukarela perusahaan**

Menurut Clemente dan Labat (2009), dampak dari penerapan *corporate governance* yang digambarkan dengan keberadaan *independent Director*, sebagai salah satu mekanisme *internal control* yang paling penting dalam *agency problem*, dapat mengurangi efek dari *agency relationship* yaitu asimetri informasi, yang dapat dikurangi dengan adanya pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Clemente dan Labat menggambarkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara *independent director* dan *voluntary disclosure*. Hasil penelitian Clemente dan Labat pada 62 perusahaan yang *listing* di Spanyol tahun 2005 menegaskan peran *independent Director*, sebagai mekanisme kontrol dari *agency relationship* antara manajer dan *shareholders*, dapat meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Dalam penelitian selanjutnya, Omar dan Simon (2011) menyatakan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara *agency problem* yang menghasilkan *monitoring cost*, dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Hal tersebut dikarenakan manajer cenderung meminimalkan *monitoring cost* dengan meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba mendapatkan bukti empiris apakah praktek *corporate governance* perusahaan yang di tentukan dengan efektifitas dewan komisaris dapat meminimalkan pengaruh *agency problem* terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

**H6a: Skor efektifitas dewan komisaris yang tinggi akan memperkecil pengaruh *agency problem* terhadap skor pengungkapan sukarela perusahaan.**

Rainsbury *et al.* (2009) menyimpulkan tingkat efektifitas komite audit memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan laporan keuangan, dan efektifitas komite audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam

peningkatan kualitas laporan keuangan perusahaan dan berdampak pada pengungkapan sukarela perusahaan tersebut mengenai keuangan

Samaha *et al.* (2012), menyatakan bahwa komite audit merupakan mekanisme kontrol yang dibentuk secara sukarela dalam situasi dimana adanya *agency cost* yang tinggi untuk meningkatkan kualitas arus informasi antara prinsipal dan agen. Dalam *agency theory* keberadaan komite audit dinilai dapat meminimalkan *agency cost* dalam *agency problem* dengan meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil penelitian tersebut menemukan bukti bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba mengembangkan dan menghubungkan dampak yang terjadi dari adanya efektifitas komite audit dalam meminimalisir adanya *agency problem* dalam perusahaan, yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

**H7a: Skor efektifitas komite audit yang tinggi akan memperkecil pengaruh *agency problem* terhadap skor pengungkapan sukarela perusahaan.**

## BAB 3 METODE PENELITIAN

### 3.1 Model Penelitian

Model penelitian merupakan hal yang penting dalam menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini, akan digunakan tiga model yang berbeda. Model dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Untuk menguji hipotesis 1 sampai 4, digunakan persamaan seperti model 1 berikut:

$$DISCSORE_{it} = \beta_0 + \beta_1 BOARDSCORE_{it} + \beta_2 AUDCOMSCORE_{it} + \beta_3 COMPLEXITY_{it} + \beta_4 ASSET_{it} + \beta_5 PROFITABILITY_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 AGE_{it} + \beta_8 AUDIT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Untuk menguji hipotesis 5 digunakan persamaan seperti model 2 berikut:

$$DISCSORE_{it} = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_{it} + \beta_2 COMPLEXITY_{it} + \beta_3 ASSET_{it} + \beta_4 PROFITABILITY_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_6 AGE_{it} + \beta_7 AUDIT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Untuk menguji hipotesis 6 dan 7, digunakan persamaan seperti model 2 berikut:

$$DISCSORE_{it} = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_{it} + \beta_2 BOARDSCORE_{it} + \beta_3 AUDCOMSCORE_{it} + \beta_4 AGENCY_{it} \times BOARDSCORE_{it} + \beta_5 AGENCY_{it} \times AUDCOMSCORE_{it} + \beta_6 PROFITABILITY_{it} + \beta_7 SIZE_{it} + \beta_8 AGE_{it} + \beta_9 AUDIT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

$DISCSORE_{it}$  = Skor tingkat pengungkapan sukarela perusahaan i pada tahun t

$BOARDSCORE_{it}$  = Skor efektifitas dewan komisaris perusahaan i pada tahun t

$AUDCOMSCORE_{it}$  = Skor efektifitas komite audit perusahaan i pada tahun t

$COMPLEXITY_{it}$  = Jumlah anak perusahaan yang dimiliki sampel perusahaan i pada tahun t

ASSET <sub>it</sub>	= <i>Assets in Place</i> (Karakteristik aset perusahaan) yaitu Fixed asset/Total asset i pada akhir tahun t
AGENCY <sub>it</sub>	= <i>Agency Problem</i> yaitu <i>free cash flow from operation</i> perusahaan i pada tahun t
PROFITABILITY <sub>it</sub>	= <i>Return on Equity</i> perusahaan i pada tahun t
SIZE <sub>it</sub>	= Ukuran perusahaan i pada tahun t
AGE <sub>it</sub>	= Umur perusahaan i sejak listing di BEI sampai dengan akhir tahun t
AUDIT <sub>it</sub>	= Variabel dummy dimana bernilai 1 jika perusahaan i pada tahun t diaudit oleh KAP Big4 dan 0 apabila perusahaan i pada tahun t tidak diaudit oleh KAP Big4.

### 3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

#### 3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dari penelitian ini adalah skor pengungkapan sukarela. Untuk mendapatkan nilai dari variabel dependen tersebut digunakan suatu sistem penilaian dengan skor (*scoring*). Terdapat berbagai metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pengungkapan sukarela, dalam penelitian ini digunakan metode yang dikembangkan oleh Chau dan Gray (2010) dengan penyesuaian dengan peraturan BAPEPAM-LK. Total pertanyaan awal menurut Chau dan Gray (2010) adalah 85 *item*, dan setelah disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM-LK nomor VIII.G.7 tahun 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, terdapat 25 pertanyaan yang sudah dikategorikan wajib di Indonesia, sehingga total pertanyaan ceklis yang dipakai dalam penelitian ini adalah 60.

Untuk menghitung pengungkapan sukarela masing-masing sampel, ditentukan rasio dari total pengungkapan sukarela yang ada, dibagi dengan total pengungkapan sukarela maksimum yang dapat dicapai perusahaan. Skor diberi nilai 1 jika *item* informasi pengungkapan dibuat berdasarkan metode pengungkapan sukarela yang telah ditentukan, dan diberi nilai 0 jika *item* pengungkapan informasi tidak dibuat. Skor pengungkapan sukarela dikategorikan

ke dalam tiga bagian yaitu, *strategic, non-financial and financial*. Daftar skor tingkat pengungkapan sukarela terdapat dalam lampiran 1.

### 3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan di dalam dua model penelitian ini adalah skor efektifitas dewan komisaris, skor efektifitas komite audit, kompleksitas perusahaan, karakteristik aset perusahaan (*assets in place*), dan *agency problem*.

#### 3.2.2.1 Skor Efektifitas Dewan Komisaris

Variabel independen dalam model 1 penelitian ini adalah skor efektifitas dewan komisaris. Skor efektifitas dewan komisaris dihitung berdasarkan nilai yang diperoleh dari daftar pertanyaan (*checklist*) yang disusun berdasarkan karakteristik dewan komisaris yang mencakup: independensi, aktivitas, *size*, serta kompetensi dewan komisaris. *Checklist* tersebut disusun oleh Hermawan (2009) yang digunakan dalam penelitiannya untuk menghitung skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit tahun 2006 dan 2007. *Checklist* yang sama digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung skor dewan komisaris tahun 2009 yang diperoleh dari Laporan *Corporate Governance* dalam laporan tahunan. *Checklist* tersebut diambil dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) untuk perhitungan skor tahun 2005, yang kemudian dimodifikasi oleh Hermawan (2009) untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan penelitiannya. Seluruh sampel dihitung nilai skornya, termasuk yang tidak memenuhi kriteria. Untuk setiap pertanyaan, penilaian akan terdiri dari tiga kemungkinan, yaitu *Good, Fair*, dan *Poor*, atau dua kemungkinan *Good* dan *Poor*. *Checklist* lengkap seperti yang telah ditetapkan oleh Hermawan (2009), dapat dilihat pada Lampiran 2. Untuk menguji kehandalan dari pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam *checklist*, dilakukan pengujian *cronbach alpha* atas hasil yang diperoleh.

#### 3.2.2.2 Skor Efektifitas Komite Audit

Variabel independen selanjutnya dalam model 2 penelitian ini adalah skor efektifitas komite audit. Seperti halnya penilaian pada Skor efektifitas dewan

komisaris, untuk menghitung nilai dari skor efektifitas komite audit, digunakan metode *Checklist* yang disusun oleh Hermawan (2009) dan dihitung berdasarkan nilai yang diperoleh dari daftar pertanyaan (*checklist*) yang disusun berdasarkan karakteristik yang mencakup: aktivitas, *size*, serta kompetensi komite audit. Seluruh sampel dihitung nilai skornya, termasuk yang tidak ada datanya. *Checklist* lengkap seperti yang telah ditetapkan oleh Hermawan (2009), dapat dilihat pada Lampiran 3. Metode penilaian yang digunakan adalah sama dengan metode penilaian untuk dewan komisaris yang dijelaskan sebelumnya.

### 3.2.2.3 Kompleksitas Perusahaan

Variabel ini menggunakan *proxy* jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan (*number of subsidiaries*). Penelitian yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2002) menggunakan variabel kompleksitas perusahaan dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, dimana untuk mengukur kompleksitas perusahaan digunakan *actual number of subsidiaries* (jumlah anak perusahaan aktual yang dimiliki) sebagai *proxynya*. Shammari (2008) yang menggunakan variabel yang sama untuk mengetahui faktor determinan tingkat pengungkapan sukarela, menggunakan *number of subsidiaries* untuk mengukur kompleksitas perusahaan. Hal serupa dilakukan oleh Hossain dan Hammami (2009) yang menggunakan kompleksitas perusahaan sebagai faktor determinan tingkat pengungkapan sukarela, yang mengukur kompleksitas perusahaan dengan *number of subsidiaries* (jumlah anak perusahaan yang dimiliki). Dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan *proxy number of subsidiaries* (jumlah anak perusahaan yang dimiliki) untuk mengukur kompleksitas perusahaan.

### 3.2.2.4 *Assets in Place* (Karakteristik Aset Perusahaan)

Shammari (2008) mengambil *assets in place* sebagai determinan tingkat pengungkapan sukarela, dan mengukurnya dengan membagi total aset tetap perusahaan dengan total aset perusahaan secara keseluruhan. Serupa dengan penelitian sebelumnya, Hossain dan Hammami (2009) yang juga menggunakan *assets in place* untuk mengetahui perbedaan tingkat pengungkapan sukarela, menghitung nilai *assets in place* dengan membagi total aset tetap dibagi dengan



total aset perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, Omar dan Simon (2011) menghitung nilai *assets in place* dengan membagi *book value of fixed assets* dengan *book value of total assets*.

Berdasarkan penelitian Shammari (2008); Hossain dan Hammami (2009), untuk mengetahui nilai *assets in place* perusahaan dalam penelitian ini, dihitung dengan rasio:

$$\text{Assets in place} = \frac{\text{Aset Tetap}_{it}}{\text{Total Aset}_{it}} \quad (3.4)$$

### 3.2.2.5 Agency Problem

Untuk mendapatkan nilai dari *agency problem*, dalam penelitian ini, digunakan *free cash flow from operation*. Menurut Wild *et al.* (2007) *free cash flow from operation* adalah fokus perusahaan secara keseluruhan yaitu jumlah arus kas bersih yang berasal dari operasi tanpa memperhatikan nilai dari aktifitas pendanaan, termasuk *capital expenditure* dan deviden yang dikeluarkan perusahaan. *Free cash flow from operation* dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Cash flow from operation} - \text{Net capital expenditures})}{\text{Total Assets}} \quad (3.5)$$

## 3.2.3 Variabel Kontrol

### 3.2.3.1. Profitabilitas

Penelitian sebelumnya yang menggunakan profitabilitas sebagai variabel kontrol dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela telah dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2000); Nasir dan Abdullah (2005); Clemente dan Labat (2009); Rouf dan Al Harun (2011).

Haniffa dan Cooke (2000) menghitung profitabilitas dengan rasio Return on Equity yaitu membagi *net profit* dengan *total shareholder's equity*. Nasir dan Abdullah (2005) menghitung profitabilitas dengan menggunakan rasio *return on asset (ROA)* dimana dihitung dengan membagi *net income* dibagi dengan *total assets*. Serupa dengan Nasir dan Abdullah (2005), penelitian Clemente dan Labat (2009) menggunakan ROA sebagai proxy dalam menghitung profitabilitas

perusahaan. Selanjutnya, Rouf dan Al Harun (2011) menggunakan rasio *Return on Sales* dimana *net income* dibagi dengan *total sales* perusahaan untuk menentukan profitabilitas.

Mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Haniffa dan Cooke (2000), dalam penelitian ini untuk menghitung profitabilitas dihitung dengan menggunakan rasio *Return on Equity*, yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}_{it}}{\text{Average Total shareholder's equity}_{it}} \quad (3.6)$$

### 3.2.3.2 Ukuran Perusahaan (*Size*)

Untuk mengukur ukuran perusahaan, Barako (2007) menggunakan nilai keseluruhan aset perusahaan yang didapat dari laporan tahunan perusahaan. Adelopo (2011) menggunakan *natural logarithm of total asset* sebagai proxy dalam menentukan ukuran perusahaan. Mengacu pada penelitian Adelopo (2011), untuk mengukur ukuran perusahaan pada penelitian ini, digunakan *natural logarithm of total asset* sebagai proxy nya.

### 3.2.3.3 Umur Perusahaan (*Age*)

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Matoussi dan Chakroun (2007), yang menggunakan umur perusahaan dengan *proxy* umur perusahaan sejak listing di Bursa Untuk menghitung umur perusahaan, dalam penelitian ini, cara menentukan umur perusahaan adalah dengan cara menghitung umur perusahaan dari mulai listing di BEI, sampai dengan tahun penelitian, yaitu 2010 dan 2011.

### 3.2.3.4 Kualitas Audit Eksternal

Untuk menentukan nilai kualitas audit eksternal, dilakukan dengan melihat apakah laporan keuangan sampel perusahaan menggunakan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Big 4 atau tidak. Daftar nama KAP yang termasuk dalam kategori Big 4 adalah KAP yang berafiliasi dengan Ernest&Young (EY), Pricewaterhouse Cooper (PwC), KPMG, dan Deloitte. Jika perusahaan sampel menggunakan jasa dari salah satu KAP big 4 tersebut, maka akan diberi nilai 1,

dan jika tidak menggunakan jasa dari KAP big 4, maka akan diberi nilai 0 (*dummy variable*).

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan sebagai vahan penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 dan 2011. Penelitian ini mengambil data *cross section* dari dua tahun yang berbeda, sedangkan pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang listing di BEI pada tahun 2010 dan 2011.
2. Perusahaan bukan merupakan industri yang bergerak dalam sektor keuangan. Hal ini terkait adanya regulasi yang berbeda dengan industri lainnya. Sehingga memungkinkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan mengandung makna yang berbeda.
3. Periode akuntansi perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengujian dalam penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder yaitu berupa informasi-informasi yang disajikan dalam *annual report* atau laporan tahunan perusahaan pada tahun 2010 dan 2011 yang telah di publikasi di BEI yaitu di website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), website resmi perusahaan, dan media internet lainnya.

Adapun pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Data skor pengungkapan sukarela diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.
2. Data skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit diperoleh dari laporan tahunan perusahaan
3. Data jumlah anak perusahaan yang dimiliki (*complexity*) diperoleh dari laporan tahunan perusahaan
4. Data mengenai karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pada bagian neraca.

5. Data mengenai nilai *free cash flow from Operation (agency problem)* diperoleh dari laporan arus kas perusahaan
6. Data profitabilitas diperoleh dari laporan keuangan perusahaan
7. Data ukuran perusahaan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yaitu neraca.
8. Data mengenai umur perusahaan (*age*) diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.
9. Data kualitas audit eksternal diperoleh dari laporan tahunan perusahaan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Uji Validitas Skor Dewan Komisaris dan Komite Audit**

Seperti yang telah dilakukan oleh Hermawan (2009) dalam penelitiannya atas *scoring* dewan komisaris dan komite audit untuk tahun 2006 dan 2007, untuk menguji validitas dari BOARDSCORE dan AUDCOMSCORE perlu dilakukan suatu penilaian yang disebut dengan *Cronbach's coefficient alpha*. *Cronbach's coefficient alpha* merupakan suatu ukuran konsistensi internal yang menggunakan ukuran yang berulang-ulang (dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan yang ada pada *checklist*). Nilai koefisien *alpha* tersebut digunakan untuk menilai suatu tingkat dimana korelasi antar pengukuran menjadi lebih kecil karena kesalahan acak (*random error*). Nilai maksimum koefisien *alpha* adalah satu apabila korelasi antara setiap pasang variabel adalah satu.

#### **3.5.2 Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum, maksimum, *mean* dan nilai standar deviasi dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Dari statistik deskriptif dapat diketahui karakteristik dan kewajaran data observasi untuk menjelaskan serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini. Statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada *outlier* dalam observasi yang digunakan.

### 3.5.3 Analisis Autokorelasi

Analisis autokorelasi merupakan teknik pengukuran untuk menguji hubungan antara eror pada observasi satu dengan observasi lainnya atau menguji hubungan antara eror dengan variabel independennya pada periode yang berbeda (Nachrowi dan Usman, 2006). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan melihat pola hubungan antara nilai residual atau *error* dan variabel independennya dengan membuat *plot* hubungan kedua variabel tersebut. Tujuan dilakukannya uji autokorelasi yaitu untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara *error* pada periode saat ini dengan *error* pada periode sebelumnya.

Menurut Nachrowi dan Usman (2006), dampak yang timbul dari adanya autokorelasi yaitu taksiran yang diperoleh dengan menggunakan OLS tidak lagi BLUE (*Best Linier Unbiased Estimation*), namun masih tak bias dan konsisten. Oleh karena itu, interval kepercayaan menjadi lebar dan uji signifikan kurang kuat, akibatnya uji t dan uji F tidak dapat dilakukan atau hasilnya tidak akan baik. Untuk mendeteksi autokorelasi digunakan uji durbin-watson (uji d).

### 3.5.4 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan model pengujian regresi berganda. Uji ini diperlukan untuk mengetahui signifikansi koefisien regresi. Signifikan regresi berarti bahwa nilai koefisien regresi tidak sama dengan nol secara statistika. Jika koefisien regresi sama dengan nol, maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Nachrowi dan Usman, 2006). Sebelum menggunakan hasil regresi, akan dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Hasil yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil regresi yang telah memenuhi asumsi-asumsi tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini akan menggunakan *Eviews* versi 6.0. dan *SPSS* versi 17.0.

### 3.5.5 Uji Asumsi Klasik

#### 3.5.5.1 Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen berdistribusi normal. Data yang memiliki distribusi normal berarti memiliki sebaran yang normal pula, yang artinya bahwa data dianggap dapat mewakili populasi. Untuk mengetahui apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak, secara sederhana dapat dilihat dari histogram data tersebut apakah membentuk kurva normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara (Nachrowi dan Usman, 2006) yaitu sebagai berikut:

1. Dengan membuat grafik histogram dari residual. Jika residual mengikuti distribusi normal, maka histogram akan berbentuk kurva yang menyerupai bel (*bell-shaped*).
2. Dengan menggunakan *normal probability plot* dari *standardized residual*. Jika titik-titik (gradien antara probabilitas kumulatif observasi dan probabilitas kumulatif harapan) berada di samping garis, maka residual mengikuti distribusi normal.

Untuk memastikan hasil uji normalitas maka dapat digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep dasar uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan membandingkan distribusi data. Penerapan pada uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0.05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Sedangkan jika signifikansi di atas 0.05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku.

### 3.5.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen dalam suatu persamaan regresi saling berkorelasi baik itu secara sempurna ataupun tidak sempurna. Pengujian ini menunjukkan bahwa antara variabel independennya mempunyai hubungan langsung (korelasi) yang sangat kuat. Model yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan yang kuat antar variabel independennya. Akibat adanya multikolinearitas dalam suatu regresi adalah sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2006):

1. Variansi atau *error*nya besar (dari taksiran OLS)
2. Interval kepercayaannya menjadi lebih lebar
3. Nilai uji-t (t-rasio) tidak signifikan sehingga kemungkinan besar nilai taksiran  $\beta$  menjadi tidak signifikan.
4. Nilai  $R^2$  yang tinggi, tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari uji t.
5. Terkadang taksiran koefisien yang didapat akan mempunyai nilai yang tidak sesuai dengan substansi sehingga dapat menyesatkan interpretasi.

Model yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan yang kuat antar variabel independennya. Multikolinearitas terjadi jika nilai *variance inflation factor* (VIF)  $> 10$  yang berarti terdapat korelasi antar variabel independen atau nilai *tolerance* (TOL)  $< 0.1$  atau sama dengan nol yang berarti terdapat korelasi sempurna antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang akan diuji terdapat masalah multikolinearitas atau tidak.

### 3.5.5.3 Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Heteroskedastisitas merupakan pelanggaran dari asumsi homokedastisitas dimana nilai residual atau *error* mempunyai varian yang tidak konstan. Menurut Nachrowi dan Usman (2006) dampak dari adanya heteroskedastisitas diantaranya adalah lebih besarnya variansi dari taksiran, hasil pengujian pada uji t dan uji F menjadi kurang akurat, *standard error* taksiran juga lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi sangat besar,

dan terakhir, kesimpulan yang diambil dari persamaan regresi yang dibuat dapat menyesatkan. Cara untuk menanggulangi masalah heterokedastisitas tersebut adalah dengan melakukan uji *white*. Uji *white* dilakukan terhadap model regresi yang telah terbebas dari masalah multikolinearitas, yang berarti ada kemungkinan model yang digunakan merupakan model dengan variabel independensi hasil dari regresi yang menggunakan *syntax*. Jika nilai probabilitas dalam pengujian  $> 0.05$ , maka model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

#### **3.5.5.4 Uji Statistik F**

Uji F merupakan pengujian model regresi secara simultan dari variabel-variabel independen yang bertujuan untuk melihat apakah secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila p-value dalam uji F  $< 0.05$ , maka hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen dalam model terhadap variabel dependen diterima.

#### **3.5.5.5 Uji Statistik t**

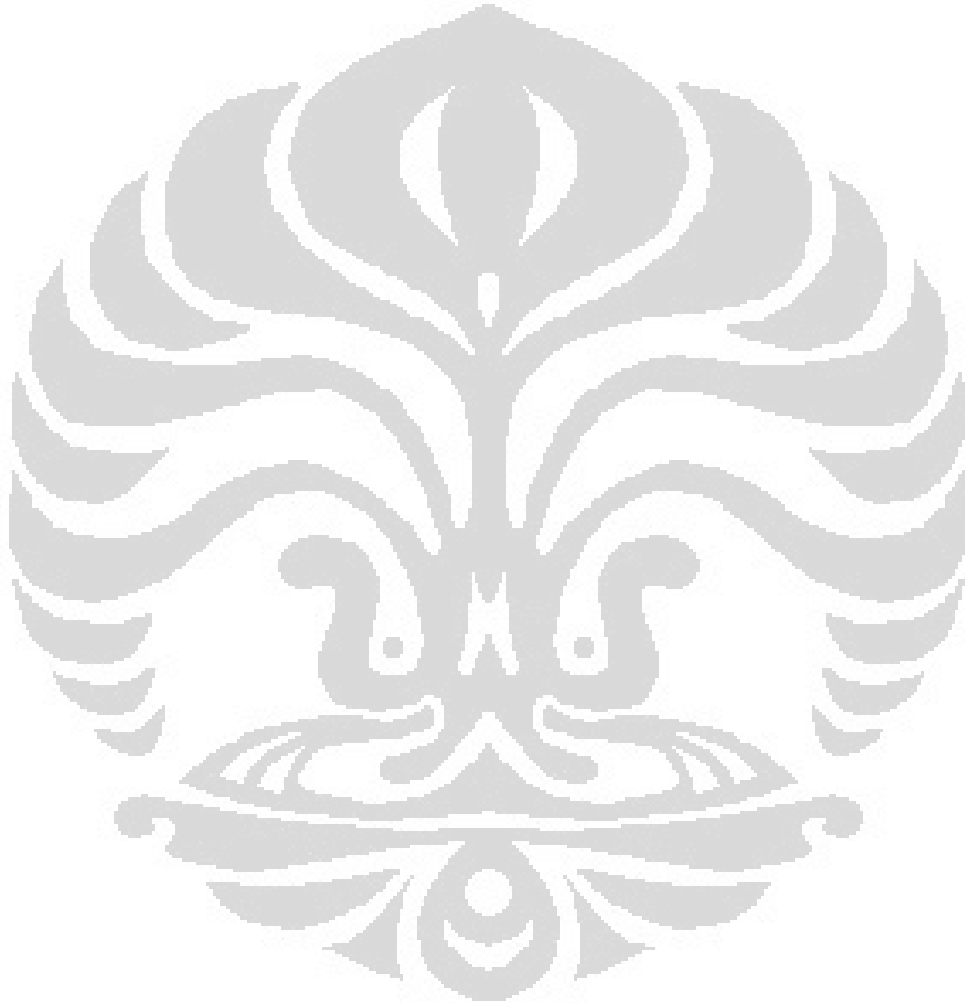
Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu koefisien regresi signifikan atau tidak, sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu dibuat hipotesis ( $H_0$  dan  $H_1$ ) (Nachrowi dan Usman, 2006). Uji ini digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria pengujian ditetapkan berdasarkan nilai probabilitas. Apabila tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5 persen, dengan kata lain jika probabilitas  $> 0,05$  maka dinyatakan tidak signifikan dan jika probabilitas  $< 0,05$  maka dinyatakan signifikan.

#### **3.5.5.6 Goodness of Fit ( $R^2$ )**

Ukuran *Goodness of Fit* ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa dekatkah garis regresi yang terestimasi dengan data. Ukuran Goodness of Fit ( $R^2$ ) juga mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen. Nilai  $R^2$  sama dengan nol berarti variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen sama sekali. Sementara



jika nilai  $R^2$  sama dengan satu berarti variabel dependen 100% dapat dijelaskan oleh variabel independen. Semakin besar nilai  $R^2$  berarti variabel independennya semakin dapat menjelaskan variabel dependen dengan lebih baik. Dengan demikian, ukuran *goodness of fit* dari suatu model ditentukan oleh  $R^2$  yang nilainya antara nol dan satu (Nachrowi dan Usman, 2006).



## BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah perusahaan yang terdaftar di BEI sampai dengan tahun 2011 dari seluruh industri kecuali untuk industri keuangan. Sampai dengan akhir tahun 2011 terdapat 445 perusahaan yang tercatat sebagai perusahaan publik di Indonesia. Sampel perusahaan diambil dari tahun 2010 dan 2011, dimana jumlah sampel untuk tahun 2010 sebanyak 248 perusahaan sementara untuk tahun 2011 sebanyak 160 perusahaan. Pada tahun 2010, dari 437 perusahaan yang terdaftar, 72 di antaranya merupakan perusahaan keuangan, dan 117 tidak memiliki kelengkapan data-data dalam laporan tahunan, sehingga sampel untuk tahun 2010 sebanyak 248. Pada tahun 2011 dari jumlah 445 perusahaan, sebanyak 72 merupakan perusahaan keuangan dan sebanyak 213 belum mengeluarkan data-data laporan tahunan yang lengkap sampai pada waktu pengambilan sampel penelitian ini. Pengelompokan populasi dan pengambilan sampel perusahaan dalam penelitian ini terangkum dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Populasi dan Pengambilan Sampel Penelitian

Deskripsi	2010	2011
Jumlah perusahaan listing per Desember 2011	437	445
Perusahaan yang bergerak di industri keuangan	(72)	(72)
Perusahaan yang memiliki data laporan tahunan yang tidak lengkap	(117)	(213)
Jumlah perusahaan untuk tahun 2010 dan 2011	<b>248</b>	<b>160</b>
<b>Jumlah observasi (<i>firm year</i>) keseluruhan yang memenuhi kriteria</b>	<b>408</b>	

Sumber: Sumber: BEI, diolah kembali

Selanjutnya, jenis perusahaan dibagi berdasarkan jenis industrinya, yaitu aneka industri, industri barang konsumsi, industri dasar kimia, infrastruktur utilitas dan transportasi, perdagangan dan jasa, pertambangan, pertanian serta

properti dan *real estate*. Berdasarkan identifikasi ini, didapat pengelompokan jumlah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian seperti yang terangkum dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pengelompokan Observasi Perusahaan Berdasarkan Sektor Industri

No	Sektor Industri	2010	2011	Jumlah	Presentase
1	Aneka Industri	23	23	46	11,27%
2	Industri Barang Konsumsi	17	16	33	8,09%
3	Industri Dasar Kimia	40	22	62	15,20%
4	Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	26	14	40	9,80%
5	Perdagangan dan Jasa	67	44	111	27,21%
6	Pertambangan	22	12	34	8,33%
7	Pertanian	13	10	23	5,64%
8	Properti dan <i>Real Estate</i>	40	19	59	14,46%
	<b>Jumlah Observasi</b>	<b>248</b>	<b>160</b>	<b>408</b>	<b>100%</b>

Sumber: BEI, diolah kembali

## 4.2. Analisis Statistik Deskriptif

### 4.2.1 Uji Validitas Skor Dewan Komisaris dan Komite Audit

Seperti pada penelitian Hermawan (2009), untuk menguji validitas dari BOARDSCORE dan AUDCOMSCORE, dihitung nilai *croanbach's coefficient alpha*, yaitu suatu ukuran konsistensi internal yang menggunakan ukuran yang berulang-ulang yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam *checklist*. Nilai koefisien *alpha* tersebut digunakan untuk menilai suatu tingkat dimana korelasi antar pengukuran menjadi kecil karena kesalahan acak (*random error*). Berdasarkan nilai yang diperoleh dari observasi, nilai koefisien *alpha* skor dewan komisaris untuk keempat kategori dalam *checklist* adalah 0.686, sedangkan nilai koefisien *alpha* skor komite audit untuk ketiga kategori dalam *checklist* adalah 0.685. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan koefisien *alpha* yang terdapat dalam penelitian Hermawan (2009) yaitu 0.607 untuk dewan komisaris, dan 0.796 untuk komite audit. Meskipun standar untuk koefisien *alpha* adalah 0.8, skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit yang digunakan dalam penelitian ini

dianggap cukup valid. Hasil uji validitas skor dewan komisaris dan komite audit digambarkan dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 *Reliability Statistics*

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	<i>Number of items</i>
BOARDSCORE	0,686	17
AUDCOMSCORE	0,685	11

#### 4.2.2 Analisis Skor Efektifitas Dewan Komisaris

Berdasarkan daftar pertanyaan mengenai karakteristik dewan komisaris, terdapat 17 pertanyaan yang masing-masing diberi nilai 1 sampai 3. Terdapat 6 pertanyaan untuk kategori independensi, 6 pertanyaan untuk kategori aktivitas, 1 pertanyaan untuk kategori jumlah anggota, dan 4 pertanyaan untuk kategori kompetensi. Tabel 4.4 berikut menyajikan statistik deskriptif setiap kategori skor dewan komisaris untuk tahun 2010 dan 2011.

Untuk kategori independensi, pada tahun 2010 nilai minimum yang diperoleh adalah 7 dan maksimum 16. Sedangkan nilai minimum dan maksimum untuk tahun 2011 adalah 7 dan 17. Nilai minimum di tahun 2010 berarti pada penilaian kategori independensi masih tergolong rendah, dikarenakan masih ada perusahaan yang mendapat nilai 1 (*poor*) untuk hampir setiap pertanyaan independensi yang berjumlah 6. Nilai minimum untuk tahun 2011 dinilai tidak terdapat perusahaan yaitu masih bernilai minimum 7. Sedangkan untuk nilai maksimumnya, terdapat kenaikan nilai meskipun sangat sedikit, yaitu dari 16 ke 17. Secara keseluruhan, penilaian untuk kategori independensi tidak begitu baik, karena nilai min untuk kedua tahun masih rendah dan tidak terdapat perbaikan yang berarti.

Tabel 4.4 berikut menggambarkan statistik deskriptif efektifitas dewan komisaris tahun 2010 dan 2011.

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Efektifitas Dewan Komisaris  
Tahun 2010

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Pertanyaan</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Independensi	6	7	16	10,192	1,967
Aktivitas	6	6	18	12,902	2,885
Jumlah Anggota	1	1	3	1,904	0,995
Kompetensi	4	4	12	9,176	1,753
Total	17	18	49	34,174	7,590

Tahun 2011

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Pertanyaan</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Independensi	6	7	17	10,524	2,064
Aktivitas	6	10	17	13,339	1,927
Jumlah Anggota	1	1	3	13,559	1,841
Kompetensi	4	4	12	9,586	1,670
Total	17	22	49	47,008	7,502

Setiap pertanyaan pada setiap kategori dapat memperoleh nilai minimum 1 (*poor*) dan nilai maksimum 3 (*good*). Untuk kategori independensi, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 6 (6 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 18 (6 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori aktivitas, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 6 (6 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 18 (6 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori jumlah anggota, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 1 (1 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 3 (1 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori kompetensi, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 4 (4 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 12 (4 pertanyaan dikalikan nilai 3).

Untuk kategori aktivitas, pada tahun 2010 nilai minimum yang di dapat adalah 6 dan nilai maksimumnya 18. Pada tahun 2011 terdapat kenaikan nilai minimum yang cukup berarti yaitu menjadi 10, dan untuk nilai maksimumnya mengalami penurunan 1 angka yaitu menjadi 17. Jika dilihat dari aktivitas pada tahun 2010 maka aktivitas dewan komisaris terlihat masih sangat rendah, karena masih mendapat nilai 1 (*poor*) untuk masing-masing pertanyaan yang berjumlah 6. Sedangkan untuk tahun 2011 terdapat kenaikan yang cukup berarti untuk aktivitas dewan komisaris. Nilai maksimum untuk kedua tahun dinilai sudah cukup baik, karena terdapat perusahaan yang memperoleh nilai maksimum 3 (*good*)

untuk masing-masing pertanyaan. Kategori jumlah anggota dan kompetensi, pada tahun 2010 dan 2011 perusahaan mencapai nilai minimum dan maksimum yang sama yaitu 1 (*poor*) untuk masing-masing pertanyaan, dan 3 (*good*) untuk masing-masing pertanyaan yang berjumlah 3 (*good*). Hasil penilaian jumlah anggota, aktivitas dan kompetensi dari kedua tahun penelitian dinilai cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada perusahaan yang memiliki dewan komisaris yang melakukan aktivitas secara efektif, memiliki jumlah anggota yang efektif, dan kompeten sebagai komisaris.

Penilaian skoring memiliki angka tertinggi 3 untuk setiap kriteria yang memenuhi kategori *high* untuk kategori *medium* mendapatkan nilai 2, dan untuk kategori *low* mendapatkan nilai 1. Dalam penilaian *scoring* terdapat 17 kriteria, sehingga total nilai skor efektifitas dewan komisaris tertinggi adalah 51 dan untuk total nilai skor efektifitas dewan komisaris yang terendah adalah 17. Berikut adalah interval skor efektifitas dewan komisaris pada penelitian ini:

Tabel 4.5  
Interval Skor Dewan Komisaris

Skor Dewan Komisaris	Kategori
17 – 28	<i>Low</i>
29 – 40	<i>Medium</i>
41 – 51	<i>High</i>

Selanjutnya pada tabel 4.6 berikut akan digambarkan hasil skor efektifitas dewan komisaris berdasarkan industri. Pada tahun 2010, industri yang mendapat skor *high* tertinggi adalah industri pertambangan yaitu sebesar 31,82%, sementara industri yang mendapat skor *low* tertinggi adalah industri perdagangan dan jasa. Hal ini menunjukkan efektifitas peran dewan komisaris pada industri pertambangan di Indonesia pada tahun 2010 sudah cukup baik jika dibandingkan dengan industri lainnya. Dan efektifitas dewan komisaris pada industri perdagangan dan jasa pada tahun 2010 dinilai paling rendah dibandingkan dengan industri lainnya.

Tabel 4.6 Pembagian Skor Efektifitas Dewan Komisaris per Industri

Tahun 2010

Sektor Industri	Jumlah Perusahaan	High	Medium	Low
Aneka Industri	23	0,00%	95,65%	4,35%
Industri Barang Konsumsi	17	11,76%	76,47%	11,76%
Industri Dasar Kimia	40	2,50%	92,50%	5,00%
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	26	30,77%	65,38%	3,85%
Perdagangan dan Jasa	67	5,97%	77,61%	16,42%
Pertambangan	22	31,82%	63,64%	4,55%
Pertanian	13	23,08%	76,92%	0,00%
Properti dan Real Estate	40	15,00%	75,00%	10,00%
<b>Total</b>	<b>248</b>			

Tahun 2011

Sektor Industri	Jumlah Perusahaan	High	Medium	Low
Aneka Industri	23	8,70%	86,96%	4,35%
Industri Barang Konsumsi	16	12,50%	87,50%	0,00%
Industri Dasar Kimia	22	0,00%	90,91%	9,09%
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	14	21,43%	78,57%	0,00%
Perdagangan dan Jasa	44	6,82%	90,91%	2,27%
Pertambangan	12	50,00%	50,00%	0,00%
Pertanian	10	10,00%	90,00%	0,00%
Properti dan Real Estate	19	15,79%	78,95%	5,26%
<b>Total</b>	<b>160</b>			

Pada tahun 2011, sama seperti tahun sebelumnya, industri yang mendapat nilai *high* untuk skor efektifitas dewan komisaris yang tertinggi adalah industri pertambangan, yaitu sebesar 50%, yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 31,82%. Sementara untuk industri yang paling banyak mendapat nilai *low* adalah industri dasar kimia yaitu sebesar 9,09%. Industri perdagangan dan jasa yang sebelumnya mendapat nilai *low* tertinggi pada tahun 2011 mengalami kenaikan pada nilai *medium* dari sebelumnya sebesar 77,61% menjadi 90,91%.

### 4.2.3 Analisis Skor Efektifitas Komite Audit

Selain dari skor efektifitas dewan komisaris, penelitian ini juga menggunakan skor efektifitas komite audit. Tabel 4.7 akan menjelaskan statistik deskriptif dari ketiga kategori skor komite audit, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi komite audit. Selain itu, akan dijelaskan pula statistik deskriptif skor komite audit. Tabel ini juga akan menjelaskan jumlah pertanyaan dari setiap kategori dan total pertanyaan dari skor komite audit.

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Skor Efektifitas Komite Audit

<b>Tahun 2010</b>					
<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Pertanyaan</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Aktivitas	8	3	24	15,909	4,436
Jumlah Anggota	1	1	3	2,022	0,412
Kompetensi	2	2	6	3,776	1,383
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>21,707</b>	<b>6,231</b>

<b>Tahun 2011</b>					
<b>Kategori</b>	<b>Jumlah Pertanyaan</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Aktivitas	8	8	23	17,098	2,989
Jumlah Anggota	1	1	3	2,074	0,433
Kompetensi	2	2	6	3,790	1,048
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>22,962</b>	<b>4,470</b>

Setiap pertanyaan pada setiap kategori dapat memperoleh nilai minimum 1 (*poor*) dan nilai maksimum 3 (*good*). Untuk kategori aktivitas, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 8 (8 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 24 (8 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori jumlah anggota, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 1 (1 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 3 (1 pertanyaan dikalikan nilai 3). Untuk kategori kompetensi, nilai minimum yang dapat diperoleh adalah 2 (2 pertanyaan dikalikan nilai 1) dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah 6 (2 pertanyaan dikalikan nilai 3).

Pada tabel statistik deskriptif skor komite audit, terdapat 3 kategori, yaitu aktivitas dengan 8 buah pertanyaan, jumlah anggota dengan 1 buah pertanyaan, dan kompetensi dengan 2 buah pertanyaan, sehingga total pertanyaan untuk skor efektifitas komite audit adalah 11 buah pertanyaan. Pada tahun 2010 nilai minimum yang bisa dicapai perusahaan adalah 3 yang berarti ada sampel perusahaan yang tidak mendapat skor untuk beberapa pertanyaan. Hal ini dapat



juga dikarenakan tidak adanya informasi yang diperoleh dalam laporan tahunan perusahaan mengenai aktivitas rapat komite audit. Sementara pada tahun 2011 nilai minimum aktivitas komite audit adalah nilai minimum yang bisa dicapai yaitu 8, hal ini menggambarkan bahwa pada sampel perusahaan, terdapat perusahaan yang masing-masing pertanyaan mendapat nilai 1 (*poor*).

Pada kategori jumlah anggota komite audit, hanya terdapat satu pertanyaan mengenai jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Nilai minimum dan maksimum pada tahun 2010 dan 2011 adalah jumlah minimum dan maksimum yang dapat dicapai perusahaan. Jumlah minimum komite audit adalah 1 orang sementara maksimal komite audit perusahaan adalah 3. Menurut KNKG (2006), jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Sementara untuk kategori kompetensi komite audit dalam bidang akuntansi, nilai minimum yang bisa dicapai sampel perusahaan pada tahun 2010 dan 2011 adalah 2, dimana terdapat perusahaan yang nilai masing-masing pertanyaan adalah 1 (*poor*). Sementara untuk nilai maksimumnya, masing-masing tahun mendapat nilai maksimum 6, dimana pada setiap pertanyaan nilai yang didapat adalah 3 (*good*).

Untuk total skor efektifitas komite audit, total pertanyaan yang ada adalah 11 item pertanyaan, sehingga nilai minimum yang bisa didapat adalah 11 (11 pertanyaan dikalikan 1) dan nilai maksimum yang bisa didapat adalah 33 (11 pertanyaan dikalikan 3). Pada total skor komite audit di perusahaan sampel tahun 2010, diperoleh nilai minimum dan maksimum sebesar 6 dan 33. Sementara pada tahun 2011, diperoleh nilai minimum dan maksimum sebesar 11 dan 32. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan adanya komite audit yang masih kurang efektif di tahun 2010, tetapi hal ini membaik karena nilai minimum di 2011 menjadi 11, sementara sudah ada perusahaan yang memiliki nilai maksimum 33, yang berarti perusahaan tersebut sudah memiliki komite audit yang efektif berdasarkan ketiga kategori secara keseluruhan, yaitu aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi.

Penilaian skoring untuk efektifitas komite audit, memiliki angka tertinggi 3 untuk setiap kriteria yang memenuhi kategori *high*, untuk kategori *medium* mendapatkan nilai 2, dan untuk kategori *low* mendapatkan nilai 1. Dalam penilaian *scoring* terdapat 11 kriteria, sehingga total nilai skor efektifitas dewan komisaris tertinggi adalah 33 dan untuk total nilai skor efektifitas dewan komisaris yang terendah adalah 11. Berikut adalah interval skor efektifitas komite audit pada penelitian ini:

Tabel 4.8  
Interval Skor Komite Audit

Skor Komite Audit	Kategori
11 – 18	<i>Low</i>
19 – 25	<i>Medium</i>
26 – 33	<i>High</i>

Selanjutnya pada tabel 4.9 berikut akan digambarkan hasil skor efektifitas komite audit berdasarkan sektor industri:

Tabel 4.9 Pembagian Skor Efektifitas Komite Audit Berdasarkan Sektor Industri  
Tahun 2010

Sektor Industri	Jumlah Perusahaan	<i>High</i>	<i>Medium</i>	<i>Low</i>
Aneka Industri	23	4.35%	78.26%	17.39%
Industri Barang Konsumsi	17	29.41%	70.59%	0.00%
Industri Dasar Kimia	40	25.00%	60.00%	15.00%
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	26	30.77%	53.85%	15.38%
Perdagangan dan Jasa	67	19.40%	52.24%	28.36%
Pertambangan	22	59.09%	31.82%	9.09%
Pertanian	13	15.38%	69.23%	15.38%
Properti dan Real Estate	40	25.00%	57.50%	17.50%
<b>Total</b>	<b>248</b>			

## Tahun 2011

Sektor Industri	Jumlah Perusahaan	High	Medium	Low
Aneka Industri	23	0.00%	100.00%	0.00%
Industri Barang Konsumsi	16	18.75%	75.00%	6.25%
Industri Dasar Kimia	22	15.79%	78.95%	21.05%
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	14	35.71%	64.29%	0.00%
Perdagangan dan Jasa	44	18.18%	63.64%	18.18%
Pertambangan	12	50.00%	41.67%	8.33%
Pertanian	10	25.00%	75.00%	0.00%
Properti dan Real Estate	19	15.79%	73.68%	10.53%
<b>Total</b>	<b>160</b>			

Pada tahun 2010, sektor industri yang mendapat nilai *high* tertinggi adalah industri pertambangan yaitu sebesar 59,09%, hal ini berarti industri pertambangan sudah memiliki komite audit yang efektif dan cukup baik, terbukti dengan lebih dari 50% perusahaan yang termasuk industri pertambangan telah memiliki nilai *high*. Sementara industri yang mendapat nilai *low* terendah pada tahun 2010 adalah industri perdagangan dan jasa yaitu sebesar 28,36%. Hal ini berarti perusahaan yang termasuk dalam industri perdagangan dan jasa masih belum memiliki komite audit yang efektif dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, pada tahun 2011, sektor industri yang mendapat nilai *high* tertinggi adalah tetap industri pertambangan yaitu sebesar 50%. Meskipun mengalami penurunan sebesar 9,09% dari tahun 2010, industri ini tetap memiliki komite audit yang paling efektif dari industri lainnya. Sementara industri yang memiliki nilai *low* yang tertinggi untuk tahun 2011 adalah industri dasar kimia yaitu sebesar 21,05%. Industri ini mengalami penurunan nilai *high* dan peningkatan nilai *medium* dan *low* dari tahun sebelumnya. Sementara industri perdagangan dan jasa yang pada tahun 2010 memiliki skor *low* paling tinggi, pada tahun 2011 mengalami penurunan nilai *low* dan peningkatan nilai *medium*.

#### 4.2.4 Analisis Skor Pengungkapan Sukarela

Tabel 4.10 di bawah ini akan merangkum tingkat pengungkapan sukarela berdasarkan masing-masing industri. Tingkat pengungkapan sukarela dibagi

dalam tiga kategori yaitu *high*, *medium* dan *low*, dimana perusahaan dikategorikan *high* jika informasi maksimum yang dicapai berada dalam *range* 25-60 dari total 60 pertanyaan. Nilai *medium* didapat jika perusahaan memperoleh nilai maksimum 15-25 dari total 60 pertanyaan, dan *low* jika mendapat 0-15 dari total 60 pertanyaan.

Tabel 4.10 Pembagian Pengungkapan Sukarela Per Industri  
Tahun 2010

Sektor Industri	Jumlah Perusahaan	High	Medium	Low
Aneka Industri	23	4,35%	60,87%	34,78%
Industri Barang Konsumsi	17	0,00%	88,24%	11,76%
Industri Dasar Kimia	40	0,00%	72,50%	27,50%
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	26	0,00%	84,62%	15,38%
Perdagangan dan Jasa	67	0,00%	64,18%	35,82%
Pertambangan	22	4,55%	90,91%	4,55%
Pertanian	13	0,00%	92,31%	7,69%
Properti dan Real Estate	40	0,00%	82,50%	17,50%
<b>Jumlah</b>	<b>248</b>			

Tahun 2011

Sektor Industri	Jumlah Perusahaan	High	Medium	Low
Aneka Industri	23	8,70%	56,52%	34,78%
Industri Barang Konsumsi	16	12,50%	68,75%	18,75%
Industri Dasar Kimia	22	0,00%	59,09%	40,91%
Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi	14	21,43%	64,29%	14,29%
Perdagangan dan Jasa	44	0,00%	68,18%	31,82%
Pertambangan	12	33,33%	66,67%	0,00%
Pertanian	10	10,00%	90,00%	0,00%
Properti dan Real Estate	19	5,26%	73,68%	21,05%
<b>Jumlah</b>	<b>160</b>			

Berdasarkan tabel 4.10, industri yang mendapat nilai *high* paling banyak untuk tahun 2010 adalah industri pertambangan, sementara industri yang mendapat nilai *low* paling banyak adalah perdagangan dan jasa. Untuk tahun 2011, terjadi peningkatan persentase industri yang mendapat nilai *high*, artinya sudah banyak industri yang meningkatkan pengungkapan sukarela mereka. Seperti

halnya pada tahun 2010, industri yang paling banyak mendapat nilai *high* adalah industri pertambangan, dengan kenaikan persentase yang cukup drastis yaitu menjadi 33, 33%, sementara untuk industri yang paling banyak mendapat nilai *low* adalah industri dasar kimia.

#### **4.2.5 Analisis Statistik Deskriptif Model Penelitian Lainnya**

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari data penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih informatif secara ringkas. Sebelum mendapatkan hasil uji statistik, dilakukan pengujian untuk melihat apakah ada pencilan data. Jika dalam pengujian terdapat pencilan data, maka pencilan data yang ada akan di-*treatment* terlebih dahuludengan *winsorized*. Treatment ini mengidentifikasi data pencilan yang memiliki nilai diluar dari  $\text{mean} \pm 3$  standar deviasi. Data pencilan akan diganti dengan nilai terdekat dari nilai tertinggi atau terendah yang masih dalam *range winsor* sehingga tidak ada data yang dikeluarkan dari sampel.

Rangkuman dari hasil uji statistik deskriptif terdapat pada tabel 4.11. Variabel DISCSORE memiliki skor minimum sebesar 0.117 yang mengindikasikan bahwa skor pengungkapan sukarela perusahaan yang disajikan dalam penelitian selama tahun 2010 dan 2011 yang terendah adalah 0.117. Nilai maksimum dari variabel ini adalah 0.567 yang berarti skor pengungkapan sukarela perusahaan di Indonesia selama 2010 dan 2011 adalah 0.567 atau lebih dari setengah skor tingkat pengungkapan sukarela yang dapat dicapai perusahaan. Kesenjangan nilai ini berdampak pada nilai standar deviasi yaitu sebesar 0.068. Sementara itu, skor rata-rata untuk pengungkapan sukarela perusahaan selama 2010-2011 dalam sampel penelitian adalah sebesar 0.303

Untuk variabel BOARDSCORE, skor efektifitas minimum yang dicapai oleh sampel penelitian ini adalah 0.412 yang berarti tingkat efektifitas dewan komisaris perusahaan adalah 0.412 dari nilai maksimum 1. Skor maksimum untuk tingkat efektifitas dewan komisaris yang dicapai sampel penelitian ini cukup besar, yaitu 0.941. Adanya perbedaan skor maksimum dan minimum yang dicapai

oleh sampel penelitian menimbulkan kesenjangan atau delta yaitu standar deviasi sebesar 0.068. Sementara skor rata-rata tingkat efektifitas dewan komisaris perusahaan tidak cukup baik yaitu 0.303 atau tidak lebih dari setengah skor yang dapat dicapai.

Tabel 4.11 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Lainnya

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std.Deviasi
DISCSORE	0,117	0,567	0,303	0,068
BOARDSCORE	0,412	0,941	0,683	0,087
AUDCOMSCORE	0,182	0,970	0,679	0,130
ASSETS (%)	0,000	21,644	0,371	1,084
COMPLEXITY	0,000	78,00	9,00	14,22
AGENCY	-9,099	0,922	0,036	0,476
ROE (%)	-59,000	80,000	10,721	19,485
KAP	0,000	1,000	0,400	0,490
AGE (Tahun)	0,000	30,000	12,200	7,460
SIZE (Milyar Rp)	8,822	49.329,381	5.151,424	9.197,082

Jumlah observasi: 408, dengan melakukan *winsorize* untuk observasi yang outlier berdasarkan *winsorize approach* dengan batasan  $\text{mean} \pm 3$  standar deviasi. Variabel yang telah di *winsorize* adalah COMPLEXITY, ROE dan SIZE.

DISCSORE = Skor tingkat pengungkapan sukarela perusahaan pada tahun t; BOARDSCORE = Skor efektifitas dewan komisaris pada tahun t; AUDCOMSCORE = skor efektifitas komite audit pada tahun t; ASSETS = karakteristik aset perusahaan pada akhir tahun t yang digambarkan dengan rasio kepemilikan aset tetap dengan total aset secara keseluruhan; COMPLEXITY = jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan pada tahun t; AGENCY = *agency problem* yang dimiliki perusahaan dengan *operating free cashflow* sebagai proxynya, *operating free cash flow* = (*free cash flow from operation - net capital expenditure*) / total aset; ROE = rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan pada tahun t,  $\text{ROE} = \text{Net Income} / \text{Total Shareholders's equity}$ ; KAP = Variabel dummy untuk mengukur kualitas audit perusahaan, bernilai 1 jika diaudit Big4 dan 0 jika tidak; AGE = variabel umur perusahaan dari awal listing di BEI sampai tahun penelitian; SIZE = natural logaritma dari total aset yang menggambarkan ukuran perusahaan.

Variabel AUDCOMSCORE yang menggambarkan skor efektifitas komite audit perusahaan memiliki skor minimum 0.182 dan skor maksimum yang cukup besar yaitu 0.941. Perbedaan yang cukup besar antara skor minimum dan maksimum menimbulkan standar deviasi yang cukup besar yaitu 0.087. Rata-rata skor efektifitas komite audit yang dicapai oleh sampel penelitian cukup baik yaitu

sebesar 0.683. Rata-rata ini menggambarkan tingkat efektifitas komite audit perusahaan adalah 0.683 atau melebihi dari setengah skor yang dapat dicapai oleh perusahaan. Rata-rata yang cukup besar ini dikarenakan skor maksimum yang dicapai sampel perusahaan yang besar yaitu 0.941 atau hampir mendekati skor efektifitas yang sempurna yaitu 1.

Variabel *ASSETS* merupakan penggambaran karakteristik aset perusahaan. Dalam penelitian ini nilai karakteristik aset perusahaan yang digambarkan dengan rasio penempatan aset tetap perusahaan dari total aset yang dimiliki perusahaan memiliki nilai minimum 0.000 % yang menggambarkan rasio kepemilikan aset tetap perusahaan terhadap total aset perusahaan sangat kecil, sementara nilai maksimum yang diperoleh untuk karakteristik aset perusahaan sampel penelitian adalah sebesar 21.644 %. Rata-rata rasio penempatan aset tetap dari total keseluruhan aset perusahaan adalah sebesar 0.371 % dan nilai kesenjangan atau standar deviasi sebesar 1.084 %.

Variabel *COMPLEXITY* yang menggambarkan jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh sampel penelitian memiliki nilai minimum 0, yang berarti jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan adalah 0 atau tidak memiliki anak perusahaan. Nilai minimum tersebut diperoleh karena tidak semua perusahaan publik di Indonesia memiliki anak perusahaan. Sementara itu jumlah anak perusahaan yang terbanyak dari sampel penelitian adalah sejumlah 78 anak perusahaan. Rata-rata jumlah anak perusahaan yang dimiliki sampel adalah 9 anak perusahaan, dan kesenjangan atau standar deviasi yang terjadi adalah sebesar 14,217.

Variabel *AGENCY* yang di *proxykan* dengan *operating free cash flow* memiliki nilai minimum -9,099 yang berarti terdapat perusahaan yang memiliki pengeluaran atau *cash outflow* yang lebih besar dari *cash inflow* sehingga bernilai negatif. Nilai maksimum 0,922 menggambarkan nilai *free cash flow* perusahaan yang paling besar adalah senilai 0,922. Rata-rata *agency problem* yang dimiliki perusahaan adalah senilai 0,036.

Variabel ROE merupakan variabel yang menggambarkan profitabilitas perusahaan. ROE mencerminkan tingkat imbal hasil ekuitas saham perusahaan dari laba bersih perusahaan. Rasio ROE terendah berada pada nilai -59%, tanda negatif tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kerugian atau defisiensi baik itu dari laba (rugi) bersih ataupun dari jumlah ekuitas perusahaan. Nilai ROE tertinggi berada pada nilai 80% yang berarti tingkat imbal hasil ekuitas saham perusahaan adalah 80% dari jumlah laba bersih perusahaan. Tanda positif dalam ROE tersebut mengindikasikan perusahaan mengalami keuntungan dalam imbal hasil ekuitasnya. Rata-rata nilai ROE yang dicapai perusahaan adalah sebesar 10.721% yang berarti rata-rata perusahaan memiliki tingkat pengembalian ekuitas sebesar 10.721% dari laba bersih perusahaan pada tahun berjalan. Sementara kesenjangan atau standar deviasi dari ROE perusahaan adalah sebesar 19.485 %.

Variabel KAP yang merupakan variabel dummy yang dinilai dengan skor tertinggi 1 untuk perusahaan dengan kantor akuntan publik Big4 dan 0 untuk perusahaan dengan kantor akuntan publik non Big4, sudah pasti memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Adapun rata-rata dari variabel dummy ini adalah 0.40 yang berarti sebesar 0.40 perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP Big4 dalam pemeriksaan laporan keuangannya. Standar deviasi dari variabel ini adalah sebesar 0.49. Tidak terdapat keharusan bagi perusahaan publik di Indonesia untuk menggunakan KAP Big4 dalam pelaksanaan audit laporan keuangannya. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan jumlah perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big4 dan non Big4.

Variabel AGE adalah variabel umur perusahaan yang dihitung sejak perusahaan listing di BEI atau saat perusahaan melakukan *Initial Public Offering*(IPO) yaitu saat perusahaan melakukan penawaran saham umum perdana ke masyarakat, sampai dengan tahun penelitian yaitu 2010 dan 2011. Hasil dari variabel ini beragam, yaitu dengan nilai minimum 0 yang berarti perusahaan tersebut baru melakukan IPO saat tahun penelitian, dan nilai maksimum sebesar



30 tahun. Rata-rata umur perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 12.20 tahun, sementara standar deviasi atau kesenjangan dari umur perusahaan yang dijadikan sampel adalah 7.46 tahun.

Variabel SIZE merupakan total aset perusahaan, yang digunakan untuk menggambarkan ukuran perusahaan. SIZE yang besar mengindikasikan ukuran perusahaan yang besar, dan begitu pula sebaliknya, SIZE yang kecil menggambarkan ukuran perusahaan yang kecil. Total aset yang terendah adalah 8,822 Milyar sedangkan total aset yang tertinggi berada pada angka 49.329,381 Milyar. Rata-rata total aset perusahaan adalah sebesar 5.151,424 Milyar.

#### **4.3. Analisis Korelasi *Pearson* dalam Model 1, 2 dan 3**

Analisis korelasi bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antarvariabel dalam satu model dengan menggunakan koefisien korelasi *Pearson*. Variabel COMPLEXITY dan ROE telah mengalami *winsorized* dan variabel AGENCY, BOARDSCORE dan AUDCOMSCORE telah mengalami *centering* untuk menghindari terjadinya multikolinearitas terhadap variabel lain. Korelasi antar variabel dalam model 1, 2 dan 3 disajikan dalam tabel 4.7. Korelasi ini dibuat untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel skor pengungkapan sukarela.

Variabel BOARDSCORE memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap DISCSORE yang berarti tingkat efektifitas dewan komisaris mempengaruhi kebijakan pengungkapan sukarela perusahaan pada nilai  $\alpha = 1\%$ . Hal ini dikarenakan fungsi dari dewan komisaris sebagai pengawas segala kebijakan manajerial, termasuk kebijakan dalam pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan mereka. Semakin efektif fungsi pengawasan dewan komisaris, semakin baik pula pengungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan. Sama halnya dengan BOARDSCORE, variabel AUDCOMSCORE memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap DISCSORE pada nilai  $\alpha = 1\%$ . Fungsi komite audit sebagai komite pembantu dewan komisaris akan berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan sukarela perusahaan. Semakin efektif fungsi

komite audit, maka tingkat pengungkapan sukarela perusahaan akan semakin baik pula. Variabel COMPLEXITY memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap DISCSORE atau tingkat pengungkapan sukarela perusahaan pada nilai  $\alpha = 1\%$ . Hal ini terkait dengan semakin banyaknya anak perusahaan yang dimiliki perusahaan, maka kebijakan pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan juga akan semakin baik, karena faktor kompleksitas perusahaan sehingga terdapat kepentingan yang lebih besar untuk mengungkapkan lebih banyak dalam laporan tahunan mereka.

Variabel SIZE dan KAP memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan pada nilai  $\alpha = 1\%$ . Semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat pengungkapan sukarejanya akan semakin tinggi, dan semakin baik kualitas audit perusahaan, maka tingkat pengungkapan sukarela juga akan semakin baik.

Variabel BOARDSCORE berhubungan positif dan signifikan dengan AUDCOMSCORE pada nilai  $\alpha = 1\%$ , hal ini dikarenakan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris di antaranya dalam mengawasi proses pengendalian internal perusahaan, *review* laporan keuangan, dan mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Semakin baiknya efektifitas dewan komisaris, maka semakin baik pula efektifitas komite audit yang dibentuknya. Variabel AUDCOMSCORE berhubungan positif dan signifikan dengan COMPLEXITY perusahaan pada nilai  $\alpha=10\%$ . Semakin kompleks perusahaan dengan semakin banyaknya anak perusahaan yang dimiliki, maka mendorong meningkatnya efektifitas komite audit perusahaan. Variabel BOARDSCORE berhubungan positif dan signifikan dengan SIZE perusahaan pada nilai  $\alpha=1\%$ . Semakin besar perusahaan, maka efektifitas dewan komisaris perusahaan akan semakin meningkat pula.

Tabel 4.12 Analisis Korelasi Pearson Model 1, 2 dan 3

	DSCORE	BOARDSCORE	AUDCOMSCORE	COMPLEXITY	ASSETS	AGENCY	ROE	SIZE	AGE	KAP
DSCORE	1									
BOARDSCORE	,538*** (,000)	1								
AUDCOMSCORE	,634*** (,000)	,545*** (,000)	1							
COMPLEXITY	,253*** (,000)	,220** (,000)	,124* (,012)	1						
ASSETS	-,085 (,086)	-,058 (,242)	-,105* (,034)	-,044 (,381)	1					
AGENCY	,121* (,015)	,087 (,078)	,057 (,253)	,015 (,763)	,011 (,821)	1				
ROE	,082 (,099)	,120* ,015	,101* (,041)	,136*** (,006)	-,133** (,007)	,096 (,053)	1			
SIZE	,190** (,000)	,243*** (,000)	,146** (,003)	,302*** (,000)	-,049 (,320)	,032 (,519)	,209*** (,000)	1		
AGE	,018 (,720)	-,038 (,441)	,095 (,054)	,078 (,118)	,052 (,292)	,033 (,507)	,068 (,168)	-,038 (,447)	1	
KAP	,326** (,000)	,249*** (,000)	,265*** (,000)	,148*** (,003)	-,025 (,611)	,087 (,078)	,158*** (,001)	,229*** (,000)	,122* (,014)	1

Angka dalam kurung menunjukkan p-value

\*\*\* Signifikan pada nilai  $\alpha=1\%$  (2-tailed)

\*\* Signifikan pada nilai  $\alpha=5\%$  (2-tailed)

\* Signifikan pada nilai  $\alpha=10\%$  (2-tailed)

#### 4.4. Uji Asumsi Klasik

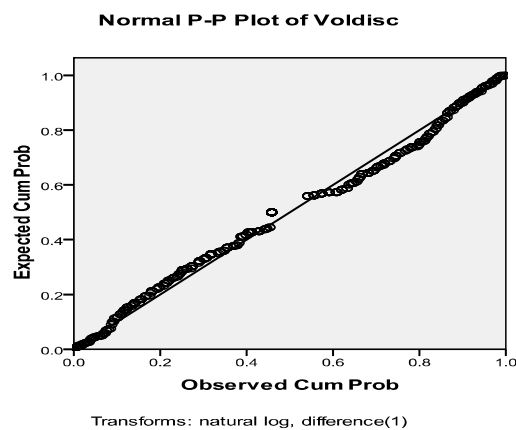
##### 4.4.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas untuk semua variabel dilakukan dengan melihat nilai Skewness sementara pengujian normalitas untuk variabel dependen DISCSORE dilakukan dengan test Kolmogorov-Smirnov yang terangkum dalam tabel 4.13 dan dengan menggunakan analisis grafik Normal P-P Plot pada gambar 4.1 dan gambar 4.2. Hasil tes Kolmogorov-Smirnov, hasilnya tidak cukup baik karena probability p-valuenya kurang dari 5% yaitu hanya 0.9%. Namun, berdasarkan grafik normal P-P Plot, diketahui bahwa variabel DISCSORE memiliki distribusi yang normal karena datanya tersebar disekitar garis diagonalnya, dengan hasil tersebut maka model telah memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, dengan observasi sebanyak 408, maka distribusi variabel dependen dapat diasumsikan normal (Nachrowi dan Usman, 2006).

Tabel 4.13 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Variabel		DISCSORE
N		408
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,303
	Standar Deviation	0,682
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Positive	0,081
	Negative	-0,060
Kolmogorov-Smirnov Z		1,645
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,009

Gambar 4.1 Grafik Normal P-P Plot DSCORE



#### 4.4.2. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas dari model penelitian dirangkum dalam tabel 4.14 untuk masing-masing model penelitian. Sebelumnya, pada model 3 terdapat permasalahan multikolinearitas yang terjadi pada variabel AGENCY PROBLEM dan variabel perkalian AGENCYPROBLEM\*BOARDSCORE dan AGENCYPROBLEM\*AUDCOMSCORE dimana nilai VIF > 10. Atas permasalahan tersebut, dilakukan *treatment* dengan mengubah nilai AGENCYPROBLEM menjadi dummy, dimana variabel bernilai 1 jika nilainya di atas median, dan 0 jika nilainya di bawah median.

Tabel 4.14

Pengujian Multikolinearitas Dengan Tolerance dan VIF pada Ketiga Model

Variabel	Model 1		Model 2		Model 3	
	Collinearity Statistics		Collinearity Statistics		Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF	Tolerance	VIF
BOARDSCORE	0,636	1,573			0,337	2,963
AUDCOMSCORE	0,654	1,530			0,333	3,005
COMPLEXITY	0,718	1,394	0,713	1,403		
ASSETS	0,967	1,034	0,974	1,027		
AGENCY			0,944	1,060	0,954	1,049
AGENCY*BOARDSCORE					0,357	2,804
AGENCY*AUDCOMSCORE					0,347	2,882
ROE	0,918	1,090	0,898	1,114	0,909	1,100
SIZE	0,528	1,895	0,587	1,705	0,682	1,466
AGE	0,950	1,053	0,967	1,034	0,960	1,042
KAP	0,784	1,276	0,793	1,261	0,787	1,271

Jumlah observasi: 408, dengan melakukan *centering* pada variabel BOARDSCORE, AUDCOMSCORE dan AGENCY untuk menghindari adanya multikolinearitas.

BOARDSCORE = Skor efektifitas dewan komisaris pada tahun t; AUDCOMSCORE = skor efektifitas komite audit pada tahun t; ASSETS = karakteristik aset perusahaan pada akhir tahun t yang digambarkan dengan rasio kepemilikan aset tetap dengan total aset secara keseluruhan; COMPLEXITY = jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan pada tahun t; AGENCY = *agency problem* yang dimiliki perusahaan dengan operating free cashflow sebagai proxynya,  $operating\ free\ cash\ flow = (free\ cash\ flow\ from\ operation - net\ capital\ expenditure) / total\ aset$ ; ROE = rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan pada tahun t,  $ROE = Net\ Income / Total\ Shareholders's\ equity$ ; KAP = Variabel dummy untuk mengukur kualitas audit perusahaan, bernilai 1 jika diaudit Big4 dan 0 jika tidak; AGE = variabel umur perusahaan dari awal listing di BEI sampai tahun penelitian; SIZE = natural logaritma dari total aset yang menggambarkan ukuran perusahaan.

Untuk variabel BOARDSCORE dan AUDCOMSCORE dilakukan *centering*, sehingga ketiga variabel tersebut terbebas dari permasalahan multikolinearitas. *Centering* pada kedua variabel tersebut dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata BOARDSCORE dan AUDCOMSCORE dan kemudian menghitung nilai aktual-nilai rata-rata tersebut, maka hasilnya adalah data *centering* yang dipakai untuk model 3 penelitian. Nilai VIF yang terbesar untuk masing-masing variabel dalam ketiga model penelitian adalah 3,005. Berdasarkan nilai *tolerance* yang berada di atas 0,100 dan nilai VIF yang berada di bawah 10 untuk keseluruhan variabel, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada model penelitian.

#### 4.4.3. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji White untuk ketiga model penelitian. Rangkuman hasil uji tersebut terdapat dalam tabel 4.15. Nilai *P-value probability* untuk model 1 dan 3 berada di bawah 5%. Nilai ini menunjukkan bahwa hipotesis model tersebut bersifat heterokedastis dan tidak dapat diterima sehingga diperlukan *treatment* lebih lanjut. *Treatment* yang dilakukan terhadap model ini adalah White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. Sementara untuk model 2, nilai *P-value probability*nya adalah 0,141 yaitu lebih dari 5% dimana tidak terdapat masalah heterokedastis sehingga tidak perlu dilakukan *treatment* seperti pada model 1 dan 3.

Tabel 4.15 Pengujian Heterokedastisitas pada ketiga model Model

	Model 1	Model 2	Model 3
F-statistic	1,603	1,201	1,499
Obs*R-squared	80,345	51,864	90,489
Prob. F	0,006	0,186	0,012
Prob. Chi-Square	0,000	0,141	0,000

#### 4.4.4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi yang dilakukan terhadap model penelitian bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi nilai residual pada observasi periode

sebelumnya. Autokorelasi yang terdapat pada model penelitian akan berdampak pada besarnya nilai varians dan level kepercayaan (*confidence level*). Hal ini akan mengakibatkan ketidakakuratan nilai yang dihasilkan pada uji t dan uji F. Pengujian mengenai keberadaan autokorelasi dalam model penelitian dilihat dari nilai statistik Durbin-Watson Test (DW). Nilai Autokorelasi pada model 1 penelitian ini adalah sebesar 1,789 dan nilai autokorelasi pada model 2 adalah 1,918, dan pada model 3 sebesar 1,807. Nilai DW pada ketiga model tersebut dinilai kurang baik karena kurang mendekati 2, sehingga diperlukan *treatment* dengan menambahkan ar(1) pada persamaan model. Hasil pengujian autokorelasi pada model ketiga model setelah dilakukan *treatment* ar (1) dirangkum dalam tabel 4.16 berikut:

Tabel 4.16 Pengujian Autokorelasi Pada Ketiga Model

	Model 1	Model 2	Model 3
Durbin Watson	1,973	1,997	1,975

#### 4.4.5. Uji Analisis Statistik F

Uji F merupakan pengujian model regresi secara simultan dari variabel-variabel independen yang bertujuan untuk melihat apakah secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebuah model regresi dikatakan berpengaruh signifikan apabila p-value dalam uji  $F < 0.05$ . Dalam penelitian ini, model 1, 2 dan 3 memiliki nilai p-value masing-masing sebesar 0.000 yang berarti ketiga model dalam penelitian ini dapat menjelaskan pengaruh variabel independen dan variabel kontrol secara keseluruhan terhadap variabel dependen dengan baik, sehingga model penelitian sudah valid untuk digunakan. Ringkasan hasil uji statistik Uji F dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.17 Pengujian Analisis Statistik F Pada Ketiga Model

	Model 1	Model 2	Model 3
R Square	0,703	0,216	0,694
Adjusted R Square	0,484	0,202	0,470
Std. Error of the Estimate	0,049	0,060	0,050
F	48,710	15,724	41,049
Sig	0,000	0,000	0,000

#### 4.4.6 Uji Analisis *Goodness of Fit* ( $R^2$ )

Ukuran Goodness of Fit ( $R^2$ ) mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat diterangkan oleh variabel independen. Seperti yang tercantum dalam tabel 4.17. Nilai adj.  $R^2$  pada model 1 adalah 0,484 yang berarti variabel dependen yaitu pengungkapan sukarela dapat dijelaskan oleh variabel independennya sebesar 48,40%. Untuk model 2 pada tabel 4.12, adj.  $R^2$  bernilai 0,202 yang berarti variabel bebas dan variabel kontrol pada model 2 dapat menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan sebesar 20,2%. Sementara nilai  $R^2$  pada model ketiga adalah sebesar 0,694 dan nilai adj.  $R^2$  nya sebesar 47%.

### 4.5. Analisis Hasil Pengujian Hipotesis

#### 4.5.1. Pengaruh Skor Efektifitas Dewan Komisaris Terhadap Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela Perusahaan

Pengujian terhadap hipotesis 1a ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh skor efektifitas dewan komisaris terhadap skor tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Berdasarkan hasil regresi yang dirangkum dalam tabel 4.18 berikut dapat disimpulkan BOARDSCORE berpengaruh positif dan signifikan terhadap DISCSORE perusahaan pada nilai  $\alpha = 1\%$ . Hal ini dikarenakan fungsi dari dewan komisaris sebagai pengawas segala kebijakan manajerial, termasuk kebijakan dalam pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan mereka. Semakin efektif fungsi pengawasan dewan komisaris, semakin baik pula pengungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan. Hasil regresi penelitian ini memiliki tanda/arah yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu positif dan signifikan pada nilai  $\alpha = 1\%$  sehingga hipotesis 1a dapat diterima dan dibuktikan dengan baik.



Penilaian skor efektifitas dewan komisaris yang memadukan empat kategori dewan komisaris yaitu independensi, aktivitas, jumlah (*size*), dan kompetensi dewan komisaris juga dinilai berpengaruh besar terhadap hasil regresi variabel *BOARDSCORE*. Dimasukkannya keempat kategori dewan komisaris dapat meningkatkan kualitas penilaian efektifitas dewan komisaris. Penelitian terdahulu melihat hubungan antara dewan komisaris dan pengungkapan sukarela dari aspek tertentu saja, seperti independensi, aktivitas, *size*, dan kompetensi. Selain itu, metode skoring yang dilakukan untuk menilai keempat kategori dewan komisaris tersebut, juga membantu menjelaskan tingkat efektifitas dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Menurut teori *corporate governance*, semakin baiknya fungsi dari dewan komisaris sebagai pengawas kebijakan manajemen perusahaan, maka akan meningkatkan *value* perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan dalam laporan tahunan mereka.

Hasil regresi tersebut juga sesuai dengan pernyataan dari Chen dan Beggi (2000), dimana dengan adanya pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan oleh *independent board* terhadap *corporate boards* secara keseluruhan akan membuat *corporate boards* lebih responsif terhadap investor, dan dimasukkannya *independent board* dalam susunan *corporate boards* akan meningkatkan kepatuhan perusahaan yang kemudian akan meningkatkan kelengkapan dan kualitas pengungkapan (*disclosure quality*). Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Chen dan Beggi (2000); Arcay dan Vazquez (2005); Cheng dan Courtenay (2006) dan Samaha *et al.* (2011) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *independent board* yang lebih besar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela, dan *independent board* memperkuat pemantauan fungsi dari manajemen, sehingga perusahaan menjadi lebih responsif terhadap tuntutan *stakeholder* dalam penyampaian informasi.

Sementara untuk kategori aktivitas dewan komisaris, Coleman (2007) menyatakan bahwa ketika *board* sering bertemu, mereka akan meningkatkan kinerja perusahaan dan dengan demikian akan melakukan tugasnya sesuai dengan

kepentingan pemegang saham. Dan, seperti pendapat para ahli sebelumnya, Adelopo (2011) menyatakan bahwa frekuensi dan durasi rapat yang dilakukan *board of director* berpengaruh positif dan signifikan dalam tingkat pengungkapan (*disclosure level*) dalam laporan keuangan perusahaan.

Tabel 4.18. Hasil Regresi Model 1

$$DISCSORE_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{BOARDScore}_{it} + \beta_2 \text{AUDCOMScore}_{it} + \beta_3 \text{COMPLEXITY}_{it} + \beta_4 \text{ASSET}_{it} + \beta_5 \text{PROFITABILITY}_{it} + \beta_6 \text{SIZE}_{it} + \beta_7 \text{AGE}_{it} + \beta_8 \text{AUDIT}_{it} + \varepsilon_{it}$$

	Expected Sign	Unstandardized Coefficients	t	Sig.
		B		
(Constant)		-0,065	-1,261	0,208
BOARDScore	+	0,164	4,677	0,000***
AUDCOMScore	+	0,239	10,333	0,000***
COMPLEXITY	+	0,000	2,398	0,017**
ASSETS	-	0,000	-0,392	0,695
ROE	+	0,000	-1,085	0,279
SIZE	+	0,003	1,605	0,109
AGE	+	0,000	-1,059	0,290
KAP	+	0,016	2,870	0,004***
Adjusted R-squared		0,484		
Durbin-Watson stat		1,973		
F-Statistic		48,710		
Prob (F-Statistic)		0,000		

\*\*\* signifikan pada nilai  $\alpha = 1\%$  (*one-tailed*)

\*\* signifikan pada nilai  $\alpha = 5\%$  (*one-tailed*)

\* signifikan pada nilai  $\alpha = 10\%$  (*one-tailed*)

Jumlah observasi: 408, dengan melakukan winsorize untuk observasi yang outlier berdasarkan winsorize approach dengan batasan mean  $\pm 3$  standar deviasi. Variabel yang diwinsorized adalah COMPLEXITY, ROE dan SIZE.

BOARDScore = Skor efektifitas dewan komisaris pada tahun t; AUDCOMScore = skor efektifitas komite audit pada tahun t; ASSETS= karakteristik aset perusahaan pada akhir tahun t yang digambarkan dengan rasio kepemilikan aset tetap dengan total aset secara keseluruhan; COMPLEXITY = jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan pada tahun t; ROE = rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan pada tahun t, ROE= Net Income/Total shareholder's equity; KAP = Variabel dummy untuk mengukur kualitas audit perusahaan, bernilai 1 jika diaudit Big4 dan 0 jika tidak; AGE = variabel umur perusahaan dari awal listing di BEI sampai tahun penelitian; SIZE = natural logaritma dari total aset yang menggambarkan ukuran perusahaan.

Penelitian Adelopo (2011) menghasilkan bukti empiris bahwa frekuensi dan durasi rapat yang dilakukan *board of director* berpengaruh positif dan signifikan dalam tingkat pengungkapan (*disclosure level*) dalam laporan keuangan perusahaan.

*Board* yang lebih besar dianggap sebagai salah satu komponen *corporate governance* yang mempengaruhi *disclosure* dalam laporan keuangan. Klein (2002) menyatakan bahwa ukuran *board of director* yang lebih besar lebih efektif dalam memonitoring manajemen karena kemampuan mereka yang lebih besar untuk melaksanakan tugasnya daripada *board of director* dengan ukuran yang lebih kecil. Barako (2007) yang meneliti *board size* dan pengaruhnya terhadap pengungkapan sukarela menyimpulkan bahwa *board size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. *Board* yang lebih besar dianggap sebagai salah satu komponen *corporate governance* yang mempengaruhi *disclosure* dalam laporan keuangan.

Penelitian mengenai kategori terakhir dalam dewan komisaris yaitu kompetensi dan hubungannya dengan tingkat pengungkapan sukarela dilakukan oleh Guneret *al.* (2008), yang menyatakan bahwa dengan adanya kompetensi *board of director* di bidang keuangan yang mengerti standar akuntansi yang berlaku seperti GAAP, akan menyebabkan pengawasan *board of director* yang lebih baik dan karenanya akan lebih baik dalam melayani kepentingan para pemegang saham. Guner *et al.* juga menyatakan bahwa *financial experts* bagaimanapun mempengaruhi kebijakan perusahaan dibalik lebih akuratnya tingkat pengungkapan (*disclosure level*) dan lebih baiknya performa komite audit perusahaan. Penelitian serupa dilakukan oleh Jeanjean dan Stolowy (2009) yang meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan proporsi ahli keuangan (*financial experts*) dalam *board*. Jeanjean dan Stolowy menyatakan dalam perspektif efisiensi ekonomi, kebutuhan yang lebih besar bagi perusahaan adalah kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi, dan akan lebih mungkin bagi perusahaan untuk meminta *board* agar memiliki pengetahuan yang lebih tentang akuntansi dan keuangan agar dapat membuat pengungkapan (*disclosure*) dengan lebih baik.

#### **4.5.2. Pengaruh Skor Efektifitas Komite Audit Terhadap Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela Perusahaan**

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.18, hasil hipotesis 2a dapat disimpulkan bahwa variabel AUDCOMSCORE berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel DISCSORE pada nilai  $\alpha = 1\%$ . Hasil regresi penelitian ini memiliki tanda/arah yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu positif dan signifikan, sehingga hipotesis 2a dapat diterima dan dibuktikan dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa efektifitas fungsi komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kebijakan perusahaan dalam mengungkapkan informasi perusahaan mereka dengan sukarela.

Hasil tersebut juga terkait dengan fungsi komite audit yaitu *review* laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen secara berkala untuk melihat keakuratan dan ketaatan laporan keuangan tersebut terhadap PSAK. Fungsi komite audit tersebut mengharuskan manajemen untuk mengungkapkan informasi perusahaan baik keuangan dan non keuangan dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan mendorong manajemen untuk lebih mengungkapkan informasi perusahaan dalam laporan tahunan mereka. Fungsi lainnya yang mempengaruhi hasil regresi di atas adalah fungsi komite audit dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan BAPEPAM-LK yang berlaku, komite audit yang efektif akan selalu memastikan perusahaan tidak melanggar peraturan tersebut dan tidak merugikan hak-hak investor serta *stakeholder* lainnya, hal tersebut mengakibatkan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan menjadi semakin baik.

Seperti halnya dewan komisaris, hal lain yang mempengaruhi hasil regresi di atas adalah dinilainya efektifitas komite audit dari empat kategori yang dilihat secara bersama-sama, yaitu dari kategori independensi, aktivitas, *size*, dan kompetensi komite audit. Dinilainya keempat kategori tersebut secara bersamaan memiliki andil yang besar dalam melihat kualitas efektifitas komite audit dalam hubungannya dengan pengungkapan sukarela perusahaan. Penggunaan metode skoring untuk menilai keempat variabel tersebut juga membantu menilai efektifitas komite audit dengan lebih baik. Penelitian sebelumnya mengenai

hubungan komite audit dengan pengungkapan sukarela dilihat dari berbagai aspek yang terpisah, seperti dari keberadaan, independensi, aktivitas, *size*, dan kompetensinya. Penelitian mengenai independensi komite audit dan hubungannya dengan pengungkapan sukarela dilakukan oleh Chen dan Jaggi (2000) yang meneliti pengaruh keberadaan komite audit yang independen dengan kebijakan pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan perusahaan menemukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara independensi komite audit dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Ho dan Wong (2001), dengan menggunakan *index disclosure* untuk menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Rupley *et al.* (2011) yang menemukan bahwa keefektifan komite audit dipengaruhi oleh ketekunan dari anggotanya, dan motif serta tanggung jawab mereka terhadap perusahaan. Penelitian Rupley *et al.* menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat ketekunan dan laporan yang disampaikan anggota komite audit, salah satunya frekuensi rapat tahunan yang dilakukan komite audit, dapat secara efektif *review* laporan keuangan perusahaan, fungsi eksternal dan internal audit.

Selanjutnya Coleman (2007) menyatakan ukuran (*size*) komite audit memiliki pengaruh yang positif dalam performa perusahaan yang berbasis pasar (*market based performance*) dan kepemilikan saham perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Guner *et al.* (2008) menyatakan keberadaan *financial expert* dalam komite audit dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan dibalik lebih akurat dan transparansinya pengungkapan (*disclosure level*) dalam laporan keuangan, dan tentu saja mempengaruhi keefektifan kinerja komite audit. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Hermawan (2009) yang berpendapat jumlah komite audit yang terlalu sedikit dapat mengurangi efektifitas fungsi komite audit karena tidak dilakukan pembagian tugas yang cukup baik dan beban kerja yang terlalu berat bagi masing-masing anggota komite audit.

#### **4.5.3. Pengaruh Kompleksitas Perusahaan Terhadap Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela Perusahaan**

Pengujian terhadap hipotesis 3a ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap skor tingkat pengungkapan sukarela. Berdasarkan hasil regresi yang dirangkum dalam tabel 4.18 dapat disimpulkan bahwa variabel COMPLEXITY berpengaruh positif dan signifikan terhadap DISCSORE pada nilai  $\alpha = 5\%$ . Hasil regresi penelitian ini memiliki tanda/arah yang sesuai dengan yang diharapkan, yaitu positif dan signifikan, sehingga hipotesis 3a dapat diterima dan dibuktikan dengan baik.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan maka semakin besar skor pengungkapan sukarela perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka kecenderungan untuk memperluas usaha dan kegiatan operasinya akan semakin besar. Perusahaan dengan anak perusahaan yang lebih banyak akan cenderung mengungkapkan lebih banyak tentang informasi perusahaannya, karena informasi tersebut melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, termasuk anak perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan induk perusahaan dan anak perusahaan seperti investor dan kreditor. Karena itulah, perusahaan dengan kepemilikan anak yang lebih banyak akan mendorong manajemen mengungkapkan lebih banyak informasi perusahaan dalam laporan tahunan mereka dan mematuhi prinsip transparansi dibandingkan dengan perusahaan dengan jumlah kepemilikan anak perusahaan yang lebih sedikit, dan yang tidak memiliki anak perusahaan.

Menurut Cunha dan Rego (2010), kompleksitas menunjukkan atribut sistemik, dan karena itu sangat penting untuk memahami organisasi secara keseluruhan, dimana setiap bagian dari organisasi saling berhubungan satu sama lain. Cunha dan Rego juga menyatakan bahwa perusahaan yang menghadapi kompleksitas lingkungan yang tinggi biasanya akan melakukan *outsourcing* dalam kegiatan non-inti dan lebih berkonsentrasi kepada sumber daya (material, keuangan dan perhatian) mereka atau pada kegiatan yang paling penting. Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan kompleksitas perusahaan dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan yang dilakukan oleh Hossain dan Reaz (2007) melaporkan bukti empiris bahwa kompleksitas perusahaan tidak memiliki

pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Hossain dan Hammami (2009) yang menyimpulkan jumlah anak perusahaan yang dimiliki yang menjadi *proxy* dalam menggambarkan kompleksitas perusahaan (*complexity*) signifikan dan positif dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela. Kompleksitas perusahaan dianggap mendorong perusahaan untuk dapat memiliki sistem informasi manajemen yang efektif untuk tujuan pengawasan.

#### **4.5.4. Pengaruh Karakteristik Aset Perusahaan Terhadap Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela**

Pengujian terhadap hipotesis 4a ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh karakteristik aset perusahaan terhadap skor tingkat pengungkapan sukarela. Berdasarkan hasil regresi yang dirangkum dalam tabel 4.18 dapat disimpulkan bahwa ASSETS tidak berpengaruh terhadap DISCSORE pada nilai  $\alpha = 5\%$ . Hasil regresi penelitian ini memiliki hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi penelitian yang diharapkan yang memperkirakan karakteristik aset perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, sehingga hipotesis 4a ditolak dan tidak dapat diterima dan dibuktikan dengan baik. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa karakteristik aset perusahaan tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait dengan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan mereka. Kebijakan pengungkapan perusahaan dipengaruhi oleh faktor lain, seperti yang telah dijelaskan di atas di antaranya efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, dan kompleksitas perusahaan

Hasil uji hipotesis 4a ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Omar dan Simon (2011) yang mengatakan bahwa karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) menjadi salah satu faktor yang penting dalam menentukan nilai perusahaan (*firm value*). Omar dan Simon juga menyatakan bahwa berdasarkan teori agensi (*agency theory*), perusahaan dengan proporsi kepemilikan *assets in place* yang besar memiliki peluang yang lebih kecil untuk mentransfer kekayaan dari kreditur (*debtholders*) kepada pemegang saham (*shareholders*).

Tabel 4.19. Hasil Regresi Model 2

$$DISCSORE_{it} = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_{it} + \beta_2 COMPLEXITY_{it} + \beta_3 ASSET_{it} + \beta_4 PROFITABILITY_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_6 AGE_{it} + \beta_7 AUDIT_{it} + \varepsilon_{it}$$

	Expected Sign	Unstandardized Coefficients	T	Sig.
		B		
(Constant)		-0,050	-0,785	0,433
AGENCY	-	0,011	1,773	0,077*
COMPLEXITY	+	0,000	1,586	0,114
ASSETS	+	-0,003	-1,169	0,243
ROE	+	0,000	-0,053	0,254
SIZE	+	0,012	5,192	0,000***
AGE	+	0,000	-0,480	0,631
KAP	+	0,026	3,744	0,000***
Adjusted R-squared		0,216		
Durbin-Watson stat		1,997		
F-Statistic		15,724		
Prob (F-Statistic)		0,000		

\*\*\* signifikan pada nilai  $\alpha = 1\%$  (*one-tailed*)

\*\* signifikan pada nilai  $\alpha = 5\%$  (*one-tailed*)

\* signifikan pada nilai  $\alpha = 10\%$  (*one-tailed*)

Jumlah observasi: 408, dengan melakukan winsorize untuk observasi yang outlier berdasarkan winsorize approach dengan batasan mean  $\pm 3$  standar deviasi. Variabel yang diwinsorized adalah COMPLEXITY, ROE dan SIZE.

AGENCY= *free cash flow from* perusahaan yang merupakan proxy *agency problem*, *free cash flow from* = (*Free cash flow from operation* - *Net capital expenditure*)/*Total asset*. ASSETS= proporsi aset tetap dari keseluruhan total aset yang merupakan proxy *assets in places*. COMPLEXITY = jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan pada tahun t; ROE = rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan pada tahun t, ROE = *Net income* / *total shareholder's equity*; KAP = Variabel dummy untuk mengukur kualitas audit perusahaan, bernilai 1 jika diaudit Big4 dan 0 jika tidak; AGE = variabel umur perusahaan dari awal listing di BEI sampai tahun penelitian; SIZE = natural logaritma dari total aset yang menggambarkan ukuran perusahaan.

Karakteristik aset perusahaan dapat mengakibatkan hubungan yang berbanding terbalik antara tingkat pengungkapan (*dislosure level*) dengan proporsi *assets in places* perusahaan. Hasil ini penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hossain dan Reaz (2007) yang melaporkan bukti empiris mengenai tingkat pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh 38 perusahaan dan bank di India. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris menunjukkan bahwa karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) berpengaruh positif dan signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Selanjutnya Hossain dan



Hammami (2009) menghasilkan bukti empiris bahwa karakteristik aset perusahaan (*assets in place*) berpengaruh positif dan signifikan dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini karena perusahaan dengan persentase yang lebih tinggi dari aset berwujud memiliki biaya agensi yang lebih rendah karena lebih sulit bagi manajer untuk menyalahgunakan definisi yang baik dari *assets in place* daripada untuk mengambil nilai dari peluang pertumbuhan yang tidak pasti.

#### **4.5.5. Pengaruh *Agency Problem* Terhadap Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela**

Pengujian terhadap hipotesis 5a ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh *agency problem* yang dimiliki perusahaan terhadap skor tingkat pengungkapan sukarela. Berdasarkan hasil regresi yang dirangkum dalam tabel 4.19 dapat dilihat bahwa AGENCY berpengaruh positif dan *marginally significant* pada nilai  $\alpha = 10\%$ . Hasil uji hipotesis ini berarti semakin tinggi *agency problem* yang dimiliki perusahaan maka tingkat pengungkapan sukarela akan semakin tinggi. Hasil tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi penelitian ini dimana terdapat hubungan yang negatif antara *agency problem* dan tingkat pengungkapan sukarela, dimana semakin tingginya *agency problem* yang dimiliki perusahaan, tingkat pengungkapan sukarela akan semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, hasil uji hipotesis 5a tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak dapat dibuktikan dengan baik. *Agency problem* dalam penelitian ini tidak mempengaruhi kebijakan manajemen terkait pengungkapan informasi perusahaan.

Penelitian mengenai *agency problem* dan hubungannya dengan tingkat pengungkapan sukarela dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) yang menyatakan bahwa pengungkapan sukarela diberikan oleh manajer untuk mengurangi biaya pemantauan (*monitoring cost*) oleh pemegang saham luar (*outside shareholders*). Baroko (2007) menyatakan adanya pengungkapan lebih dari perusahaan (*voluntary disclosure*) memberikan kesempatan yang sangat baik bagi manajer, yang memiliki akses informasi yang sangat luas, untuk mengungkapkan

informasi perusahaan dan membuat komunikasi yang kredibel dan reliabel kepada pasar dan pemegang saham agar optimis terhadap nilai perusahaan. Namun demikian dalam penelitian ini tidak dapat dibuktikan adanya hubungan dan pengaruh *agency problem* terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan.

#### **4.5.6. Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris Terhadap *Agency Problem* Dalam Mempengaruhi Skor Pengungkapan Sukarela Perusahaan**

Pengujian terhadap hipotesis 6a ditujukan untuk melihat bagaimana skor efektifitas dewan komisaris dapat memperkecil pengaruh *agency problem* terhadap skor pengungkapan sukarela perusahaan. Berdasarkan hasil regresi model 3 yang dirangkum dalam tabel 4.20 dapat disimpulkan bahwa variabel AGENCY\*BOARDSCORE tidak berpengaruh terhadap DISCSORE perusahaan pada nilai  $\alpha = 5\%$ . Hasil ini dapat diartikan bahwa pengaruh tingginya skor efektifitas dewan komisaris pada *agency problem* tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan pada laporan tahunan mereka. Dengan begitu hipotesis 5a ditolak dan tidak dapat diterima dan dibuktikan dengan baik.

Hasil ini dapat disebabkan adanya pelaporan keuangan yang merupakan cara yang efektif dalam mengurangi adanya *agency problem*, sementara pengungkapan lebih dari manajemen yaitu pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti hasil variabel independen dalam penelitian ini di antaranya efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit dan kompleksitas perusahaan. Menurut Clemente dan Labat (2009), dampak dari penerapan *corporate governance* yang digambarkan dengan keberadaan *independent Director*, sebagai salah satu mekanisme *internal control* yang paling penting dalam *agency problem*, dapat mengurangi efek dari *agency relationship* yang dapat dikurangi dengan adanya pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Dalam penelitian ini, *agency problem* yang telah dipengaruhi oleh efektifitas yang tinggi tidak dapat mempengaruhi *voluntary disclosure* perusahaan.

#### **4.5.7. Pengaruh Efektifitas Komite Audit Terhadap *Agency Problem* dalam mempengaruhi Skor Tingkat Pengungkapan Sukarela Perusahaan**

Seperti halnya pengujian terhadap hipotesis 6a, hipotesis 7a ditujukan untuk melihat bagaimana skor efektifitas komite audit dapat memperkecil pengaruh *agency problem* terhadap skor pengungkapan sukarela perusahaan. Berdasarkan hasil regresi model 3 yang dirangkum dalam tabel 4.20 dapat disimpulkan bahwa variabel AGENCY\*AUDCOMSCORE tidak berpengaruh terhadap DISCSORE perusahaan. Dan serupa dengan hasil pengujian pada hipotesis 6a, Hasil uji hipotesis 7a dapat diartikan bahwa pengaruh tingginya skor efektifitas komite audit pada *agency problem* tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan pada laporan tahunan mereka.

Samaha *et al.* (2012), menyatakan bahwa komite audit merupakan mekanisme kontrol yang dibentuk secara sukarela dalam situasi dimana adanya *agency cost* yang tinggi untuk meningkatkan kualitas arus informasi antara prinsipal dan agen. Dalam *agency theory* keberadaan komite audit dinilai dapat meminimalkan *agency cost* dalam *agency problem* dengan meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa pengaruh efektifitas komite audit yang tinggi akan meminimalkan pengaruh *agency problem* yang dimiliki perusahaan terhadap pengungkapan sukarela, dan hipotesis 7a pun tidak dapat diterima atau ditolak. Seperti halnya hasil pengujian hipotesis 6a, ditolaknya hipotesis ini dapat disebabkan karena variabel AGENCY PROBLEM sendiri tidak berpengaruh terhadap DISCSORE perusahaan.

Tabel 4.20. Hasil Regresi Model 3

$$DISCSORE_{it} = \beta_0 + \beta_1 AGENCY_{it} + \beta_2 BOARDSCORE_{it} + \beta_3 AUDCOMSCORE_{it} + \beta_4 AGENCY_{it} \times BOARDSCORE_{it} + \beta_5 AGENCY_{it} \times AUDCOMSCORE_{it} + \beta_6 PROFITABILITY_{it} + \beta_7 SIZE_{it} + \beta_8 AGE_{it} + \beta_9 AUDIT_{it} + \varepsilon_{it}$$

	Expected Sign	Unstandardized Coeficients	T	Sig.
		B		
(Constant)		0,272	9,360	0,000
AGENCY	-	0,006	1,118	0,132
BOARDSCORE	+	0,201	4,151	0,000***
AUDCOMSCORE	+	0,274	8,393	0,000***
AGENCY*BOARDSCORE	-	-0,019	-0,283	0,388
AGENCY*AUDCOMSCORE	-	-0,064	-1,409	0,157
ROE	+	0,000	-0,744	0,228
SIZE	+	0,001	0,871	0,192
AGE	+	0,000	-0,874	0,191
KAP	+	0,019	3,563	0,000***
Adjusted R-squared		0,475		
Durbin-Watson stat		1,977		
F-Statistic		37,671		
Prob (F-Statistic)		0,000		

\*\*\* signifikan pada nilai  $\alpha = 1\%$  (*one-tailed*)

\*\* signifikan pada nilai  $\alpha = 5\%$  (*one-tailed*)

\* signifikan pada nilai  $\alpha = 10\%$  (*one-tailed*)

Jumlah observasi: 408, dengan melakukan *winsorize* untuk observasi yang *outlier* berdasarkan *winsorize* approach dengan batasan  $\pm 3$  standar deviasi. Variabel yang di *winsorized* adalah COMPLEXITY dan ROE. Dan variabel yang mengalami centering adalah AGENCY, BOARDSCORE dan AUDCOMSCORE

AGENCY PROBLEM = *agency problem* yang terdapat dalam perusahaan dengan operating free cash flow sebagai proksinya; BOARDSCORE = Skor efektifitas dewan komisaris pada tahun t; AUDCOMSCORE = skor efektifitas komite audit pada tahun t; ROE = rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan pada tahun t; KAP = Variabel dummy untuk mengukur kualitas audit perusahaan, bernilai 1 jika diaudit Big4 dan 0 jika tidak; AGE = variabel umur perusahaan dari awal listing di BEI sampai tahun penelitian; SIZE = natural logaritma dari total aset yang menggambarkan ukuran perusahaan.

#### 4.6. Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Variabel Dependen

Dari keempat variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini, untuk melihat hubungannya dengan variabel dependen yaitu skor tingkat pengungkapan

sukarela perusahaan, hanya variabel KAP yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap skor tingkat pengungkapan sukarela perusahaan pada  $\alpha = 1\%$ . Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.27 dan 4.28. Hasil ini dapat diartikan bahwa semakin baiknya kualitas audit yang di *proxy*kan dengan kantor akuntan publik yang melakukan audit yaitu *Big4* dan non *Big4* akan mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Umumnya, ada persepsi bahwa KAP *Big 4* menandakan pelaporan yang lebih berkualitas dan lebih menaruh perhatian tentang reputasi mereka dan bahwa mereka memilih sendiri klien mereka. Ini memberi mereka posisi tawar untuk menuntut peningkatan keterbukaan dari klien mereka (Adelopo, 2011). Hasil regresi penelitian ini serupa dengan hasil penelitian Adelopo (2011) yang memasukkan kualitas KAP yang mengaudit sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. Adelopo (2011) menyimpulkan bahwa KAP yang mengaudit (*Big 4* atau tidak) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, yaitu sebesar 10%.

Sementara variabel kontrol seperti ROE, SIZE dan AGE tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas skor tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Variabel ROE yang merupakan *proxy* dari profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap DSCORE perusahaan, artinya berapapun ROE yang dicapai perusahaan, tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil ini berbeda dengan ekspektasi penelitian yaitu ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil regresi penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memasukkan ROE sebagai variabel kontrol dalam hubungannya dengan pengungkapan sukarela. Haniffa dan Cooke (2000) menggunakan profitabilitas sebagai variabel kontrol dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil yang didapat adalah membuktikan bahwa profitabilitas mempengaruhi pengungkapan sukarela secara signifikan. Hal tersebut didukung oleh Nasir dan Abdullah (2005) menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu profitabilitas mempengaruhi pengungkapan sukarela secara positif dan signifikan.

Variabel SIZE dalam penelitian ini, tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan, yang berarti ukuran perusahaan yang besar tidak dapat menjamin adanya pengungkapan yang lebih dari perusahaan dan begitu pula sebaliknya, ukuran perusahaan yang kecil tidak menjamin bahwa pengungkapan sukarelanya akan rendah. Hasil penelitian ini seperti terangkum dalam tabel 4.27 dan 4.28, berbeda dari ekspektasi awal yaitu SIZE berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan SIZE sebagai variabel penjelas dalam tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Luo *et al.* (2006) menggunakan ukuran perusahaan (*size*) sebagai variabel kontrol dalam menjelaskan faktor determinan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Kesimpulan yang didapat adalah perusahaan dengan ukuran yang lebih besar mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Selanjutnya Baroko (2007), menggunakan *size* sebagai salah satu variabel independen dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela menyimpulkan bahwa *size* sebagai salah satu karakteristik perusahaan berpengaruh signifikan dalam menjelaskan peningkatan pengungkapan sukarela perusahaan.

Variabel AGE yang diproxykan dengan umur perusahaan sejak listing di BEI atau sejak melakukan IPO sampai dengan tahun penelitian, dalam penelitian ini, seperti yang terangkum dalam tabel 4.27 dan 4.28 tidak berpengaruh signifikan terhadap DSCORE perusahaan. Artinya, berapapun umur perusahaan tidak akan mempengaruhi kebijakan pengungkapan sukarela perusahaan dalam laporan tahunan mereka. Hasil ini berbeda dengan ekspektasi awal penelitian bahwa AGE berpengaruh positif dan signifikan terhadap DSCORE perusahaan. Hasil ini juga berbeda dengan hasil dan pendapat para peneliti sebelumnya. Matoussi dan Chakroun (2007) memasukkan AGE sebagai salah satu variabel kontrol dalam menjelaskan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil yang didapat adalah umur perusahaan mempengaruhi secara positif dan signifikan dalam tingkat keluasan pengungkapan sukarela perusahaan. Selanjutnya, Hossain dan Hammami (2009) menyimpulkan tiga alasan mengapa umur perusahaan menjadi

salah satu pertimbangan dalam menentukan tingkat pengungkapan sukarela. Pertama, perusahaan yang lebih muda mungkin menderita kerugian kompetitif jika mereka mengungkapkan item tertentu seperti informasi penelitian pengeluaran, belanja modal, dan pengembangan produk. Faktor kedua adalah biaya dan kemudahan pengumpulan, pengolahan, dan menyebarkan informasi yang diperlukan. Biaya ini kemungkinan akan lebih berat bagi perusahaan yang lebih muda daripada mereka yang lebih tua. Faktor ketiga dan terakhir adalah situasi perusahaan yang lebih muda mungkin tidak memiliki '*track record*' untuk mengandalkan pengungkapan publik dan karena itu mungkin memiliki informasi lebih sedikit untuk mengungkapkan atau kurang yakin mengungkapkan. Hossain dan Hammami menemukan bukti empiris bahwa umur perusahaan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor determinan tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektifitas dewan komisaris yang dinilai berdasarkan empat kategori atau karakteristik dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Semakin efektif fungsi dewan komisaris, maka tingkat pengungkapan sukarela perusahaan juga akan semakin tinggi. Hasil tersebut membuktikan bahwa dewan komisaris sebagai wakil dari pemegang saham dalam perusahaan dapat meningkatkan *disclosure level* pada laporan tahunan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris yang efektif juga dapat meningkatkan fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang berkualitas, yang pada akhirnya akan melindungi hak-hak *stakeholder* perusahaan.
2. Efektifitas komite audit yang dinilai berdasarkan empat kategori atau karakteristik yaitu independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Semakin efektif komite audit dalam perusahaan, tingkat pengungkapan sukarela perusahaan juga akan semakin tinggi. Hasil ini sesuai dengan fungsi komite audit sebagai organ pendukung dewan komisaris, sehingga keberadaan komite audit di nilai penting dalam sebuah perusahaan. Hasil ini juga sesuai dengan salah satu tugas dan wewenang komite audit yaitu *mereview* laporan keuangan perusahaan, sehingga kualitas laporan keuangan akan semakin baik.
3. Tingkat kompleksitas perusahaan yang diprosikan dengan jumlah anak perusahaan yang dimiliki, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Hasil ini sesuai



dengan asumsi bahwa semakin kompleks perusahaan maka terdapat kepentingan yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi perusahaan dalam laporan tahunan mereka, mengingat perusahaan dengan kompleksitas yang tinggi juga harus memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan selain dengan perusahaan itu sendiri, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan anak perusahaan mereka, sehingga hal tersebut mendorong perusahaan memiliki kebijakan pengungkapan yang lebih tinggi.

4. Karakteristik aset perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Karakteristik aset perusahaan yang diprosikan dengan rasio aset tetap dengan total keseluruhan aset dinilai tidak mempengaruhi kebijakan manajemen terkait pengungkapan dalam laporan tahunan. Hasil ini dapat disebabkan karena terdapat faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi manajemen dalam
5. *Agency problem* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. *Agency problem* yang di proksikan dengan dengan *free cash flow from operation* tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait pengungkapan sukarela.
6. Dewan komisaris yang efektif tidak berpengaruh terhadap *agency problem* yang dimiliki perusahaan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini dikarenakan *agency problem* sendiri tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela perusahaan. Asumsi bahwa adanya *agency problem* dalam perusahaan akan mempengaruhi kebijakan manajemen terkait pengungkapan tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini.
7. Komite Audit yang efektif tidak berpengaruh terhadap *agency problem* yang dimiliki perusahaan dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela. Seperti halnya pada dewan komisaris, *agency problem* sendiri tidak mempengaruhi kebijakan manajemen terkait pengungkapan tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Kelemahan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Sampel data pada penelitian ini bersifat *cross-sectional*, di mana penelitian dilakukan dalam 2 tahun observasi saja. Selain itu terdapat kesulitan mendapatkan laporan tahunan beberapa perusahaan yang lengkap dan memenuhi kriteria, sehingga membatasi jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Kesulitan ini berupa adanya perusahaan yang belum/tidak menerbitkan laporan tahunannya pada tahun 2011, sehingga sampel yang digunakan untuk tahun 2011 jumlahnya sangat terbatas, yaitu 160 perusahaan. Untuk penelitian berikutnya, sebaiknya menambah jumlah sampel agar hasil yang didapatkan lebih baik.
2. Banyak sampel dalam penelitian ini yang tidak mengungkapkan informasi mengenai dewan komisaris dan komite audit dalam laporan tahunan perusahaan. Sehingga dalam melakukan penilaian skoring kedua variabel tersebut, ditemui banyak kendala yang mengakibatkan banyak perusahaan yang mendapatkan nilai skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit yang rendah, padahal mungkin saja mereka bisa mendapatkan nilai yang cukup tinggi, apabila kinerja dan informasi mengenai dewan komisaris dan komite audit diungkapkan dalam laporan tahunan. Selain itu penilaian efektifitas dewan komisaris dan komite audit yang hanya melalui laporan tahunan dinilai kurang dapat menghasilkan nilai yang baik.
3. Dalam penilaian pengungkapan sukarela menggunakan skoring, terdapat beberapa item pertanyaan yang digambarkan secara umum yang tidak dapat diterapkan untuk perusahaan jenis tertentu, karena sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini tidak dibedakan berdasarkan industri tertentu.

## 5.3 Saran

Berikut ini beberapa saran bagi setiap pihak yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penelitian ini. Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya,

Disarankan dapat lebih mengembangkan penilaian tentang item pengungkapan sukarela, hal ini karena item pengungkapan sukarela sangat luas dan tidak terdapat peraturan baku yang mengaturnya. Banyak industri yang memiliki kegiatan operasi yang unik dan tidak biasa, sehingga diharapkan bagi penelitian selanjutnya, item pengungkapannya lebih beragam dan dapat *mengcover* perusahaan-perusahaan dengan jenis industri tertentu.

2. Bagi Investor

Untuk investor, diharapkan dapat melihat dan mengkaji informasi yang terangkum dalam laporan tahunan perusahaan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dengan lebih seksama, informasi tersebut dapat dinilai dari bagaimana perusahaan menjalankan *corporate governance* dengan baik, informasi mengenai prospek perusahaan kedepannya, dan informasi lain yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan. Informasi non keuangan yang tercantum dalam laporan tahunan memiliki peran yang sama pentingnya dengan informasi keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini, perusahaan diharapkan lebih memperhatikan informasi yang tersaji dalam laporan tahunan mereka. Pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan sama pentingnya, sehingga diharapkan bagi perusahaan yang masih belum melakukan pengungkapan yang baik, agar lebih menaruh perhatian pada hal ini, dikarenakan informasi dalam laporan tahunan sangatlah penting perannya bagi investor dan para *stakeholders* perusahaan yang dapat digunakan untuk membuat berbagai keputusan yang bukan tidak mungkin akan memberikan dampak yang baik terhadap perusahaan itu sendiri.

#### 4. Bagi BAPEPAM-LK

Sebagai regulator perusahaan publik di Indonesia, BAPEPAM-LK diharapkan dapat lebih mendorong perusahaan untuk melakukan kebijakan atas peningkatan pengungkapan dalam laporan tahunan. Mengingat prinsip *transparency* dan *disclosure* haruslah dipenuhi oleh perusahaan, terutama perusahaan publik yang dimiliki oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Pemenuhan prinsip tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para *stakeholdernya*.

## DAFTAR REFERENSI

- Adelopo, Ismail. (2011). Voluntary disclosure practices amongst listed companies in Nigeria. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*. 27, 338–345.
- Ali, A., Chen, T.Y., Radhakarishnan, S. (2007). Corporate disclosures by family firms. *Journal of Accounting and Economics*, 29, 73-100.
- Archambault, Jeffrey J., and Archambault, Marie E., (2003). A multinational test of determinants of corporate disclosure. *The International Journal of Accounting*, 38, 173-194.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII G.7 Tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: 2000
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP 29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit*. Jakarta: 2004.
- Barako, Dulacha G. (2007). Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports. *African Journal of Business Management Vol. 1(5)* pp. 113-128.
- Clemente, Ana Gisbert., and Labat, Begona Navallas. (2009). Corporate governance mechanisms and voluntary disclosure, the role of independent directors in the boards of listed Spanish firms. *The International Journal of Accounting*, 38, 173-194.
- Chau, Gerald K. and Sidney J. (2002). Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore. *The International Journal of Accounting*, 37, 247-265.
- Chau, Gereld K. and Sidney J. (2010). Family ownership, board of independent and voluntary disclosure: evidence from Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 19, 93-109.
- Chui, Li Chi. (2009). Do transparency and disclosure predict firm performance? : evidence from the Taiwan market. *The International Journal of Accounting*, 36, 198-203.
- Cunha, Miguel Pina, E., and Rego, Armenio. (2010). Complexity, simplicity, simplicity. *European Management Journal*. 28, 85– 94
- Chen, Shuping., Chen, Xia., and Cheng, Qiang. (2008). Do family provide more or less voluntary disclosure?. *Journal of Accounting Research*, 46, 499-536.

- Chen, J.P. Chen. And Jaggi, Bikki. (2000). Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy* 19, 285–310
- Cheng, Eugene C.M., and Coutenay, Stephen M. (2006). Board composition, regulation regime, and voluntary disclosure”. *The International Journal of Accounting* 41, 262-289
- Cheng, Shijun. (2008). Board size and the variability of corporate performance. *Journal of Financial Economics*. 87, 157–176.
- Eng, L.L and Mak Y.T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, 325-345.
- Godfrey, et al. (2010). *Accounting Theory*, 7<sup>th</sup> Ed. John Wiley & Sons, Inc.
- Gul, F.A., & Leung, S. (2002). Board leadership, outside directors/ expertise and voluntary corporate disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 23(5), 351-379.
- Guner, A. Burak., Malmendier, Ulrike., and Tate, Geoffrey. (2008) Financial expertise of directors. *Journal of Financial Economics*, 88, 323–354.
- Healy, Paul M., and Palepu, Krishna G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital market: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economic*, 31, 405-440.
- Hermawan, Ancella, A. (2009). Pengaruh efektivitas dewan komisaris dan komite audit, kepemilikan oleh keluarga dan peran monitoring bank terhadap kandungan informasi laba. *Disertasi Program Studi Ilmu Manajemen Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Ho, Simon S.M., and Wong, Kar Sun. (2001). A study of relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing & Taxation*, 10,139-156.
- Hossain, Mohammed. and Hammami, Helmi. (2009). Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: The case of Qatar. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*. 25, 255–265.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3:4, 305-360
- Jeanjean, Thomas. and Stolowy, Hervé. (2009). Determinants of boardmembers financial expertise empirical evidence from France. *The International Journal of Accounting*, 44, 378–402.

- Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. *American Economics Review Journal*, 76, 323–339.
- Kanagaretnam, K., Lobo, Gerald J., and Whalen, Dennis J. (2007). Does good corporate governance reduce information asymmetry around quarterly earning announcement?. *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 26, 497-522
- Khaled, Samaha, A., and Khaled, Dahawy. (2012). The extent of corporate governance disclosure and its determinants in a developing market: The case of Egypt. *Advances in International Accounting*. 44, 378–402.
- Komite Nasional Keputusan Governance. (2006). *Pedoman Umum Corporate Governance di Indonesia*.
- Luo, Shuqing., Courtenay., Stephen M., and Hossain., Mahmud. (2006). The effect of voluntary disclosure, ownershipstructure and proprietary cost on the return–future earnings relation. *Pacific-Basin Finance Journal*. 14. 501-521.
- Machuga, Susan. and Teitel, Karen. (2009). Board of director characteristics and earnings quality surrounding implementation of a corporate governance code in Mexico. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. 18 1–13.
- McKnight, Phillip, J., and Weir, Charli. (2009). Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies: a panel data analysis. *The Quarterly Review of Economics and Finance*. 49 (2009) 139–158 .
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*.
- Omar, Bilal. and Simon, Jo. (2011) Corporate aggregate disclosure practices in Jordan. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*. 27, 166–186.
- Rupley, Kathleen. Almer, Elizabeth., and Philbrick, Donna. (2011). Audit Committee Effectiveness: Perceptions of public company audit committee members post-SOX. *Research in Accounting Regulation*, 23, 138-144.
- Rainsbury, Elizabeth A. Bradbury, Michael. and Cahan, Steven F. (2009). The impact of audit committee quality on financial reporting quality and audit fees. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*. 5, 20–33.
- Scott, William R. (2009). *Financial Accounting Theory*, 5<sup>th</sup> Ed. Pearson Prentice Hall.
- Vasconcelos, Flávio C., and Ramirez, Rafael. (2011). Complexity in business environments. *Journal of Business Research*. 64, 236–24

## Lampiran 1

**Daftar Checklist Voluntary Disclosure**  
**Sumber: Chau and Gray (2010) dengan Penyesuaian peraturan**  
**BAPEPAM-LK**

No	I . INFORMASI STRATEGIS	Y	N
	A. STRATEGI PERUSAHAAN		
1	Uraian strategi dan tujuan – keuangan		
2	Uraian strategi dan tujuan – pemasaran		
3	Uraian strategi dan tujuan – sosial		
4	Dampak strategi terhadap hasil hari ini		
5	Dampak strategi pada hasil masa mendatang		
	B. AKUISISI DAN DISPOSAL		
6	Alasan melakukan akuisisi		
7	Alasan melakukan disposal		
	C. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (R&D)		
8	Deskripsi dari proyek R&D		
9	Kebijakan perusahaan atas R&D		
10	Lokasi dari aktivitas R&D		
11	Jumlah karyawan yang terlibat dalam R&D		
	D. PROSPEK MASA MENDATANG		
12	Perkiraan kualitatif atas penjualan		
13	Perkiraan kuantitatif atas penjualan		
14	Perkiraan kualitatif atas profit		
15	Perkiraan kuantitatif atas profit		
16	Perkiraan kualitatif atas arus kas		
17	Perkiraan kuantitatif atas arus kas		
18	Asumsi yang mendasari perkiraan		
	II. INFORMASI NON KEUANGAN		
	A. INFORMASI MENGENAI DIREKSI		
19	Other directorship yang dipegang oleh Dewan Direksi		
20	Other directorship yang dipegang oleh Dewan Komisaris		
	B. INFORMASI MENGENAI KARYAWAN		
21	Persebaran karyawan berdasarkan kondisi geografis		
22	Persebaran karyawan berdasarkan lini bisnis		
23	Kategori karyawan berdasarkan fungsi		



## (Lanjutan)

	II. INFORMASI NON KEUANGAN	Y	N
	B. INFORMASI MENGENAI KARYAWAN		
24	Jumlah karyawan yang bekerja dua tahun atau lebih		
25	Alasan perubahan jumlah atau kategori karyawan sepanjang waktu		
26	Informasi kesejahteraan karyawan		
27	Kebijakan keselamatan		
28	Data kecelakaan		
29	Pengukuran biaya keselamatan		
30	Kebijakan alur komunikasi		
31	Permasalahan rekrutmen dan kebijakan yang terkait		
	C. KEBIJAKAN SOSIAL DAN VALUE ADDED INFORMATION		
32	Keamanan produk		
33	Program pengamanan lingkungan – kualitatif		
34	Program pengamanan lingkungan – kuantitatif		
35	Laporan value added		
36	Data value added		
37	Value added ratio		
38	Kualitatif value added information		
	D. INFORMASI KEUANGAN		
	A. Informasi Segmen		
39	Analisis pesaing-kualitatif		
40	Analisis pesaing-kuantitatif		
	B. TINJAUAN KEUANGAN		
41	Pendapat kualitatif atas profitabilitas		
42	Cash flow ratio		
43	Informasi periklanan – kualitatif		
44	Pengeluaran periklanan – kuantitatif		
45	Efek inflasi pada kegiatan operasi di masa akan datang - kualitatif		
46	Efek inflasi pada hasil – kualitatif		
47	Efek inflasi pada hasil – kuantitatif		
48	Efek inflasi pada aset – kualitatif		

## (Lanjutan)

	III INFORMASI KEUANGAN	Y	N
	B. TINJAUAN KEUANGAN		
49	Efek inflasi pada aset – kuantitatif		
50	Efek tarif bunga pada hasil hari ini		
51	Efek tarif bunga pada kegiatan operasi di masa akan datang		
	C INFORMASI NILAI TUKAR		
52	Efek fluktuasi nilai tukar pada kegiatan operasi di masa akan datang		
53	Efek fluktuasi nilai tukar pada kegiatan operasi di hari ini		
54	Nilai tukar utama yang digunakan dalam akun		
55	Hutang jangka panjang berdasarkan mata uang		
56	Hutang jangka pendek berdasarkan mata uang		
	D. INFORMASI HARGA SAHAM		
57	Harga saham pada akhir tahun		
58	Tren saham pada akhir tahun		
59	Kapitalisasi pasar pada akhir tahun		
60	Informasi listing pasar saham asing		

**Lampiran 2**  
**Daftar Pertanyaan Skoring Efektifitas Dewan Komisaris**  
**Penilaian dikembangkan oleh Hermawan (2009)**

<b>BAGIAN I INDEPENDENSI</b>	Good	Fair	Poor
<p>1. Keberadaan Dewan Komisaris yang independen</p> <p><i>Jika lebih dari 50% dari total dewan komisaris adalah dewan komisaris independen, maka perusahaan akan bernilai 3 'good', perusahaan dengan total 30% sampai 50% dewan komisaris independen akan bernilai 2 'fair', jika kurang dari 30% maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<p>2. Apakah Ketua Dewan Komisaris Berasal dari Independen Chairman</p> <p><i>Jika ketua dewan komisaris berasal dari komisaris independen, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika tidak berasal dari komisaris independen maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<p>3. Apakah terdapat definisi independensi bagi dewan komisaris</p> <p><i>Jika terdapat definisi independensi bagi dewan komisaris, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika tidak terdapat definisi independensi dewan komisaris, maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<p>4. Jumlah dewan komisaris yang kerja di perusahaan afiliasi</p> <p><i>Jika lebih dari 50% dewan komisaris perusahaan yang bekerja di perusahaan afiliasi, maka perusahaan mendapat nilai 1 'poor', jika dewan komisaris perusahaan yang bekerja di afiliasi total 30% sampai 50% bernilai 2 'fair', jika kurang dari 30% maka bernilai 3 'good'</i></p>			
<p>5. Adanya komite remunerasi dan nominasi</p> <p><i>Jika terdapat komite remunerasi dan nominasi dalam perusahaan maka perusahaan mendapat nilai 3 'good', jika hanya terdapat salah satunya maka bernilai 2 'fair', jika tidak memiliki keduanya maka bernilai 1 'poor'</i></p>			

## (Lanjutan)

<b>BAGIAN I INDEPENDENSI</b>	Good	Fair	Poor
6. Lamanya setiap komisaris perusahaan tersebut menjabat  <i>Jika lamanya dewan komisaris yang bekerja di perusahaan lebih dari 10 tahun, maka perusahaan mendapat nilai 1 'poor', jika lamanya antara 5-10 tahun maka bernilai 2 'fair', jika kurang dari 5 tahun maka bernilai 3 'good'</i>			
<b>BAGIAN II AKTIVITAS</b>			
7. Penjabaran Tanggung Jawab Dewan Komisaris  <i>Jika perusahaan menjabarkan tanggung jawab dewan komisaris perusahaan, maka perusahaan mendapat nilai 3 'good', jika tidak ada penjabaran tanggung jawab dewan komisaris perusahaan maka bernilai 1 'poor'</i>			
8. Jumlah Rapat Dewan Komisaris  <i>Jika rapat dewan komisaris dilakukan lebih dari 6 kali dalam setahun, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika rapat dilaksanakan antara 3-6 kali, maka bernilai 2 'fair', jika kurang dari 3 kali maka bernilai 1 'poor'</i>			
9. Tingkat kehadiran dewan komisaris  <i>Jika tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat tahunan lebih dari 80% maka perusahaan bernilai 3 'good', jika tingkat kehadiran diantara 70%-80% maka perusahaan bernilai 2 'fair', jika kurang dari 70% maka bernilai 1 'poor'</i>			
10. Apakah terdapat laporan dewan komisaris  <i>Jika dalam laporan tahunan perusahaan terdapat laporan dewan komisaris, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika tidak terdapat laporan dewan komisaris, maka perusahaan bernilai 1 'poor'</i>			

## (Lanjutan)

<b>BAGIAN II AKTIVITAS</b>	Good	Fair	Poor
11. <i>code of conduct</i>  <i>Jika perusahaan menjabarkan code of conduct dewan komisaris perusahaan, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika tidak ada penjabaran maka bernilai 1 'poor'</i>			
12. Pembahasan prospek bisnis oleh dewan komisaris  <i>Jika dalam laporan dewan komisaris terdapat pembahasan prospek bisnis perusahaan, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika tidak ada pembahasan prospek bisnis maka bernilai 1 'poor'</i>			
<b>BAGIAN III JUMLAH (SIZE)</b>			
13. Jumlah dewan komisaris  <i>Jika jumlah dewan komisaris perusahaan berjumlah &gt;15 maka perusahaan bernilai 1 'poor', jika berjumlah 10-15 maka perusahaan bernilai 2 'fair', jika jumlah dewan komisaris diantara 4-10 bernilai 3 'good', jika tidak memenuhi ketiganya maka bernilai 1 'poor'</i>			
<b>BAGIAN IV KOMPETENSI</b>			
14. Persentase komisaris yang memiliki latar belakang akuntansi ataupun <i>Finance</i>  <i>Jika presentasi dewan komisaris yang memiliki latar belakang akuntansi atau finance lebih dari 50% maka perusahaan bernilai 3 'good', jika presentasi latar belakang akuntansi atau finance diantara 30%-50%, perusahaan bernilai 2 'fair', jika kurang dari 30% maka bernilai 1 'poor'</i>			
15. Persentase komisaris yang memiliki pengalaman kerja di industri tersebut  <i>Jika lebih dari 50% dewan komisaris perusahaan yang memiliki pengalaman kerja di bidang industri perusahaan, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika 30%-50% dewan komisaris yang memiliki pengalaman di bidang industri perusahaan maka bernilai 2 'fair', jika kurang dari 30% yang memiliki pengalaman di bidang industri perusahaan maka bernilai 1 'poor'</i>			

## (Lanjutan)

BAGIAN IV KOMPETENSI	Good	Fair	Poor
<p>16. Persentase komisaris yang memahami industri tersebut</p> <p><i>Jika &gt;50% dewan komisaris perusahaan memahami industri bisnis perusahaan, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika 30%-50% dewan komisaris perusahaan yang memahami industri bisnis klien, maka perusahaan bernilai 2 'fair', jika kurang dari 30% maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<p>17. Umur masing-masing dewan komisaris</p> <p><i>Jika rata-rata umur dewan komisaris &gt;40 tahun, maka perusahaan mendapat nilai 3 'good', jika rata-rata berumur 30-40 tahun maka perusahaan mendapat nilai 2 'fair', jika rata-rata umurnya &lt;30 tahun maka perusahaan bernilai 1 'poor'</i></p>			

**Lampiran 3**  
**Daftar Pertanyaan Skoring Efektifitas Komite Audit**  
**Penilaian dikembangkan oleh Hermawan (2009)**

<b>BAGIAN I AKTIVITAS</b>	Good	Fair	Poor
<p>1. Apakah komite audit mengevaluasi <i>internal kontrol</i> perusahaan</p> <p><i>Jika komite audit mengevaluasi internal kontrol maka bernilai 3 'good', jika tidak maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<p>2. Apakah komite audit mengusulkan auditor eksternal</p> <p><i>Jika komite audit mengusulkan auditor eksternal perusahaan, maka bernilai 3 'good', jika tidak maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<p>3 Apakah komite audit melakukan <i>review</i> atas laporan keuangan</p> <p><i>Jika komite audit mereview laporan keuangan perusahaan, maka bernilai 3 'good', jika tidak maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<p>4. Apakah komite audit mereview masalah legal perusahaan</p> <p><i>Jika komite audit mereview masalah legal perusahaan, maka bernilai 3 'good', jika tidak maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<p>5. Apakah komite audit menyusun laporan komite audit</p> <p><i>Jika komite audit menyusun laporan komite audit perusahaan, maka bernilai 3 'good', jika tidak maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<p>6. Jumlah rapat komite audit</p> <p><i>Jika rapat komite audit dalam setahun lebih dari 6kali, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika rapat diadakan antara 3-6 kali maka perusahaan bernilai 2 'fair', jika kurang dari 3 maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<p>7. tingkat kehadiran komite audit dalam rapatnya</p> <p><i>Jika tingkat kehadiran rapat anggota komite audit adalah 80 % maka perusahaan bernilai 3 'good', jika tingkat kehadiran diantara 70%-80% maka perusahaan bernilai 2 'fair', jika kurang dari 70 % maka perusahaan bernilai 1 'poor'</i></p>			

## (Lanjutan)

<b>BAGIAN I AKTIVITAS</b>	Good	Fair	Poor
<p>8. Apakah komite audit membahas hal berikut dalam laporan komite audit:</p> <p>a. Ruang lingkup komite audit (1 jika ada dan 0 jika tidak ada)</p> <p>b. Keakuratan laporan keuangan (1 jika ada dan 0 jika tidak ada)</p> <p>c. <i>Cost-effectiveness</i> (1 jika ada dan 0 jika tidak ada)</p> <p>d. Independensi komite audit (1 jika ada dan 0 jika tidak ada)</p> <p>e. Objektivitas komite audit (1 jika ada dan 0 jika tidak ada)</p> <p><i>Jika skor kelima pertanyaan diatas adalah 5, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika nol atau tidak ada yang terpenuhi maka bernilai 1 'poor', jika kurang dari 5 bernilai 2 'fair'</i></p>			
<b>BAGIAN II JUMLAH (SIZE)</b>			
<p>9. Jumlah Komite Audit Perusahaan</p> <p><i>Jika jumlah komite audit perusahaan &gt; 3 maka perusahaan bernilai 3 'good', jika jumlahnya diantara 2-3 maka bernilai 2 'fair', jika kurang dari 2 maka bernilai 1 'poor'</i></p>			
<b>BAGIAN III KOMPETENSI</b>			
<p>10 Jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi</p> <p><i>Jika &gt;1 anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika hanya 1 yang memiliki latar belakang akuntansi maka perusahaan bernilai 2 'fair', jika tidak ada anggota yang memiliki latar belakang akuntansi maka perusahaan bernilai 1 'poor';</i></p>			
<p>11. Umur setiap anggota komite audit (0 jika tidak terdapat info)</p> <p><i>Jika rata-rata umur anggota komite audit &gt;40 tahun, maka perusahaan bernilai 3 'good', jika rata-rata umur komite auditnya antara 30-40 tahun, maka bernilai 2 'fair', jika kurang dari 30 tahun maka bernilai 1 'poor'</i></p>			



**Lampiran 3**  
**Daftar Observasi Perusahaan**

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	
			2010	2011
1	Astra Otoparts Tbk PT	AUTO	2010	2011
2	Champion Pacific Indonesia Tbk PT	IGAR	2010	2011
3	Chandra Asri Petrochemical Tbk PT	TPIA	2010	2011
4	Exploitasi Energi Indonesia Tbk PT	CNKO	2010	2011
5	Indopoly Swakarsa Industry Tbk PT	IPOL	2010	2011
6	J Resources Asia Pasifik Tbk PT	PSAB		2011
7	Jaya Agra Wattie Tbk PT	JAWA	2010	2011
8	Midi Utama Indonesia Tbk PT	MIDI		2011
9	Mitrabahtera Segara Sejati Tbk PT	MBSS		2011
10	Myoh Technology Tbk PT	MYOH	2010	
11	P.T. Jakarta International Hotels & Dev.	JIHD	2010	2011
12	PT ACE Hardware Indonesia Tbk	ACES	2010	2011
13	PT Adaro Energy Tbk	ADRO	2010	2011
14	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	ADHI	2010	2011
15	PT Agis Tbk	TMPI	2010	2011
16	PT Akasha Wira International Tbk	ADES	2010	2011
17	PT AKR Corporindo Tbk	AKRA	2010	2011
18	PT Alakasa Industrindo Tbk	ALKA	2010	2011
19	PT Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI	2010	2011
20	PT Ancora Indonesia Resources Tbk	OKAS	2010	2011
21	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	2010	2011
22	PT Apac Citra Centertex Tbk	MYTX	2010	2011
23	PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	APOL	2010	2011
24	PT Arwana Citramulia Tbk	ARNA	2010	
25	PT Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG	2010	2011
26	PT Asia Pacific Fibers Tbk	POLY	2010	2011
27	PT Astra Agro Lestari Tbk	AALI	2010	2011
28	PT Astra Graphia Tbk	ASGR	2010	2011
29	PT Astra International Tbk	ASII	2010	2011
30	PT ATPK Resources Tbk	ATPK	2010	2011
31	PT Bakrieland Development Tbk	ELTY	2010	2011
32	PT Bayan Resources Tbk	BYAN		2011
33	PT Bekasi Asri Pemula Tbk	BAPA	2010	2011
34	PT Benakat Petroleum Energy Tbk	BIPI	2010	2011
35	PT Bentoel Internasional Investama Tbk	RMBA		2011

## (Lanjutan)

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	
36	PT Berlian Laju Tanker Tbk	BLTA	2010	
37	PT Betonjaya Manunggal Tbk	BTON	2010	
38	PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk	BMSR	2010	2011
39	PT Bisi International Tbk	BISI	2010	2011
40	PT Budi Acid Jaya	BUDI	2010	
41	PT Bumi Citra Permai Tbk	BCIP	2010	2011
42	PT Bumi Resources Minerals Tbk	BRMS		2011
43	PT Bumi Resources Tbk	BUMI	2010	2011
44	PT Bumi Serpong Damai Tbk	BSDE	2010	2011
45	PT BW Plantation Tbk	BWPT	2010	2011
46	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	CSAP		2011
47	PT Central Proteinaprima Tbk	CPRO	2010	2011
48	PT Century Textile Industry Tbk	CNTX	2010	
49	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN	2010	2011
50	PT Ciputra Development Tbk	CTRA	2010	
51	PT Ciputra Property Tbk	CTRP	2010	2011
52	PT Ciputra Surya Tbk	CTRS	2010	2011
53	PT Citra Kebun Raya Agri Tbk	CKRA	2010	
54	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	CMNP	2010	2011
55	PT Citra Tubindo Tbk	CTBN	2010	2011
56	PT Colorpak Indonesia Tbk	CLPI	2010	2011
57	PT Cowell Development Tbk	COWL	2010	
58	PT Danayasa Arthatama Tbk	SCBD	2010	
59	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	DVLA	2010	2011
60	PT Dayaindo Resources International Tbk	KARK	2010	
61	PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk	PDES	2010	2011
62	PT Dian Swastatika Sentosa Tbk	DSSA	2010	
63	PT Duta Graha Indah Tbk	DGIK	2010	2011
64	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS	2010	
65	PT Duta Pertiwi Tbk.	DUTI	2010	
66	PT Eatertainment International Tbk	SMMT		2011
67	PT Ekadharma International Tbk	EKAD	2010	
68	PT Elnusa Tbk	ELSA	2010	2011
69	PT Energi Mega Persada Tbk	ENRG	2010	2011
70	PT Enseval Putera Megatrading Tbk.	EPMT	2010	

## (Lanjutan)

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	
71	PT Eratex Djaja Tbk	ERTX	2010	
72	PT Eterindo Wahanatama Tbk	ETWA	2010	2011
73	PT Ever Shine Tex Tbk	ESTI	2010	2011
74	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	FASW	2010	2011
75	PT Fast Food Indonesia Tbk	FAST		2011
76	PT First Media Tbk	KBLV	2010	2011
77	PT Gajah Tunggal Tbk	GJTL	2010	2011
78	PT Garda Tujuh Buana Tbk	GTBO	2010	
79	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	GIAA	2010	
80	PT Global Land Development Tbk	KPIG	2010	
81	PT Global Mediacom Tbk	BMTR	2010	2011
82	PT Golden Retailindo Tbk	GOLD	2010	
83	PT Goodyear Indonesia Tbk	GDYR	2010	
84	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	GMTD	2010	
85	PT Gozco Plantations Tbk	GZCO	2010	
86	PT Grahamas Citrawisata Tbk	GMCW	2010	
87	PT Gudang Garam Tbk	GGRM	2010	
88	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk	GDST	2010	
89	PT Hero Supermarket Tbk	HERO	2010	2011
90	PT Hexindo Adiperkasa Tbk	HEXA	2010	
91	PT Holcim Indonesia Tbk	SMCB	2010	
92	PT Hotel Mandarine Regency Tbk	HOME	2010	201
93	PT Hotel Sahid Jaya International Tbk	SHID	2010	2011
94	PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk	HITS	2010	
95	PT Indal Aluminium Industry Tbk	INAI	2010	
96	PT Indika Energy Tbk	INDY	2010	
97	PT Indo Acidatama Tbk	SRSN		2011
98	PT Indo Kordsa Tbk	BRAM	2010	
99	PT Indo Tambangraya Megah Tbk	ITMG	2010	
100	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	INTP	2010	2011
101	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP	2010	
102	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2010	
103	PT Indonesian Paradise Property Tbk	INPP	2010	2011
104	PT Indo-Rama Synthetics Tbk	INDR		2011
105	PT Indosat Tbk	ISAT	2010	2011
106	PT Indosiar Karya Media Tbk	IDKM	2010	2011
107	PT Indospring Tbk	INDS		2011

## (Lanjutan)

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	
108	PT Inovisi infracom Tbk	INVS	2010	
109	PT Intanwijaya Internasional Tbk.	INCI	2010	2011
110	PT Inti Agri Resources Tbk	IIKP		2011
111	PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk	IKAI	2010	
112	PT Intiland Development Tbk	DILD	2010	
113	PT Intiland Development Tbk	INTA	2010	2011
114	PT Island Concepts Indonesia Tbk	ICON	2010	2011
115	PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk.	JSPT	2010	
116	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	JSMR	2010	
117	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	JKON	2010	2011
118	PT Jaya Pari Steel Tbk	JPRS	2010	2011
119	PT Jaya Real Property Tbk	JRPT	2010	2011
120	PT Jembo Cable Company Tbk	JECC	2010	2011
121	PT Kabelindo Murni Tbk	KBLM	2010	2011
122	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF	2010	2011
123	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.	KIJA	2010	2011
124	PT Kedaung Indah Can Tbk	KICI	2010	2011
125	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	KDSI		2011
126	PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk	KIAS	2010	2011
127	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	KBRI	2010	2011
128	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	KAEF	2010	2011
129	PT KMI Wire and Cable Tbk	KBLI	2010	2011
130	PT Kokoh Inti Arebama Tbk	KOIN	2010	2011
131	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	KRAS	2010	
132	PT Laguna Cipta Griya Tbk	LCGP	2010	
133	PT Lamicitra Nusantara Tbk	LAMI	2010	2011
134	PT Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI	2010	2011
135	PT Lautan Luas Tbk	LTLS	2010	2011
136	PT Leyand International Tbk	LAPD		2011
137	PT Limas Centric Indonesia Tbk	LMAS	2010	
138	PT Lion Metal Works Tbk	LION	2010	2011
139	PT Lionmesh Prima Tbk	LMSH	2010	2011
140	PT Lippo Cikarang Tbk	LPCK	2010	2011
141	PT Lippo E-Net Tbk	LPLI	2010	2011
142	PT Lippo Karawaci Tbk	LPKR	2010	2011
143	PT Mahaka Media Tbk	ABBA	2010	
144	PT Malindo Feedmill Tbk	MAIN	2010	
145	PT Mandom Indonesia Tbk	TCID	2010	2011

Universitas Indonesia

## (Lanjutan)

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	
147	PT Matahari Department Store Tbk	LPPF	2010	
148	PT Matahari Putra Prima Tbk	MPPA	2010	2011
149	PT Medco Energi Internasional Tbk	MEDC	2010	2011
150	PT Media Nusantara Citra Tbk	MNCN	2010	
151	PT Merck Tbk	MERK	2010	
152	PT Metro Realty Tbk	MTSM	2010	
153	PT Metrodata Electronics Tbk	MTDL	2010	2011
154	PT Millennium Pharmacon Int. Tbk	SDPC	2010	2011
155	PT Mitra Adiperkasa Tbk	MAPI	2010	2011
156	PT Mitra International Resources Tbk	MIRA		2011
157	PT Modern Internasional Tbk	MDRN	2010	
158	PT Modernland Realty Tbk	MDLN	2010	
159	PT Mulia Industrindo Tbk	MLIA	2010	
160	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	MLBI	2010	2011
161	PT Multi Indocitra Tbk	MICE	2010	
162	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	LPIN		2011
163	PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk	MBAI	2010	
164	PT Multipolar Tbk	MLPL		2011
165	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI	2010	2011
166	PT Pakuwon Jati Tbk	PWON	2010	2011
167	PT Pan Brothers Tbk	PBRX	2010	2011
168	PT Panorama Sentrawisata Tbk	PANR	2010	2011
169	PT Panorama Transportasi Tbk	WEHA	2010	
170	PT Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO		2011
171	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL	2010	2011
172	PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk	TMAS	2010	
173	PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk	PGLI	2010	
174	PT Perdana Gapuraprima Tbk	GPRA	2010	
175	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	PGAS	2010	2011
176	PT Petrosea Tbk	PTRO	2010	
177	PT Pioneerindo Gourmet International Tbk	PTSP	2010	2011
178	PT Plaza Indonesia Realty Tbk	PLIN	2010	
179	PT Polychem Indonesia Tbk	ADMG	2010	
180	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	LSIP	2010	2011

## (Lanjutan)

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	
181	PT Prima Alloy Steel Universal Tbk	PRAS	2010	
182	PT Pudjiadi and Sons Estate Tbk	PNSE	2010	2011
183	PT Pusako Tarinka Tbk	PSKT	2010	2011
184	PT Pyridam Farma Tbk	PYFA	2010	
185	PT Radiant Utama Interinsco Tbk	RUIS	2010	
186	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.	RALS	2010	2011
187	PT Ratu Prabu Energi Tbk	ARTI	2010	
188	PT Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY	2010	
189	PT Rig Tenders Indonesia Tbk	RIGS	2010	2011
190	PT Roda Vivatex Tbk	RDTX		2011
191	PT Sampoerna Agro Tbk	SGRO	2010	2011
192	PT Samudera Indonesia Tbk	SMDR	2010	2011
193	PT SAT Nusapersada Tbk	PTSN	2010	
194	PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk	SRAJ		2011
195	PT Sekawan Intipratama Tbk	SIAP	2010	
196	PT Selamat Sempurna Tbk	SMSM	2010	2011
197	PT Semen Gresik (Persero) Tbk	SMGR	2010	
198	PT Sentul City Tbk	BKSL	2010	2011
199	PT Sierad Produce Tbk	SIPD	2010	
200	PT Sinar Mas Agro Resources & Tech Tbk	SMAR	2010	2011
201	PT Skybee Tbk	SKYB	2010	2011
202	PT Sona Topas Tourism Industry Tbk.	SONA	2010	2011
203	PT Steady Safe Tbk	SAFE	2010	2011
204	PT Sugi Samapersada Tbk	SUGI	2010	
205	PT Sumi Indo Kabel Tbk	IKBI	2010	
206	PT Supreme Cable Manufac.& Commerce Tbk.	SCCO		2011
207	PT Surya Citra Media Tbk.	SCMA	2010	
208	PT Surya Semesta Internusa Tbk.	SSIA	2010	
209	PT Suryamas Dutamakmur Tbk	SMDM	2010	2011
210	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	PTBA	2010	2011
211	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	TLKM	2010	2011
212	PT Tempo Inti Media Tbk	TMPO	2010	2011
213	PT Tempo Scan Pacific Tbk.	TSPC	2010	2011
214	PT Tigaraksa Satria Tbk	TGKA	2010	2011
215	PT Timah Tbk	TINS	2010	2011
216	PT Tirta Mahakam Resources Tbk	TIRT	2010	2011
217	PT Titan Kimia Nusantara Tbk	FPNI	2010	2011

## (Lanjutan)

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	
218	PT Toba Pulp Lestari Tbk	INRU	2010	2011
219	PT Total Bangun Persada Tbk	TOTL	2010	2011
220	PT Trada Maritime Tbk	TRAM	2010	2011
221	PT Trikonsel Oke Tbk	TRIO	2010	2011
222	PT Triwira Insanlestari Tbk	TRIL	2010	
223	PT Tunas Baru Lampung Tbk	TBLA	2010	2011
224	PT Tunas Ridean Tbk.	TURI	2010	
225	PT Unggul Indah Cahaya Tbk	UNIC	2010	2011
226	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR	2010	2011
227	PT United Tractors Tbk	UNTR	2010	2011
228	PT Unitex Tbk	UNTX		2011
229	PT Voksel Electric Tbk	VOKS	2010	2011
230	PT Wicaksana Overseas International Tbk	WICO	2010	2011
231	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	WIKA	2010	
232	PT Wintermar Offshore Marine Tbk	WINS	2010	2011
233	PT Yanaprima Hastapersada Tbk	YPAS	2010	
234	PT Zebra Nusantara Tbk	ZBRA	2010	2011
235	PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk	EMTK	2010	
236	PT. International Nickel Indonesia	INCO	2010	2011
237	PT. Sanggahamas Dipta	INDX	2010	2011
238	PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk	AIMS	2010	
239	Alam Karya Unggul Tbk PT	AKKU	2010	
240	PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk	ANTA	2010	
241	PT Asiaplast Industries Tbk	APLI	2010	2011
242	Agung Podomoro Land Tbk PT	APLN	2010	
243	PT. Asia Natural Resources	ASIA	2010	
244	PT Alam Sutera Realty Tbk	ASRI	2010	2011
245	PT Bayu Buana Tbk	BAYU	2010	
246	PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk	BIPP	2010	
247	PT Bukit Darmo Property Tbk	BKDP	2010	
248	Borneo Lumbung Energy	BORN	2010	
249	PT Berlina Tbk	BRNA	2010	
250	PT Barito Pacific Tbk	BRPT	2010	
251	PT Bakrie Telecom Tbk	BTEL	2010	
252	PT Bukit Uluwatu Villa Tbk	BUVA	2010	
253	PT Centris MultiPersada Pratama Tbk	CMPP	2010	
254	PT Darma Henwa Tbk	DEWA	2010	

(Lanjutan)

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	
255	PT Dyviacom Intrabumi Tbk	DNET	2010	
256	PT. Delta Dunia Makmur Tbk	DOID	2010	
257	PT. XL axiata	EXCL	2010	
258	PT. FKS Multi Agro	FISH	2010	
259	Fortune Mate Indonesia Tbk	FMII	2010	
260	PT. Smartfren Telecom Tbk	FREN	2010	
261	PT. HM Sampoerna Tbk	HMSP	2010	
262	PT. Harum Energy Tbk	HRUM	2010	
263	Indonesia Prima Property Tbk	_OMRE	2010	
264	Panca Wiratama Sakti Tbk	PWSI	2010	
265	Rukun Raharja Tbk.	RAJA	2010	
266	Sekawan Intipratama Tbk	SAIP	2010	
267	Tira Austenite Tbk	TIRA	2010	
268	Tigaraksa Satria Tbk.	TKGA	2010	
269	Truba Alam Manunggal Engineering Tbk.	TRUB	2010	
270	PT Ultrajaya Milk Industry & Trading	ULTJ		2011
271	Bakrie Sumatra Plantations Tbk	UNSP	2010	
<b>JUMLAH</b>			<b>248</b>	<b>160</b>